



**BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 300.2.3/219 / BUP-LK/VII/2026**

TENTANG

**PERUBAHAN RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PASCABENCANA BANJIR, TANAH LONGSOR DAN CUACA EKSTREM
DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2026-2028**

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Forum Pendampingan Pemutakhiran Rencana Aksi Kementerian/ Lembaga Dalam Rangka Finalisasi Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Sumatera Lingkup Provinsi Sumatera Barat, maka perlu dilakukan pemutakhiran dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Banjir, Tanah Longsor dan Cuaca Ekstrem di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026-2028 dengan mengacu kepada dokumen Renduk PRRP terkait muatan Peta Zona Rawan Bencana dan kebijakan strategis rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 tentang

Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 423, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
11. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;

Memperhatikan : Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 300.2.3/46/BUP-LK/I/2026 Tentang Rencana Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana Banjir, Tanah Longsor Dan Cuaca Ekstrem Di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026-2028.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA BANJIR, TANAH LONGSOR DAN CUACA EKSTREM DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2026-2028.

KESATU : Perubahan Rencana Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana Banjir, Tanah Longsor Dan Cuaca Ekstrem di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026-2028.

KEDUA : Perubahan Rencana Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disusun dalam bentuk dokumen Rencana Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana Banjir, Tanah Longsor dan Cuaca Ekstrem di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026-2028 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan keputusan ini.

- KETIGA** : Dokumen Perubahan Rencana Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- a. Bab I Pendahuluan
 - b. Bab II Kondisi Wilayah dan Kejadian Bencana;
 - c. Bab III Pengkajian Kebutuhan Pascabencana;
 - d. Bab IV Prinsip, Kebijakan dan Strategi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
 - e. Bab V Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
 - f. Bab VI Penutup
- KEEMPAT** : Jangka waktu pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Banjir, Tanah Longsor dan Cuaca Ekstrem di Kabupaten Lima Puluh Kota yakni selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2028
- KELIMA** : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarilamak,
pada tanggal **27** Juli 2026

BUPATI LIMA PULUH KOTA,





PEMERINTAH KABUPATEN
LIMA PULUH KOTA

Rencana Aksi

REHABILITASI & REKONSTRUKSI PASCA BENCANA

BANJIR, TANAH LONGSOR & CUACA EKSTREM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2025-2026



Berdasarkan :

Surat Keputusan Bupati Nomor 300.2.3/265/BUP-LK/XI/2025 terkait Penetapan bencana alam banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrem di Kabupaten Lima Puluh Kota

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 300.2.3/ /BUP-LK/VII/2026
TANGGAL : JULI 2026
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA REHABILITASI DAN
REKONSTRUKSI PASCABENCANA BANJIR,
TANAH LONGSOR DAN CUACA EKSTREM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2026-
2028

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
KATA PENGANTAR	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan	5
C. Ruang Lingkup.....	6
D. Sistematika Penulisan	8
BAB II KONDISI UMUM WILAYAH	10
A. Kondisi Wilayah	10
B. Kejadian Bencana	29
C. Upaya Pemulihan Awal.....	33
BAB III PENGKAJIAN KEBUTUHAN PEMULIHAN PASCABENCANA	36
A. Kerusakan dan Kerugian	41
B. Gangguan Akses, Gangguan Fungsi dan Peningkatan Risiko	48
C. Perkiraan Kebutuhan.....	54
BAB IV PRINSIP, KEBIJAKAN DAN STRATEGI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA	55
A. Prinsip Dasar dan Kebijakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.....	57
B. Strategi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.....	60
C. Skema Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	66
D. Indikasi Sumber Pendanaan.....	66
E. Jadwal Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	68



BAB V PENYELENGGARAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA	69
A. Perencanaan dan Pendanaan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	69
B. Kelembagaan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	73
C. Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi/Mekanisme Anggaran	74
D. Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi.....	75
E. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	77
F. Kestinambungan Pemulihan Pascabencana Berbasis PRB.....	79
BAB VI PENUTUP	81
A. Aspek Legal Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	81
B. Jangka Waktu Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi.....	83
C. Aspek Akuntabilitas Pelaksanaan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi	83
D. Aspek Pengakhiran Masa Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Error! Bookmark not defined.



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Luas Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota	13
Tabel 2. Klasifikasi Penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota Berdasarkan Jumlah Penduduk	15
Tabel 3. Jumlah Nagari Menurut Kecamatan dan Topografi Wilayah di Kabupaten Lima Puluh Kota.....	16
Tabel 4. Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Lima Puluh Kota.....	19
Tabel 5. Nama Aliran Sungai Kabupaten Lima Puluh Kota	20
Tabel 6 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Lima Puluh Kota.....	29
Tabel 7. Kerangka Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi.....	37
Tabel 8. Komponen Perkiraan Kebutuhan	38
Tabel 9. Substansi Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi.....	40
Tabel 10. Tahapan Pemulihan Pascabencana	67
Tabel 11. Jadwal Pelaksanaan Rehabilitasi & Rekonstruksi Pascabencana alam banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrem Kabupaten Lima Puluh Kota	68
Tabel 12 Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.....	70



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Peta Kondisi Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota.....	10
Gambar 2	Peta Morfologi Kabupaten Lima Puluh Kota	13
Gambar 3	Peta Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota	22
Gambar 4	Peta Zona Rawan Bencana Hidrometeorologi Provinsi Sumatera Barat	30
Gambar 5	Peta Zona Rawan Bencana Hidrometeorologi Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat	31
Gambar 6	Peta Zona Rawan Multibahaya Hidrometeorologi Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat	32
Gambar 7	Penilaian Kebutuhan Pascabencana.....	56
Gambar 8	Skema Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	66
Gambar 9	Kedudukan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	70



KATA PENGANTAR

Dalam rangka pemulihan kembali kehidupan masyarakat dan pembangunan kembali pascabencana banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrem di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota yang terjadi pada tanggal 25 November 2025, diperlukan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha, yang dalam pelaksanaannya melibatkan peran berbagai pihak penyedia sumber daya. Di tingkat daerah, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lima Puluh Kota dan berkoordinasi dengan BNPB di tingkat nasional serta BPBD Provinsi Sumatera Barat di tingkat provinsi.

Untuk efektivitas pencapaian tujuan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana, maka perlu disusun dan ditetapkan suatu dokumen Rencana yang didasarkan kepada hasil pengkajian kebutuhan pascabencana (Jitupasna). Rencana tersebut merupakan acuan dalam menyamakan persepsi dan langkah penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi bagi seluruh pihak yang terkait.

Sesuai dengan sifat Rencana Rehabilitasi Dan Rekonstruksi wilayah pascabencana, maka penyusunan Rencana Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana Banjir, Tanah Longsor dan Cuaca Ekstrem di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2026 ini dilakukan melalui suatu proses koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Kementerian/Lembaga dari sektor terdampak maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan fasilitasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Koordinasi telah dilaksanakan sejak pelaksanaan penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana serta pengkajian kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Sebagaimana halnya suatu dokumen perencanaan, maka Rencana rehabilitasi dan rekonstruksi ini terbuka untuk direvisi apabila dikemudian hari dinilai perlu dilakukan penyesuaian dengan kondisi yang terkini demi pencapaian tujuan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana yang efektif, efisien, akuntabel dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Akhir kata, kami memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada seluruh pihak yang terkait, khususnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yang telah memberikan bantuan dan fasilitasi demi tersusunnya dan ditetapkannya Rencana rehabilitasi dan rekonstruksi ini.



RINGKASAN EKSEKUTIF
RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PASCABENCANA BANJIR, TANAH LONGSOR DAN CUACA
EKSTREM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Pada hari Jumat tanggal 21 November 2025 terjadi hujan lebat yang disusul dengan cuaca ekstrem yang terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota. Cuaca ekstrem terus berlanjut hingga 25 November 2025 yang kemudian menyebabkan longsor dan likuifaksi tanah pada beberapa Kecamatan. Bencana alam ini kemudian menyebabkan ribuan orang mengungsi, ratusan rumah terdampak, ratusan hektar lahan pertanian terdampak, dan kerugian pada berbagai sektor lainnya. Kejadian bencana alam banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrem telah berdampak pada berbagai Nagari di Kecamatan Gunuang Omeh, Kecamatan Suliki, Kecamatan Guguk, Kecamatan Bukit Barisan, Kecamatan Mungka, Kecamatan Harau, Kecamatan Luak, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kecamatan Akabiluru dan Kecamatan Situjuah Limo Nagari. Bencana ini mengakibatkan lebih dari 1.450 Jiwa terdampak dan lebih dari 284 Kepala Keluarga mengungsi. Rusaknya 611 rumah warga, 18 jalan lingkungan, 126 jalan Kabupaten, 2 jalan Provinsi, 24 jembatan Kabupaten, 30 jembatan Gantung, 3 jembatan Provinsi. Rubuhnya 10 tebing sungai, rusaknya 34 saluran irigasi, 4 drainase, 13 bendungan, dan 10 sarana air bersih. Bencana ini juga memberi dampak yang signifikan pada 28 titik lahan persawahan, 8 titik lahan non sawah, 47 jembatan sarana pertanian, 5 titik kawasan hutan seluas 0.26 Hektar, 35 dapur produksi IKM, 4 titik sarana kesehatan, 27 sekolah, 17 gedung Pemerintahan, dan 1 rumah peribadatan.

Bencana alam banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrem di Kabupaten Lima Puluh Kota telah mengakibatkan ratusan rumah rusak dengan kategori rusak berat, rusak sedang maupun rusak ringan. Bencana ini juga mengakibatkan kerusakan pada sarana dan



prasarana yang berdampak pada sektor perumahan, infrastruktur, sosial, ekonomi, dan lintas sektor yang mengakibatkan terganggunya aktivitas dan layanan umum di wilayah terdampak bencana. Untuk mengetahui akibat dan dampak bencana alam banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrem tersebut telah dilakukan penilaian kerusakan dan kerugian serta kajian kebutuhan pascabencana (Jitupasna) yang dilanjutkan dengan penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota dan SKPD terkait dengan difasilitasi oleh BNPB.

Bencana alam banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrem ini telah mengakibatkan total kerusakan dan kerugian sebesar Rp. 967,408,148,237,- (Sembilan ratus enam puluh tujuh miliar empat ratus delapan juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh tujuh *Rupiah*) dengan rincian kerusakan dan kerugian terbesar terjadi pada sektor Infrastruktur Sebesar Rp. 903,741,687,029,- (Sembilan ratus tiga miliar tujuh ratus empat puluh satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu dua puluh Sembilan *Rupiah*) disusul Sektor Perumahan sebesar Rp. 38,990,305,315,- (Tiga puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh juta tiga ratus lima ribu tiga ratus lima belas *Rupiah*), Sektor Sosial sebesar Rp. 17,221,012,400,- (Tujuh belas miliar dua ratus dua puluh satu juta dua belas ribu empat ratus *Rupiah*), Sektor Ekonomi sebesar Rp. 6,752,481,493,- (Enam miliar tujuh ratus lima puluh dua juta empat ratus delapan puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh tiga *Rupiah*), dan Lintas Sektor sebesar Rp. 702,662,000,- (Tujuh ratus dua juta enam ratus enam puluh dua *Ribu Rupiah*).

Sebagai acuan pelaksanaan pemulihan dilakukan penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrem di Kabupaten Lima Puluh Kota, berdasarkan pada hasil pengkajian kebutuhan pascabencana



dipadukan dengan kebijakan, kemampuan sumber daya pendanaan yang bersumber dari Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah serta dukungan dari berbagai pihak. Berdasarkan hasil pembahasan dan kesepakatan yang dilaksanakan melalui rapat koordinasi daerah maka pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrem di Kabupaten Lima Puluh Kota harus memperhatikan skala kebutuhan prioritas serta perlunya tindakan pencegahan dan mitigasi dalam rangka pengurangan resiko bencana dimasa yang akan datang.

Jangka waktu pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang ditetapkan dalam Rencana Aksi ini adalah selama 3 Tahun sejak dokumen ini dibuat.

Prioritas pemulihan berada di sektor perumahan dan infrastruktur, yaitu berupa pembangunan Hunian Tetap (HunTap) bagi masyarakat terdampak bencana dan rekonstruksi jalan dan jembatan. Untuk relokasi, kebutuhan lahan untuk pembangunan prasarana lingkungan perumahan disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota bersama tokoh dan lapisan masyarakat yang mewakili Nagari terkait.

Perencanaan pembangunan di wilayah terdampak bencana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sama hal nya dengan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang berupa kebijakan yang diintegrasikan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah, telah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Dalam kaitannya dengan mekanisme perencanaan dan penganggaran pembangunan tahunan, Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah untuk penyusunan RAPBD, sesuai dengan mekanisme dalam peraturan dan perundang-undangan terkait.



Pendanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrem di Kabupaten Lima Puluh Kota bersumber dari APBN, APBD dan sumber lain yang sah. Mekanisme dan prosedur pendanaan pemerintah dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana ini mengikuti mekanisme dan prosedur baku pendanaan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan aturan pelaksanaan yang terkait dengan undang-undang dimaksud. Setiap bantuan pendanaannya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota terkait sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berkenaan dengan bentuk kegiatannya masing-masing dan alokasi pendanaan.

Seluruh rangkaian penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana telah dan akan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Kegiatan ini dimulai dari perencanaan kegiatan yang meliputi indentifikasi dan penghimpunan sumber pembiayaan, pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, pengorganisasian pelaksana kegiatan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan termasuk pengawasan baik yang dilaksanakan oleh pihak internal maupun eksternal pemerintah dan atau pemerintah daerah, sampai kepada langkah pengalihan hasil rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana kepada program pembangunan yang berkelanjutan pada daerah tersebut.

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesepakatan yang dilaksanakan melalui Rapat Koordinasi Daerah maka untuk pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrem di Kabupaten Lima Puluh Kota memperhatikan kebutuhan untuk tindakan pencegahan dan mitigasi bencana untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan ketika bencana



yang sama terjadi dimasa yang akan datang.

Adapun kebutuhan pendanaan untuk seluruh kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrem di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebesar Rp. 1.201.794.846.496,- (*Satu triliun dua ratus satu miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus empat puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah*). Terbesar pada sektor infrastruktur dengan nilai Rp. 844.992.879.457,- (*Delapan ratus empat puluh empat miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah*) atau 70.31% dari total kebutuhan seluruh sektor. dilanjutkan dengan sektor sosial membutuhkan pendanaan sebesar Rp. 127.011.030.423,- (*Seratus dua puluh tujuh miliar sebelas juta tiga puluh ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah*) (10.57%), lintas sektor sebesar Rp. 110.072.902.966,- (*Seratus sepuluh miliar tujuh puluh dua juta sembilan ratus dua ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah*) (9.16%), sektor perumahan sebesar Rp. 62.530.768.248,- (*Enam puluh dua miliar lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu dua ratus empat puluh delapan Rupiah*) (5.20%), dan pada sektor ekonomi sebesar Rp. 57.187.265.402,- (*Lima puluh tujuh miliar seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh lima ribu empat ratus dua rupiah*) (4.76%).

Untuk mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi kinerja pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, maka pemantauan perlu dilakukan sebagai upaya pengendalian proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, sedangkan evaluasi dilakukan dalam rangka menilai efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran serta manfaat kegiatan di wilayah pascabencana. Pelaporan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.



BAB I

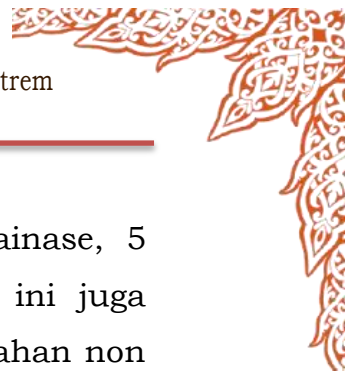
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hari Jumat, tanggal 21 November 2025 terjadi hujan lebat yang disusul dengan cuaca ekstrem yang terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota. Cuaca ekstrem terus berlanjut hingga 25 November 2025 yang kemudian menyebabkan longsor dan likuefaksi pada tanah di beberapa Kabupaten pada rentang waktu tersebut. Bencana alam ini kemudian menyebabkan ribuan orang mengungsi, ratusan rumah terdampak, ratusan hektar lahan pertanian terdampak, dan kerugian pada berbagai sektor lainnya.

Berdasarkan hasil studi riset yang tertuang dalam dokumen Kajian Resiko Bencana Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029, Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki potensi bencana berupa banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, likuefaksi dan tanah longsor. Namun demikian, masing-masing Kecamatan yang berada pada wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki tingkatan bahaya yang berbeda-beda.

Kejadian bencana alam banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrem pada 21 hingga 25 November 2025 ini telah berdampak pada Kecamatan Gunuang Omeh, Kecamatan Suliki, Kecamatan Guguk, Kecamatan Bukit Barisan, Kecamatan Mungka, Kecamatan Harau, Kecamatan Luak, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kecamatan Akabiluru dan Kecamatan Situjuh Limo Nagari. Bencana ini mengakibatkan lebih dari 1.493 Jiwa terdampak dan 228 Kepala Keluarga mengungsi. Rusaknya 609 rumah warga, 20 jalan lingkungan, 34 jalan Kabupaten, 2 jalan Provinsi, 19 jembatan Kabupaten, 27 jembatan Gantung, dan 3 jembatan Provinsi. Juga memerlukan penanganan lanjutan



terhadap 2 tebing sungai, 8 saluran irigasi, 2 drainase, 5 bendung, dan 5 titik sarana air bersih. Bencana ini juga berdampak pada 30 titik lahan persawahan, 8 titik lahan non sawah, 13 jembatan sarana pertanian, 5 titik kawasan hutan, 35 dapur produksi IKM, 4 titik sarana kesehatan, 9 sekolah, 2 gedung Pemerintahan, dan 1 rumah peribadatan.

Menyikapi kejadian bencana di berbagai Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota tersebut, Bupati Lima Puluh Kota menetapkan status tanggap darurat bencana alam untuk bencana banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrem di Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut :

1. SK Bupati Lima Puluh Kota Nomor 300.2.3/26S/BUP-LK /XI /2025 Tanggal 25 November – 8 Desember 2025 Tentang Status Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir, Tanah Longsor dan Cuaca Ekstrem di Kabupaten Lima Puluh Kota Selama 14 (Empat Belas) Hari.
2. SK Bupati Lima Puluh Kota Nomor 300.2.3/272/BUP-LK/ XI/ 2025 Tanggal 9 Desember – 15 Desember 2025 Tentang Penetapan Status Perpanjangan Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir, Tanah Longsor dan Cuaca Ekstrem di Kabupaten Lima Puluh Kota Selama 7 (Tujuh) Hari.
3. SK Bupati Lima Puluh Kota Nomor 300.2.3/274/BUP-LK/ XI/ 2025 Tanggal 16 Desember – 22 Desember 2025 Tentang Penetapan Status Perpanjangan Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir, Tanah Longsor dan Cuaca Ekstrem di Kabupaten Lima Puluh Kota Selama 7 (Tujuh) Hari.
4. SK Bupati Lima Puluh Kota Nomor 300.2.3/281/BUP-LK/ XII/2025 Tanggal 23 Desember 2025 - 22 Juni 2026 Tentang Penetapan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Dalam Rangka Penanganan Bencana Alam Banjir, Tanah Longsor dan Cuaca Ekstrem di Kabupaten Lima Puluh Kota Selama 6 (Enam) Bulan.



5. SK Bupati Lima Puluh Kota Nomor 300.2.3/196/BUP-LK/VII/2026 Tanggal 23 Juni 2025 - 20 Desember 2026 Tentang Penetapan Status Perpanjangan Transisi Darurat ke Pemulihan Dalam Rangka Penanganan Bencana Alam Banjir, Tanah Longsor dan Cuaca Ekstrem di Kabupaten Lima Puluh Kota Selama 6 (Enam) Bulan.

Setelah status keadaan darurat bencana dan transisi darurat ke pemulihan berakhir, maka tahapan berikutnya yang dilaksanakan adalah rehabilitasi dan rekonstruksi. Untuk pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut sesuai dengan peraturan perundangan maka diperlukan perencanaan. Perencanaan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut yang disebut dengan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) adalah dokumen perencanaan yang disusun secara bersama antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana/Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama kementerian/lembaga, perangkat daerah serta pemangku kepentingan lainnya berdasarkan atas pengkajian kebutuhan pascabencana untuk periode waktu tertentu.

Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi ini memuat dan menetapkan :

1. Kebijakan dan strategi rehabilitasi dan rekonstruksi;
2. Rincian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
3. Kebutuhan pendanaan setiap kegiatan;
4. Identifikasi program/kegiatan dan anggaran pada setiap OPD/lembaga yang dapat diarahkan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
5. Menetapkan sumber pendanaan (pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, organisasi masyarakat



dalam dan luar negeri, negara lain dan lain-lain yang sah);
dan

6. Jangka waktu pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dilakukan dalam periode waktu tertentu yang disusun secara bersama-sama antara BPBD, Kecamatan terdampak, Bappelitbangda, OPD/lembaga terkait penanggulangan bencana serta pemangku kepentingan lainnya di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Memperhatikan dampak dan akibat yang ditimbulkan bencana banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrem di Kabupaten Lima Puluh Kota, maka perlu disusun sebuah dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana. Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana disusun secara komprehensif dan terpadu dengan memperhatikan :

1. Hasil pengkajian kebutuhan pascabencana;
2. Lingkungan Hidup dan Daerah Aliran Sungai;
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
4. Rencana Tata Ruang dan Wilayah;
5. Perencanaan sektor yang ada;
6. Kajian risiko Bencana;
7. Kesehatan masyarakat dan lingkungan sehat;
8. Kondisi sosial, adat istiadat dan budaya lokal;
9. Kondisi ekonomi lokal;



10. Peraturan perundang-undangan dan standar nasional Indonesia mengenai penyelenggaraan bangunan gedung dan infrastruktur yang berlaku; dan
11. Standar pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

B. Maksud dan Tujuan

Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026-2028, disusun sebagai rencana program dan kegiatan dalam rangka :

1. Membangun kesepahaman dan komitmen antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha, masyarakat, perguruan tinggi/akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat untuk membangun kembali lebih baik seluruh aspek hidup dan penghidupan yang terkena bencana;
2. Menyelaraskan seluruh kegiatan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan dokumen perencanaan pembangunan Pemerintah (Kementerian dan lembaga), OPD/Lembaga terkait di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Pemerintah Kecamatan terdampak;
3. Memberikan gambaran yang jelas kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya mengenai pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegiatan; dan
4. Mengembangkan sistem dan mekanisme mobilisasi pendanaan dari sumber APBN, APBD dan sumber lain yang sah secara efektif, efisien, transparan, partisipatif dan akuntabel, sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun 2026-2028 bertujuan untuk mewujudkan :

1. Keseragaman pemahaman dan persepsi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta unsur- unsur swasta, masyarakat, dan perguruan tinggi agar pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berlangsung dengan baik;
2. Perencanaan program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sesuai dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Perencanaan dan penganggaran program kegiatan sesuai dan selaras dengan dokumen perencanaan nasional dan daerah;
4. Perencanaan dan penganggaran yang partisipatif dan konsultatif, yakni program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana telah dikonsultasikan dan memuat masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*);
5. Kemudahan dalam pemantauan dan pengendalian atas kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana; dan
6. Penggunaan pengelolaan sumber dana untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang mematuhi prinsip kehati-hatian dan bertanggungjawab.

C. Ruang Lingkup

Secara umum perencanaan dalam penanggulangan bencana dilakukan pada setiap tahapan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, agar kegiatan dalam setiap tahapan dapat berjalan dengan terarah, maka disusun suatu rencana yang spesifik pada setiap tahapan penyelenggaraan penanggulangan pascabencana. Sasaran substansial rehabilitasi dan rekonstruksi meliputi :

1. Aspek kemanusiaan, antara lain terdiri dari sosial psikologis, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, keamanan dan ketertiban, partisipasi dan



- peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
2. Aspek perumahan, terdiri dari perbaikan lingkungan daerah bencana, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat dan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 3. Aspek infrastruktur, antara lain terdiri dari perbaikan sarana dan prasarana umum, pemulihan fungsi pemerintah, fungsi pelayanan publik, pembangunan kembali sarana dan prasarana, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang baik dan tahan bencana, peningkatan fungsi pelayanan publik dan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat;
 4. Aspek ekonomi, antara lain terdiri dari pemulihan sosial ekonomi dan budaya, peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya, mendorong peningkatan ekonomi lokal seperti pertanian, perdagangan dan industri, pariwisata dan perbangkan;
 5. Aspek sosial, antara lain terdiri dari pemulihan konstruksi sosial dan budaya, pemulihan kearifan dan tradisi masyarakat, pemulihan hubungan antar budaya dan keagamaan dan membangkitkan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat; dan
 6. Aspek lintas sektor, antara lain terdiri dari pemulihan aktivitas/kegiatan yang meliputi tata pemerintahan dan lingkungan hidup.

D. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026-2028 terdiri dari 6 (enam) BAB, antara lain:

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang perlunya penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrem di Kabupaten Lima Puluh Kota, maksud dan tujuan yang ingin dicapai, ruang lingkup pembahasan, serta sistematika penulisan.

BAB II Kondisi Umum Wilayah

Bab ini menguraikan gambaran singkat karakteristik wilayah sebelum kejadian bencana, yang ditinjau dari kondisi geografi, demografi, sosial, ekonomi, dan infrastruktur.

BAB III Pengkajian Kebutuhan Pemulihan Pascabencana

Bab ini menguraikan kronologi kejadian bencana, upaya penanganan darurat, hasil kajian akibat bencana yang terdiri dari penilaian kerusakan dan kerugian, penilaian gangguan akses, gangguan fungsi, dan meningkatnya risiko. Hasil kajian kebutuhan pemulihan yang dianalisis dalam lima sektor, yaitu perumahan, infrastruktur, ekonomi, sosial, dan lintas sektor.

BAB IV Prinsip, Kebijakan dan Strategi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

Bab ini menguraikan prinsip dasar, kebijakan, ruang lingkup, serta strategi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

BAB V Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

Bab ini menguraikan proses perencanaan dan pendanaan, mekanisme pelaksanaan anggaran, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, kelembagaan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana,



pemantauan dan evaluasi, serta kesinambungan pemulihan berbasis pengurangan risiko bencana.

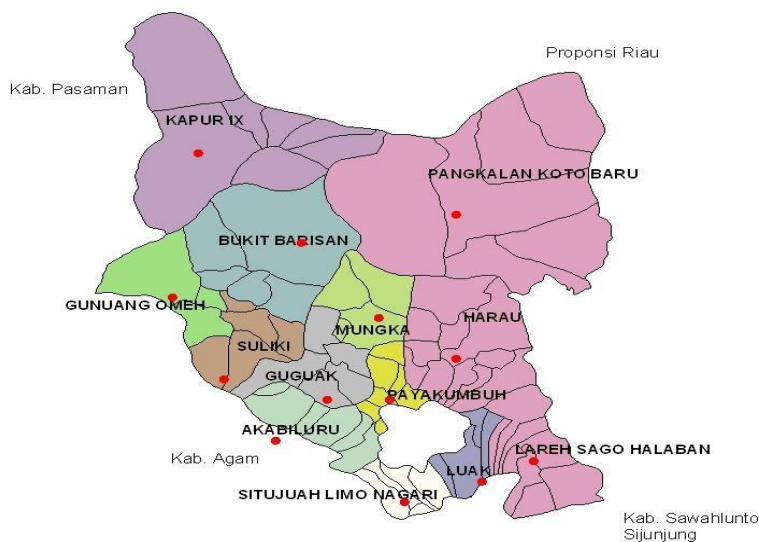
BAB VI Penutup

Bab ini menjelaskan bahwa Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi merupakan acuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang masih harus dijabarkan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya oleh setiap pihak pelaku rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrem di Kabupaten Lima Puluh Kota.

BAB II

KONDISI UMUM WILAYAH

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



Gambar 1
Peta Kondisi Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota

A. Kondisi Wilayah

Gambaran umum wilayah memaparkan kondisi daerah berdasarkan aspek geografi, geologi, topografi, iklim, hidrologi, penggunaan lahan dan demografi. Sejarah kejadian bencana merupakan bencana-bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota, sedangkan potensi bencana merupakan prediksi bencana-bencana yang kemungkinan terjadi. Dari ketiga aspek tersebut akan dibahas lebih mendalam pada pembahasan berikut.



Gambaran umum wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota berkaitan dengan kondisi geografi, geologi, topografi, iklim, hidrologi, penggunaan lahan dan demografi. Kondisi wilayah dapat memberikan sedikit gambaran mengenai potensi bencana dan besar dampak yang akan ditimbulkan di wilayah tersebut. Sebagai contoh, dari kondisi geografi bisa diketahui luas wilayah terpapar bahaya, dan dari kondisi demografi bisa diketahui potensi penduduk yang terpapar bahaya, dan dari kondisi topografi, iklim, geologi, hidrologi dan penggunaan lahan dapat diperkirakan potensi tinggi rendahnya kelas bahaya yang ada.

Bab ini menguraikan gambaran singkat karakteristik wilayah sebelum kejadian bencana, yang ditinjau dari kondisi geografis dan administrasi, topografi wilayah klimatologi, geologi, penduduk, jenis tanah dan infrastruktur.

1. Kondisi Geografis

Kabupaten Lima Puluh Kota terletak antara 0025'28,71"LU dan 0022'14,52" LS serta antara 100015'44,10"-100050'47,80" BT. Luas daratan mencapai 3.273,40 km². Kabupaten Lima Puluh Kota diapit oleh 4 Kabupaten dan 1 Provinsi yaitu: Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Pasaman serta Provinsi Riau. Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari 13 kecamatan, yang terluas adalah Kecamatan Kapur IX sebesar 834,61 km² dan yang terkecil adalah Kecamatan Luak yaitu 45,98 km².

Batas daerah :

- Utara: Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar, Provinsi Riau
- Selatan: Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Sijunjung
- Barat: Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman

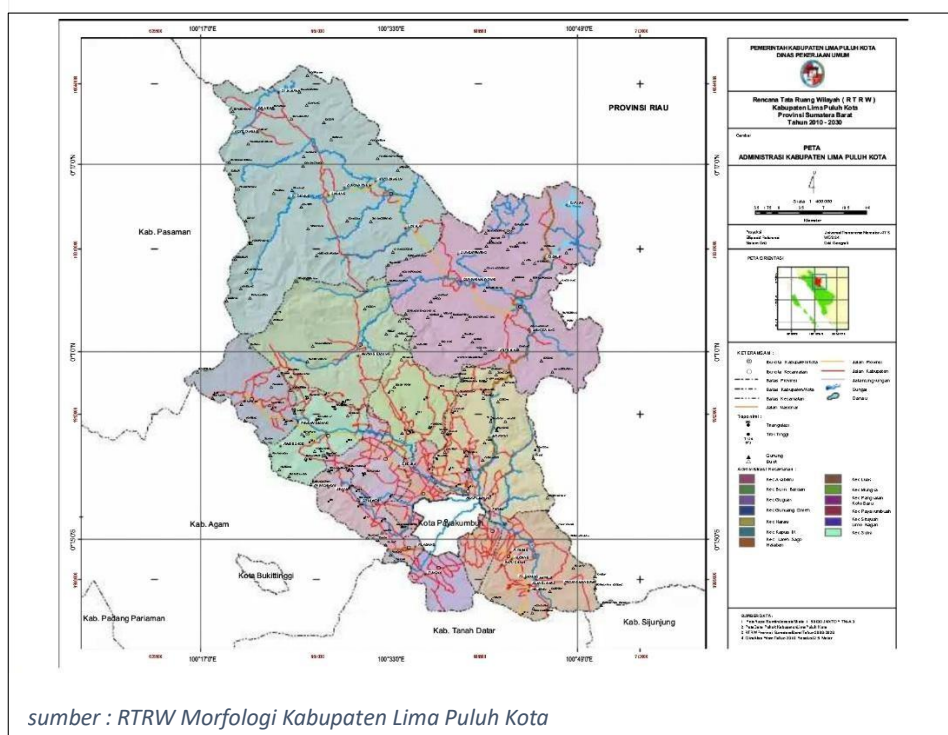


- Timur: Kabupaten Kampar, Provinsi Riau

Secara astronomis, Kabupaten Lima Puluh Kota terletak antara 0025'28,71" Lintang Utara dan 0022'14,52" Lintang Selatan dan antara 100015'44,10" sampai dengan 100050'47,80" Bujur Timur dan dilalui oleh garis ekuator atau garis khatulistiwa yang terletak pada garis lintang 0°.

Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari 13 Kecamatan, yaitu:

- Kecamatan Payakumbuh
- Kecamatan Akabiluru
- Kecamatan Luak
- Kecamatan Lareh Sago Halaban
- Kecamatan Situjuah Limo Nagari
- Kecamatan Harau
- Kecamatan Guguak
- Kecamatan Mungka
- Kecamatan Suliki
- Kecamatan Bukik Barusan
- Kecamatan Gunuang Omeh
- Kecamatan Kapur IX
- Kecamatan Pangkalan Koto Baru



Gambar 2
Peta Morfologi Kabupaten Lima Puluh Kota

Luasan wilayah mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023- 2043, luas daerah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah 327.340 H dengan rincian sebagai berikut :

Table 1.
Luas Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (km2)	Persentase terhadap Luas Kabupaten
Payakumbuh	Koto Baru Simalanggang	59,59	1,82
Akabiluru	Sariak Laweh	111,31	3,40
Luak	Pakan Sabtu	45,98	1,40
Lareh Sago Halaban	Pakan Raba'a	217,49	6,64



Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (km2)	Persentase terhadap Luas Kabupaten
Situjuah Limo Nagari	Situjuah Banda Dalam	75,58	2,31
Harau	Tanjung Pati	310,53	9,49
Guguak	Danguang-Danguang	95,27	2,91
Mungka	Padang Loweh	149,57	4,57
Suliki	Suliki	144,25	4,41
Bukik Barisan	Banja Loweh	336,08	10,27
Gunuang Omeh	Koto Tinggi	147,33	4,50
Kapur IX	Muaro Paiti	834,61	25,50
Pangkalan Koto Baru	Pangkalan	745,81	22,78
Kabupaten Lima Puluh Kota		3.273,40	100,00

Berdasarkan tabel di atas, Total jumlah Nagari yakni sebanyak 79 Nagari dimana kecamatan Kapur IX dengan 7 Nagari merupakan daerah terluas sebesar 83.231 Ha sedangkan Kecamatan Luak dengan 4 Nagari merupakan daerah dengan luas terkecil sebesar 5.269 Ha.

2. Gambaran Demografis

Kondisi demografi suatu wilayah umumnya dapat dilihat melalui beberapa indikator, seperti jumlah penduduk, tingkat pertumbuhan penduduk, struktur usia, persebaran penduduk, dan kondisi ketenagakerjaan. Berdasarkan Data Agregat Kependudukan Semester II Tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota tercatat 404.424 jiwa, Data mengenai jumlah penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut.

Table 2.
Klasifikasi Penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota
Berdasarkan Jumlah Penduduk

No	Kecamatan	Jumlah (Lk)	Jumlah (Pr)	Total Penduduk
1	Suliki	7.620	7.854	15.474
2	Guguak	18.458	18.964	37.422
3	Payakumbuh	19.682	19.675	39.357
4	Luak	14.810	15.282	30.092
5	Harau	29.485	29.083	58.568
6	Pangkalan Koto Baru	15.550	15.024	30.574
7	Kapur IX	14.877	14.590	29.467
8	Gunuang Omeh	7.357	7.370	14.727
9	Lareh Sago Halaban	20.512	20.615	41.127
10	Situjuah Limo Nagari	12.114	12.229	24.343
11	Mungka	14.147	14.354	28.501
12	Bukik Barisan	11.979	12.208	24.187
13	Akabiluru	15.262	15.323	30.585
TOTAL		201.853	202.571	404.424

Sumber: Data Agregat Kependudukan Semester II Tahun 2024 dari Disdukcapil Kab lima puluh Kota

Berdasarkan data diatas maka terlihat jumlah penduduk laki laki sebanyak 201.853 jiwa dan perempuan sebanyak 202.571 jiwa secara umum kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Harau.

3. Gambaran Topografi

Topografi adalah representasi grafis secara rinci dan akurat mengenai keadaan alam di suatu daratan yang memperlihatkan keadaan bentuk, penyebaran roman muka bumi dan dimensinya. Representasi grafis tersebut sekurang-kurangnya dapat berupa bentuk kemiringan lereng (kelerengan) dan ketinggian daratan.

Secara topografi, Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki jenis ketinggian yang bervariasi antara datar, bergelombang, dan berbukit-bukit dengan ketinggian dari permukaan laut antara 1.000 meter hingga 5.000 meter. wilayah



Kabupaten Lima Puluh Kota terletak pada kawasan pegunungan Bukit Barisan yang merupakan pegunungan patahan dengan dua jalur lembah (basin), masing-masing basin batang Sinamar yang bermuara ke sungai Batang Hari di Propinsi Jambi dan basin Batang Kampar yang bermuara ke Sungai Kampar di Propinsi Riau.

Dalam kawasan ini sering dijumpai alur-alur dan mata air, yang pada umumnya berada di lembah-lembah dekat sungai. Kawasan dengan kondisi seperti di atas, pada umumnya merupakan kawasan yang subur, sehingga banyak dimanfaatkan untuk kawasan budidaya terutama pertanian dan pemukiman. Di daerah ini terdapat 3 gunung berapi yang tidak aktif yaitu Gunung Sago 2.261 mdpl, Gunung Bungsu 1.253 mdpl, Gunung Sanggul 1.495 mdpl serta 17 sungai besar dan kecil yang mengalir dan telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pengairan/irigasi.

Table 3.
Jumlah Nagari Menurut Kecamatan dan Topografi Wilayah di
Kabupaten Lima Puluh Kota

Kecamatan	Lereng/puncak	Dataran
(1)	(2)	(3)
Suliki	6	-
Guguak	3	2
Payakumbuh	1	6
Luak	4	-
Harau	7	4
Pangkalan Koto Baru	6	-
Kapur IX	2	5
Gunuang Omeh	3	-
Lareh Sago Halaban	8	-
Situjuah Limo Nagari	5	-
Mungka	-	5

Kecamatan	Lereng/puncak	Dataran
(1)	(2)	(3)
Bukik Barisan	5	-
Akabiluru	7	-
Kabupaten Lima Puluh Kota	57	22

Sumber : Badan Pusat Statistik, Pendataan Potensi Desa (Podes)

4. Gambaran Klimatologi

Curah Hujan (mm) adalah ketinggian air hujan yang terkumpul dalam penakar hujan pada tempat yang datar, tidak menyerap, tidak meresap dan tidak mengalir. Unsur hujan 1 (satu) milimeter artinya dalam luasan satu meter persegi pada tempat yang datar tertampung air hujan setinggi satu milimeter atau tertampung air hujan sebanyak satu liter.

Data curah hujan bulanan Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan hasil pemantauan BMKG Stasiun Klimatologi Kelas II Padang Pariaman di Pangkalan dan Politani Tanjung Pati, dapat dilihat bahwa termasuk dalam kategori rendah sampai sangat tinggi. Puncak tertinggi curah hujan rata-rata bulanan terjadi pada bulan April (547 mm di Pangkalan dan 362 mm di Politani Tanjung Pati) dan terendah pada bulan Juli (187 mm di Pangkalan dan 79 mm di Politani Tanjung Pati) dan bulan Desember (65 mm di Politani Tanjung Pati).

Suhu udara rata-rata bulanan di Kamus besar bahasa Indonesia adalah rata-rata suhu yang diamati selama perbulan secara terus menerus. Suhu udara di Kabupaten Lima Puluh Kota terakhir dapat dilihat pada tahun 2018. Suhu udara berkisar antara 20,3 sampai 22,8⁰ C. Hal tersebut terjadi pada bulan Januari (22,8⁰ C) dan Bulan Februari (20,3⁰ C).

Curah hujan berpotensi memengaruhi kerentanan wilayah terhadap bencana hidrometeorologi, seperti banjir



dan tanah longsor. Kondisi iklim seperti hujan intensitas tinggi, suhu relatif rendah di dataran tinggi, dan kelembaban yang terus-menerus berperan besar dalam memicu tanah longsor, erosi, dan banjir bandang. Selain itu, fenomena perubahan iklim secara nasional telah menyebabkan peningkatan frekuensi iklim ekstrim, termasuk fluktuasi El Nino dan La Nina. El Nino menyebabkan musim kemarau lebih panjang dan kering, mendorong risiko kebakaran lahan, sementara La Nina memicu hujan ekstrim dan banjir.

Melihat kondisi diatas klimatologi Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki iklim tropis dengan suhu udara hangat hingga panas. Suhu ini cukup mendukung pertumbuhan tanaman tropis namun perlu pengaturan pola tanam yang tepat. Curah hujan tahunan yang tinggi dengan intensitas ekstrim dalam waktu singkat memperbesar risiko tanah longsor, banjir, dan banjir bandang, terutama di kawasan lereng terjal dan daerah aliran sungai. Kelembaban yang tinggi dan tanah yang cepat jenuh air memicu ketidakstabilan lereng, sementara hujan ekstrim akibat fenomena La Nina meningkatkan frekuensi bencana hidrometeorologi.

Di sisi lain, fenomena perubahan iklim yang memicu cuaca ekstrim seperti El Nino menyebabkan musim kemarau lebih panjang, meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, terutama di area perkebunan dan hutan kering. Aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan seperti pembukaan lahan dengan pembakaran dan pengelolaan vegetasi yang tidak berkelanjutan memperburuk dampak perubahan iklim, sehingga memperbesar potensi bencana.



5. Gambaran Hidrologi

Hidrologi berasal dari kata hydro (air) dan logia (ilmu), yang bermakna cabang ilmu Geografi yang mempelajari pergerakan, distribusi, dan kualitas air di seluruh Bumi, termasuk siklus hidrologi dan sumber daya air. Rencana sistem jaringan Sumber Daya Air (SDA) mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai. Satuan Wilayah Sungai yang berada di kabupaten Lima Puluh Kota adalah termasuk kedalam Wilayah Sungai (WS) Indragiri dan WS Kuantan dengan status pengelolaannya sebagai Wilayah Sungai Strategis Nasional.

Wilayah sungai lintas kabupaten yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota, terdiri atas Sungai Batang Lampasi, Sungai Batang Tabik, Sungai Batang Agam dan Sungai Batang Talawi. Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri atas 4 (empat) DAS yakni DAS Kampar, Indragiri, Rokan, dan Masang Kiri. Luas ke-empat DAS tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Table 4.
Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Nama DAS	Luas (Ha)
1	Kampar Kanan	194.604,7
2	Indragiri	127.282,97
3	Rokan	366,75
4	Masang Kiri	5.002,55

Sumber: RTRW Kabupaten Lima Puluh Kota 2023-2043

Dari 4 (empat) DAS tersebut dapat dijelaskan bahwa wilayah sungai yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Mahat yang



bermuara ke DAS Kampar dan Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Sinamar yang bermuara ke DAS Indragiri. Sub DAS Mahat dan Sub DAS Sinamar terdiri atas: a.) Sub DAS Mahat antara lain Batang Mahat, Batang Kampar, Batang Kapur, Batang Paiti, Batang Mongan, Batang Mangilang, Batang Rompayan, Batang Samo dan Batang Nenan; b.) Sub DAS Sinamar antara lain Batang Sinamar, Batang Agam, Batang Lampasi, Batang Pinago, Batang Mungo, Batang Coran, Batang Liki, Batang Sanipan dan Batang Namang.

Terkait dengan sungai, wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki 17 sungai dengan lokasi dan panjang yang berbeda. Nama sungai, lokasi dan Panjang sungai tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Table 5.
Nama Aliran Sungai Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Nama Sungai	Kecamatan	Panjang Sungai (Km)
1.	Batang Sinamar	Gunuang Omeh, Suliki, Guguak, Mungka, Payakumbuh, Harau, Luak, Lareh Sago Halaban	96,13
2.	Batang liki	Suliki, Gunuang Omeh	6,37
3.	Batang Mahat	Bukik Barisan	76,22
4.	batang Lampasi	Akabiliru, Payakumbuh	50,37
5.	Batang Agam	Akabiliru, Situjuah Limo Nagari, Harau	28,58
6.	Batang Kapur	Kapur XI	25,23
7.	Batang Mongan	Kapur XI	72
8.	Batang Pati	Kapur XI	21,56
9.	Batang Mangilang Malagiri	Pangkalan Koto Baru	10,23
10.	Batang Namang	Guguak, Payakumbuh	8,52
11.	Batang Mungo	Harau	18,41
12.	Batang Sanipan	Harau	19,41

No	Nama Sungai	Kecamatan	Panjang Sungai (Km)
13.	Batang Nenan	Bukik Barisan	5
14.	Batang Kampar	Kapur IX	18,8
15.	Batang Harau	Harau	16,3
16.	Batang Samo	Pangkalan Koto Baru	63,4
17.	Batang Buluh Kasok	Harau	15,58

Sumber: RTRW Kabupaten Lima Puluh Kota 2023-2043

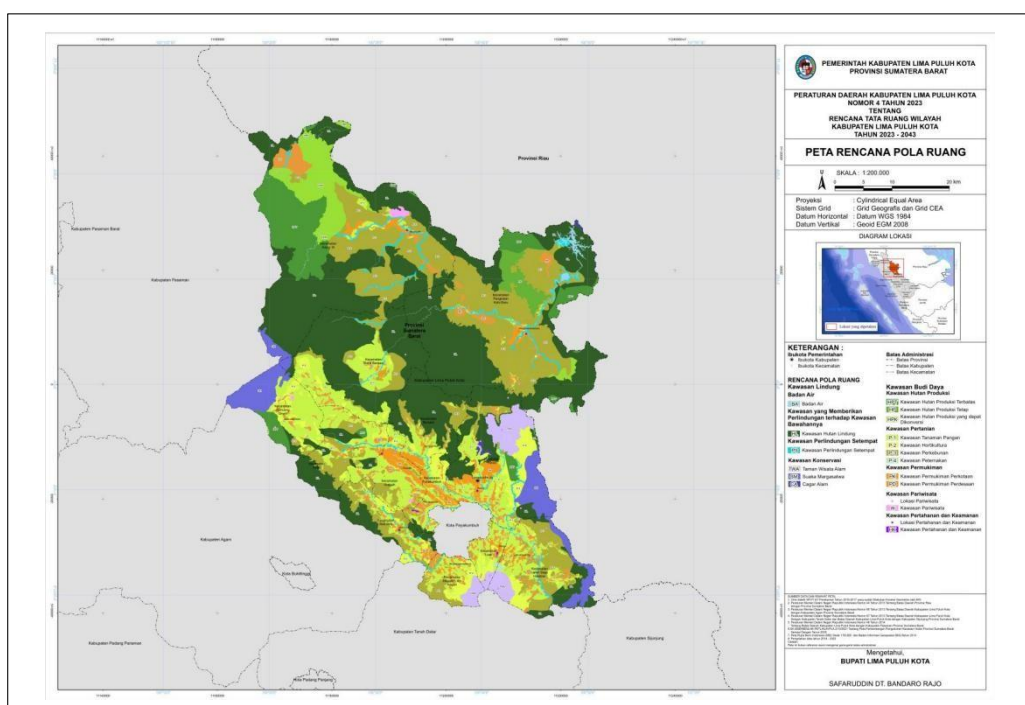
Berdasarkan tabel diatas, keberadaan sungai yang menyebar di beberapa kecamatan tentunya berpeluang besar menjadi permasalahan bencana sepeerti banjir dan banjir bandang. Curah hujan tinggi dan lama tentu menyebabkan luapan air sungai dan di beberapa titik terjadi penumpukan atau pertemuan sungai bahkan ada yang tersumbat menyebabkan volume air meluap ke daerah tepi sungai.

6. Gambaran Geologi

Ditinjau dari segi geomorfologi regional daerah Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada rangkaian perbukitan yang dikenal dengan “Bukit Barisan” dan merupakan bagian dari “*Volcanic Arc*” tatanan atau kerangka tektonik lempeng daerah Sumatera. Struktur Geologi regional sangat dipengaruhi oleh tatanan geologi Sumatera. Dari struktur geologi, daerah ini termasuk kedalam daerah cekungan Payakumbuh, yang memiliki struktur sesar atau patahan berupa struktur *Faulating system* (sistem sesar bongkah). Sesar yang berkembang di daerah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sesar normal Kelok Sembilan – Solok Bio Bio, selain itu juga terdapat Sesar Normal lainnya yaitu Sesar Normal Batubalang, Sesar Normal Bukik Bulek Banjar Laweh, Sesar Normal Koto Alam, Sesar Normal Bukik Bapanansan, Sesar Geser Taratak, dan Sesar Geser Suliki.

Struktur perlipatan terdapat di sekitar daerah Gunung Malintang, berupa struktur Sinklin ke arah tenggara.

Struktur geologi lainnya adalah kekar (*joint*) yaitu berupa Kekar Silang (*Shear Joint*) dan kekar Tarik (*Tension Joint*). Kabupaten Lima Puluh Kota yang berada pada busur magmatik Sunda-Banda berumur Miosen- Plistosen, yang dikenal paling panjang, membujur dari utara pulau Sumatera, terus ke pulau Jawa sampai ke sebelah timur Nusa Tenggara. Gambaran geologi Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada peta dibawah ini :



Gambar 3
Peta Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota

Akibat pengaruh pembatas alamiah terutama topografi dan morfologi daerah yang berada di jalur perbukitan Bukik Barisan yang memberikan pengaruh terhadap kemiringan lahan yang cukup tinggi, kondisi hidrologi dengan curah hujan dengan intensitas tinggi serta kualitas fisika kimia tanah, maka daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sangat rentan terhadap gerakan tanah, Struktur geologi yang berupa patahan juga berakibat rentannya wilayah ini dari bahaya



gerakan tanah. Berdasarkan publikasi ilmiah “The Sumatra fault system, Indonesia” Januari 2001 oleh Danny Hilman Natawidjaja dan Kerry Sieh dari *California Technology University* menunjukkan Kabupaten Lima Puluh Kota dilewati sesar aktif. Analisis geomorfologi citra *Landsat* yang di *overlay* peta sesar aktif dari *Caltech* menunjukkan sesar aktif tersebut memotong di 4 kecamatan, yaitu Situjuah Limo Nagari, Suliki, Gunung Omeh, Harau, dan Bukit Barisan, Penentuan detail lapangan lokasi sesar aktif antara lain : 1) Jika daerah tersebut telah mengalami gempa maka lokasi-lokasi yang menunjukkan sesar aktif tersebut merupakan tempat dimana sesar aktif itu berada, 2) Jika daerah tersebut belum mengalami gempa maka catatan lokasi retakan akibat gempa dulu dan pelaksanaan pekerjaan galian parit penelitian geologi perlu dilakukan.

Jika dilihat dari litologi daerah Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat 7 formasi batuan terdiri dari :

- a. Formasi Kuantan (Puku) berumur permo karbon merupakan batuan tertua, batuan pada formasi ini tersusun oleh fillit, serpih, sekis muskovit, dan batugamping tipis.
- b. Formasi Bohorok (Pub), berumur Permo-Karbon tersusun oleh wake, wake konglomerat dan turbidit.
- c. Formasi Ombilin berumur Miosen Awal (Tmol) tersusun oleh batupasir kuarsa mengandung mika, pejal dan setempat mengalami malihan (kuarsit). Sisipan arkose, serpih abu biru, konglomerat, kuarsa dan lapisan batubara.
- d. Formasi Pematang berumur Oligo Miosen (Tlpe) tersusun oleh batu lumpur merah, breksiokonglomerat dan batu pasir konglomeratik.

- e. Formasi Brani berumur Oligosen (Tob), tersusun oleh konglomerat kasar beraneka ragam dengan beberapa sisipan batu pasir.
- f. Formasi Sihapas (Tms), terdiri dari batupasir konglomeratik, batu lanau, batu pasir kuarsa bersih, serpih berkarbon, lignit batu lanau, konglomerat, lapisan batubara.

Formasi Telisa (Tmt), terdiri dari batu lumpur gampingan abu-abu, lapisan tipis batu gamping, batu lanau dan sedikit batu pasir glaukonitik, Endapan Aluvium (Qh), terdiri dari pasir dan kerikil; lanau pasiran dan sedikit partikel kasar. Endapan Aluvium Muda (Qh), terdiri dari kerikil, pasir, lempung.

7. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Lima Puluh Kota secara umum meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan peruntukan lindung kabupaten adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah kabupaten, yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di kabupaten. Kawasan budidaya kabupaten adalah kawasan di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.

Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah. Berdasarkan rencana pola ruang wilayah kabupaten, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa



kawasan hutan lindung tersebar di Kecamatan Akalbiru, Kecamatan Bukik Barisan, Kecamatan Guguak, Kecamatan Gunuang Omeh, Kecamatan Harau, Kecamatan Kapur IX, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kecamatan Mungka, Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Payakumbuh, dan Kecamatan Suluki.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang (RTRW) Kabupaten Lima Puluh Kota, perwujudan kawasan permukiman meliputi pengembangan kawasan permukiman perdesaan, pengembangan kawasan permukiman perkotaan, penataan dan rehabilitasi lingkungan kawasan permukiman kumuh dan peningkatan penyehatan lingkungan permukiman.

Kawasan pertanian berdasarkan Rencana Tata Ruang meliputi kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan dan kawasan peternakan. Kawasan tanaman pangan, Kawasan hortikultura, Kawasan perkebunan dan Kawasan peternakan menyebar di 13 kecamatan.

Terkait dengan tanaman pangan yang terdiri dari tanaman pangan lahan basah dan tanaman pangan lahan kering dan tanaman Hortikultura. Komoditi yang termasuk tanaman pangan adalah padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar. Tanaman hortikultura meliputi tanaman sayuran, buah-buahan dan tanaman hias. Fokus tanaman pangan untuk lahan basah adalah pada komoditi padi.

Kawasan perkebunan di Kabupaten Lima Puluh Kota tersebar di seluruh Kecamatan. Komoditas perkebunan terdiri dari tanaman gambir, kakao, kopi, karet, kelapa, kelapa sawit, tembakau dan lain-lain. Komoditas perkebunan unggulan di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah gambir.

Kawasan peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota



terdiri dari peternakan hewan besar, peternakan hewan kecil dan unggas. Perkembangan peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota cukup baik sebagai salah satu sumber perekonomian masyarakat, baik untuk peternakan jenis unggas maupun ternak besar. Hal ini ditandai dengan sudah adanya beberapa kecamatan yang merupakan daerah atau sentra peternakan, seperti Kecamatan Mungka sebagai sentra perternakan ayam. Hal ini juga didukung dengan adanya Balai Pembibitan Ternak Unggul Hijauan Pakan Ternak (BPTUHPT) Padang Mangatas yang merupakan salah satu unit pelaksana teknis Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian. BPTUHPT Padang Mengatas memiliki luas areal mencapai 280Ha dengan populasi mencapai 1300 ekor, yang terdiri dari wilayah padang pengembalaan, kebun rumput dan lokasi perkandangan serta perkantoran.

Kawasan perikanan dibagi dalam dua kelompok utama yaitu kawasan perikanan tangkap dan kawasan perikanan budidaya. Kawasan perikanan tangkap yakni kawasan perikanan di kawasan umum seperti sungan di Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat di seluruh kecamatan, namun yang terluas terdapat di Kecamatan Pangkalan Koto Baru dan yang terkecil berada di Kecamatan Situjuah Limo Nagari. Kawasan perikanan budidaya terdiri atas kolam air tenang, kolam air deras dan keramba jaring apung. Produk unggulan dari perikanan adalah ikan gurami sago, kerana ikan ini sudah dipasarkan hingga keluar negeri.

Kawasan industri pertambangan dan energi berdasarkan rencana tata ruang wilayah, bahwa perwujudan kawasan pertambangan dan energi meliputi penetapan lokasi kawasan pertambangan, peningkatan dan pengembangan system pengawasan dan pengendalian geologi dan



pertambangan, penetapan aturan zonasi penambangan rakyat yang diijinkan agar tidak menimbulkan dampak lingkungan, rehabilitasi lahan pasca tambang, pengembangan usaha pertambangan yang lestari, dan pelarangan dan penghentian kegiatan penambangan yang merusak lingkungan. Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan pertambangan dan energi meliputi kegiatan pertambangan, pengolahan dan energi tersebar disetiap kecamatan yang memiliki potensi, kegiatan yang diarahkan/diizinkan yaitu kegiatan yang bersifat mendukung kegiatan pertambangan, dan kegiatan yang dibatasi/bersyarat meliputi kawasan permukiman untuk menunjang kegiatan pertambangan dengan tetap memperhatikan aspek-aspek keselamatan serta kegiatan usaha pertambangan dengan syarat yang telah sepenuhnya mengikuti ketentuan yang berlaku di bidang pertambangan.

Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan salah satu Wilayah Pencadangan Negara (WPN). WPN adalah bagian dari Wilayah Pertambangan (WP) yng dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional. WPN di Kabupaten Lima Puluh Kota tersebar di Kecamatan Harau, Lareh Sago Halaban, Luak, Situjuah Limo Nagari, Gunuang Omeh, Bukik Barisan, Kapur IX dan Pangkalan Koto Baru. Kawasan peruntukan lainnya, yaitu kawasan pertahanan keamanan negara dan kawasan keamanan dan ketertiban masyarakat. Berdasarkan rencana tata ruang wilayah, kawasan pertahanan keamanan negara di Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari Kodim 0306/ Lima Puluh Kota, Kompi Senapan C. Yonif 131/ Braja Sakti, Den Zipur 2/Prada Sakti dan Koramil yang berada di Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Suliki, Lareh Sago Halaban, Harau, Guguak, Kapur IX dan Akabiluru, selanjutnya komando Rayon Militer (Koramil) beradar

diseluruh kecamatan dan kepolisian Sektor (Polsek) yang berada di seluruh kecamatan.

Penggunaan lahan di Kabupaten Lima Puluh Kota terbagi ke dalam beberapa fungsi utama yang mencerminkan karakter wilayah dan pemanfaatannya. Kawasan hutan berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, melindungi daerah tangkapan air, dan mencegah erosi di wilayah perbukitan. Lahan pertanian meliputi sawah irigasi di dataran rendah sebagai pusat produksi pangan, serta tegalan dan perkebunan di lereng yang menghasilkan komoditas seperti teh, kopi, dan hortikultura. Selain itu, kawasan permukiman dan fasilitas umum berkembang di sekitar pusat kecamatan dan jalur transportasi utama, mendukung aktivitas sosial-ekonomi masyarakat. Ada pula area semak belukar, padang rumput, dan tanah terbuka.

8. Kondisi Sosial dan Ekonomi

a. Kondisi sosial

Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota kental dengan nilai-nilai adat Minangkabau yang berlandaskan *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*.

- Demografi & budaya

Mayoritas penduduk adalah suku Minangkabau. Hubungan kekerabatan matrilineal masih sangat kuat, di mana kaum perempuan memiliki peran penting dalam pewarisan harta pusaka.

- Pendidikan

Fasilitas pendidikan sudah tersebar cukup merata hingga ke tingkat kecamatan. Kesadaran akan pendidikan tinggi meningkat, didukung oleh kedekatan akses ke pusat pendidikan di Kota Payakumbuh dan Bukittinggi.

- Kesehatan

Layanan kesehatan terus berkembang dengan adanya RSUD dan jaringan Puskesmas yang aktif, meskipun tantangan geografis di daerah pelosok (seperti daerah Galugua) masih menjadi perhatian dalam pemerataan akses.

- Kehidupan beragama

Tingkat religiusitas sangat tinggi. Masjid dan surau bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga pusat kegiatan sosial dan pembinaan karakter generasi muda.

b. Kondisi ekonomi

Ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota didominasi oleh sektor primer, terutama pertanian dan peternakan, serta sektor pariwisata di beberapa Kabupaten.

Table 6
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Lima Puluh Kota

Lapangan Usaha Triwulan	Laju Pertumbuhan (q-to-q) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Triwulanan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Lima Puluh Kota (persen)				
	2025				
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Tahunan
Sektor Primer	-0,89	-0,97	-0,41	-	-
Sektor Sekunder	-2,42	0,91	6,82	-	-
Sektor Tersier	1,49	2,76	-1,51	-	-
Produk Domestik Regional Bruto	0,08	1,08	-0,10	-	-

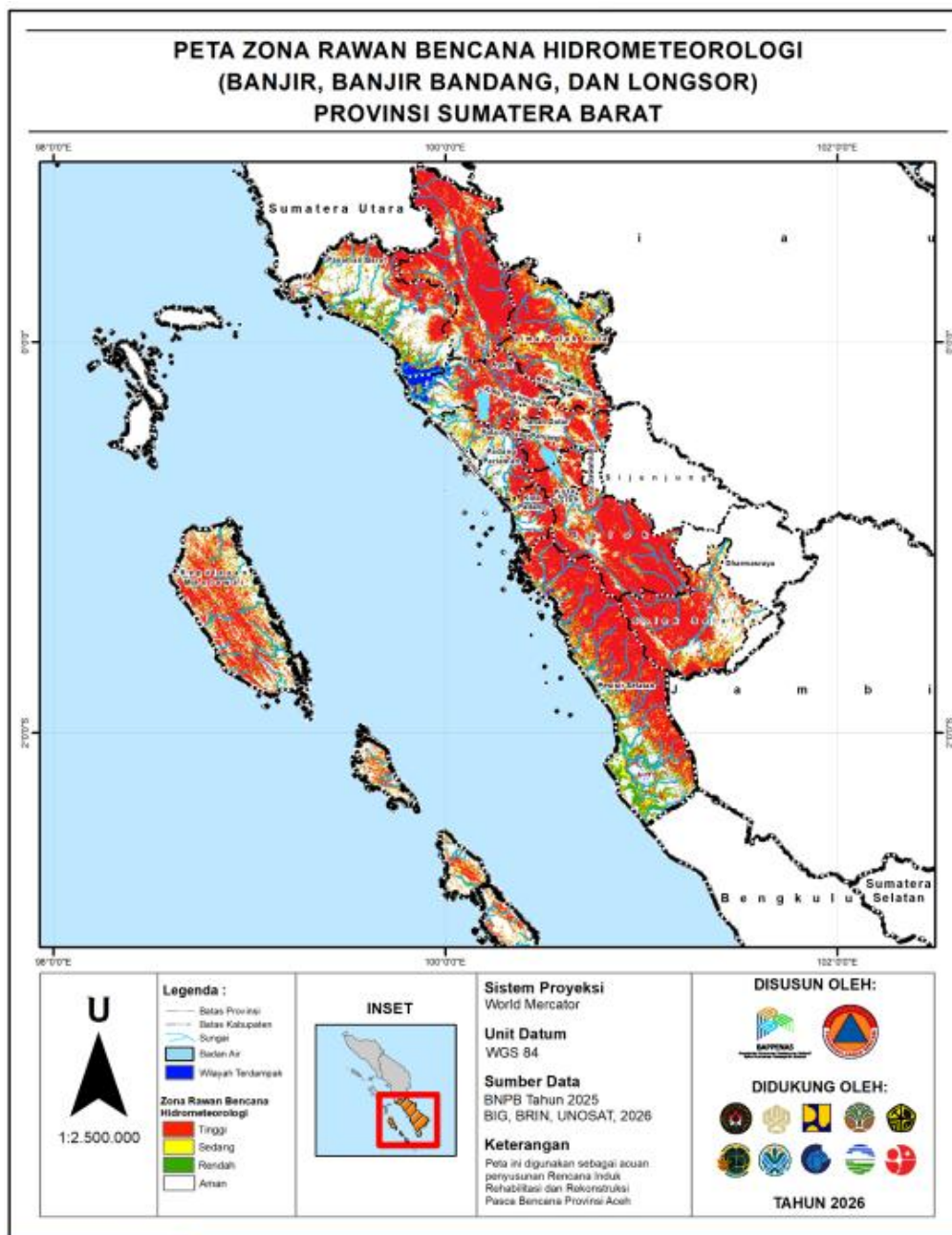
Keterangan Data :

2022 Angka Sementara, 2023 Angka Sangat Sementara, 2024 Angka sangat sementara

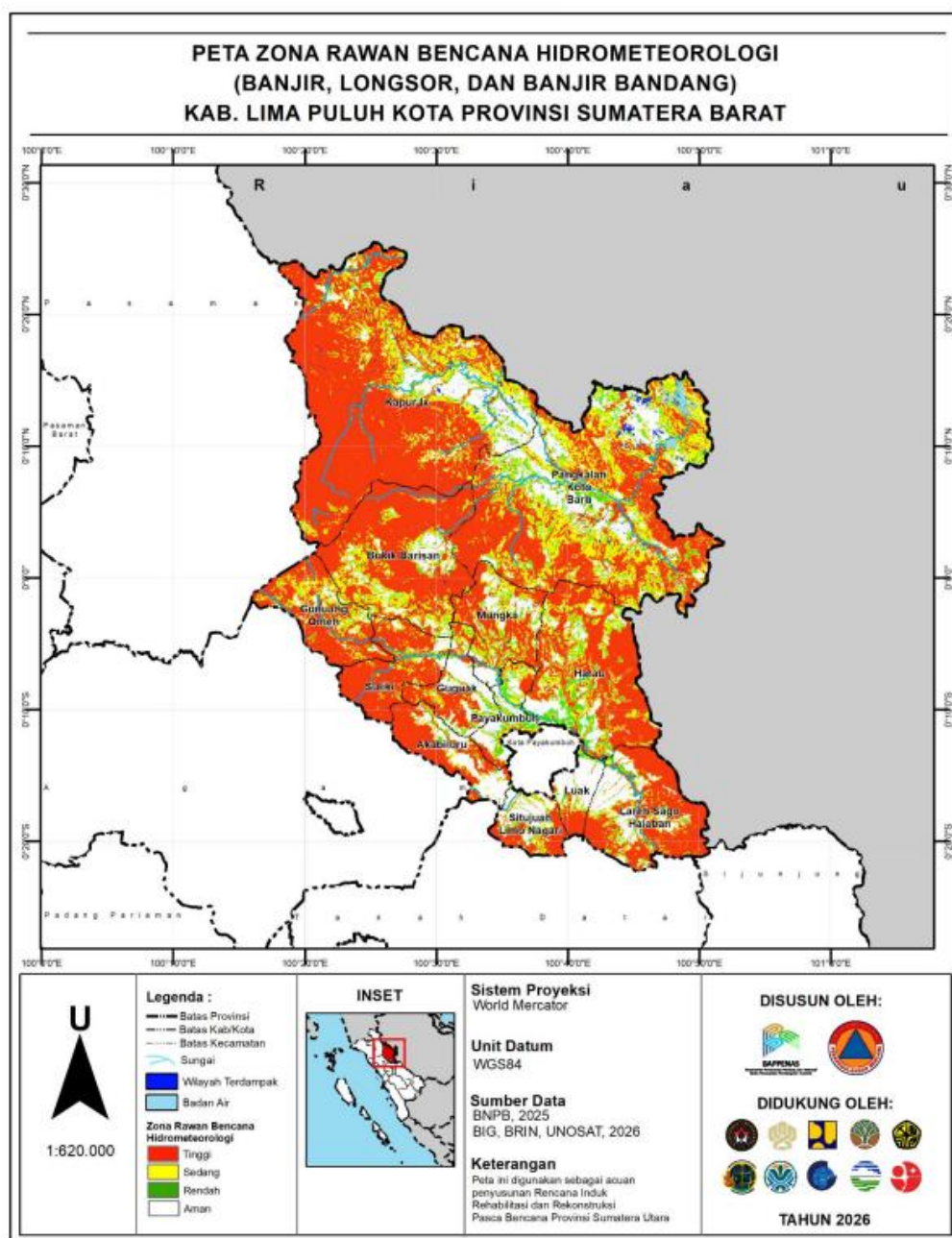
B. Zona Rawan Bencana (ZRB)

Arahan penetapan ZRB di susun berdasarkan pemahaman bahwa tingkat risiko bencana yang berbeda antar wilayah memerlukan pendekatan penataan ruang yang berbeda pula. ZRB digunakan sebagai dasar spasial untuk mengidentifikasi variasi tingkat paparan, kerentanan, dan potensi dampak bencana, sehingga memungkinkan penerapan pengaturan pemanfaatan ruang yang disesuaikan dengan

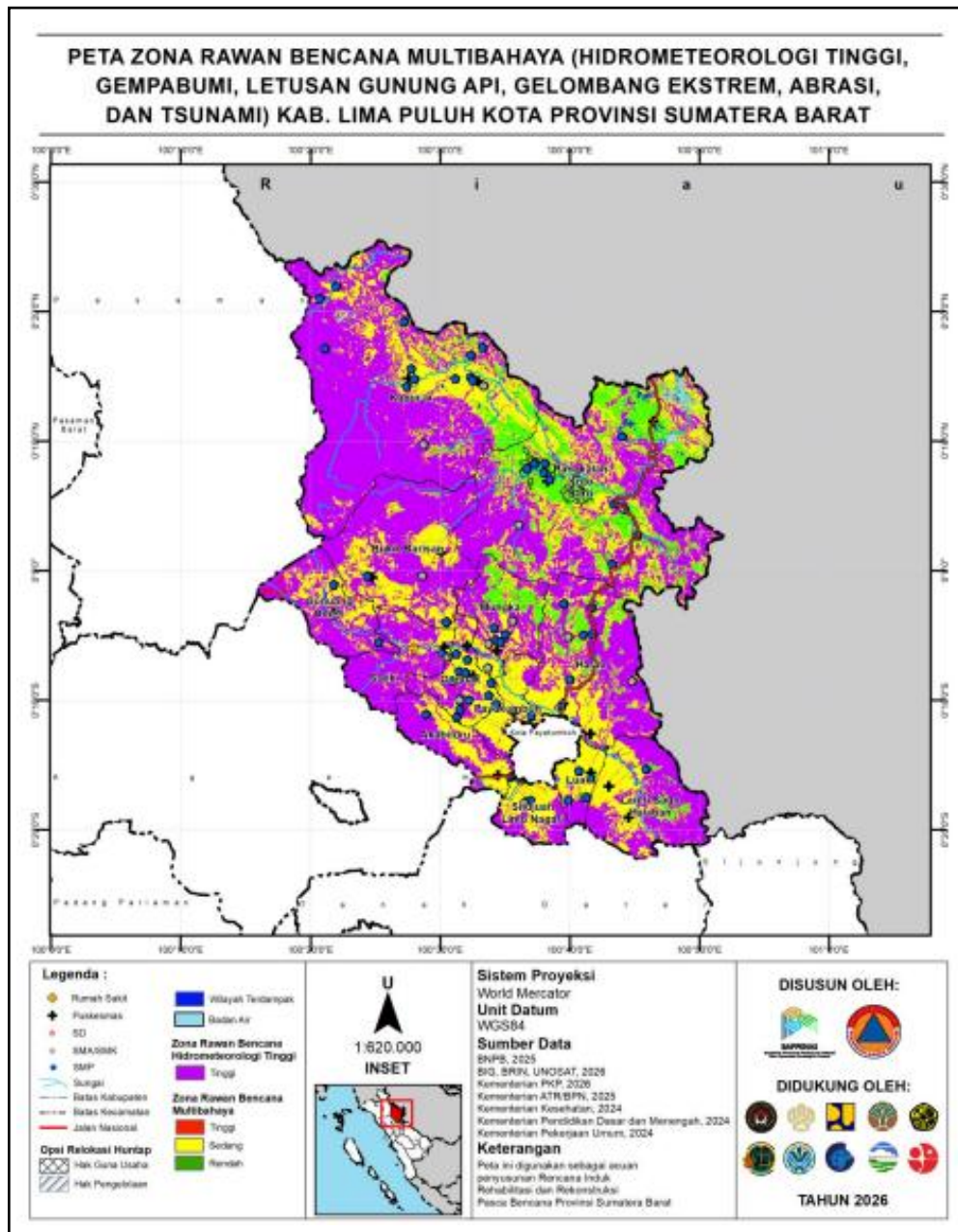
karakteristik risiko masing-masing wilayah. Kerangka keterkaitan antara ZRB dan tahapan perencanaan tata ruang ditunjukkan pada gambar di bawah ini.



Gambar 4
Peta Zona Rawan Bencana Hidrometeorologi Provinsi Sumatera Barat



Gambar 5
Peta Zona Rawan Bencana Hidrometeorologi Kabupaten Lima Puluh Kota
Provinsi Sumatera Barat



Gambar 6
Peta Zona Rawan Multibahaya Hidrometeorologi Kabupaten Lima Puluh Kota
Provinsi Sumatera Barat

C. Kejadian Bencana

Pada hari Jumat tanggal 21 hingga Selasa 25 November 2025 terjadi bencana hidrometeorologi berupa banjir, angin kencang dan cuaca ekstrem yang tersebar di 44 Nagari pada 13 Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Bencana ini mengakibatkan banjir, jalan terban, rumah tertimpa pohon, putusnya aliran listrik, terputusnya akses jalan ke sumber mata perncaharian, terputusnya jaringan sumber air Pamsimas, dan tanah longsor di berbagai Nagari. Hidrometeorologi yang terjadi juga menjadi penyebab ditetapkan 2 titik zona merah kawasan tanah bergerak yang berlokasi di Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Omeh dan Nagari Baruah Gunung, Kecamatan Bukik Barisan.

Mitigasi dilakukan segera setelah intensitas hujan tinggi sehingga tidak ada korban meninggal dalam bencana hidrometeorologi Kabupaten Lima Puluh Kota, namun sebab dari bencana ini mengakibatkan banyak warga yang harus mengungsi dan tidak dapat menempati huniannya Kembali.

D. Upaya Pemulihan Awal

Dalam Surat Keputusannya Gubernur Sumatera Barat menetapkan masa tanggap darurat bencana alam banjir, banjir bandang, tanah longsor dan angin kencang di wilayah provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dengan Nomor 360-761-2025 yang kemudian diperkuat dengan Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota yang menetapkan bencana alam banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrem di Kabupaten Lima Puluh Kota selama 28 hari terhitung sejak tanggal 25 November hingga 22 Desember 2025 dengan Nomor 300.2.3/265/BUP-LK/XI/2025. Menanggapi bencana tersebut BPBD bersama TNI/POLRI, BASARNAS, PMI serta para relawan terus melakukan

penanganan darurat dan *suplay* logistik pada berbagai titik lokasi terdampak bencana.

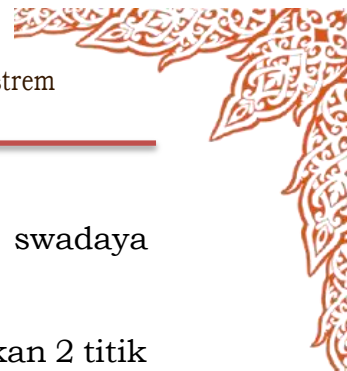
Serangkaian kegiatan penanganan darurat telah dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan seluruh pihak. Tindakan utama yang dilakukan berupa evakuasi dan penyelamatan nyawa yang dimaksud untuk membantu masyarakat terdampak agar tidak lebih menderita dengan bencana yang terjadi berkala dalam kurun waktu yang panjang. Evakuasi terhadap korban dilakukan dengan membuat tenda-tenda darurat di tempat yang dirasa aman serta ditampung pada lokasi pengungsian yang dibantu oleh masyarakat.

Pembersihan material pada jalan terban adalah hal utama yang dilakukan dalam masa awal tanggap darurat, hal ini dilakukan segera karena pada beberapa titik jalan longsor dan terban merupakan jalan utama menuju akses Nagari yang terdampak bencana. Pembersihan material pada jalan terban dan longsor bertujuan agar pendistribusian logistik dan bantuan dapat terus berjalan lancar.

Pos dapur umum di 2 Kecamatan dengan dampak paling luas telah didirikan pada minggu awal masa tanggap darurat. Ribuan porsi disiapkan oleh Dinas Sosial bersama BPBD dan TNI dalam upaya memastikan kesediaan pangan selama masyarakat berada dalam situasi bencana.



Penyediaan logistik berupa *hygen kit*, matrass, selimut, dan peralatan serta kebutuhan pribadi individu telah didistribusikan sejak masa awal bencana terjadi oleh BPBD serta



OPD terkait yang berasal dari bantuan pusat, swadaya masyarakat dan donasi dari berbagai pihak.

Dalam masa awal tanggap darurat, telah ditetapkan 2 titik lokasi zona merah rawan bencana yang disebabkan tanah bergerak. Terdapat 397 KK terdampak di Nagari Koto Tinggi Kecamatan Gunuang Omeh, 212 KK terdampak di Nagari Baruah Gunuang Kecamatan Bukik Barisan, 1 KK terdampak di Nagari Suliki Kecamatan Suliki, dan 1 KK terdampak di Nagari VII Koto Talago Kecamatan Guguak. Menangani hal ini, Pemerintah bersama BPBD beserta pihak Nagari dan niniak mamak menetapkan satu kawasan yang difungsikan sebagai lokasi pembangunan hunian sementara, satu kawasan yang difungsikan sebagai lokasi pembangunan hunian tetap terpusat, dan mempersiapkan lebih dari 100 titik lahan untuk mendirikan hunian tetap relokasi mandiri.

Sesuai dengan siklus penanggulangan bencana, maka setelah berakhirnya masa penanganan darurat harus segera dilaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana, sehingga pertolongan terhadap masyarakat yang terdampak bencana dapat dilakukan secara berkesinambungan.



BAB III

PENGKAJIAN KEBUTUHAN PEMULIHAN PASCABENCANA

Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana membutuhkan pengkajian yang memadai atas bukti-bukti berupa kerusakan dan kerugian aset-aset penghidupan, deprivation hak-hak dasar, ketergangguan proses kemasyarakatan dan kenegaraan serta meningkatnya risiko karena menurunnya kapasitas dan meningkatnya kerentanan pascabencana. Penggalan bukti-bukti diatas dilakukan melalui Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) yang merupakan metode yang digunakan untuk pendekatan kajian akibat bencana, dampak bencana dan kebutuhan pemulihan pascabencana. Jitupasna dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana membantu pemerintah dan para pemangku kepentingan menyusun kebijakan, program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berlandaskan pada informasi akurat dari para pihak yang terdampak bencana. Dengan demikian Jitupasna merupakan basis bagi penyusunan dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Pendekatan Jitupasna yang partisipatif dan berbasis pada data akan mampu mendukung penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang baik.

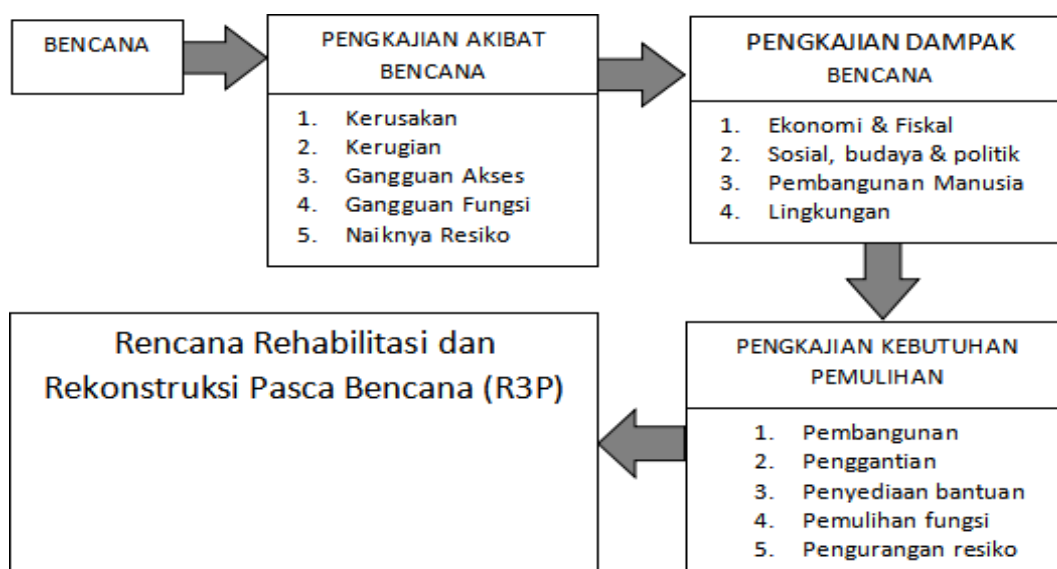
Jitupasna menggunakan kerangka pandang yang menyeluruh terhadap kebutuhan manusia dan masyarakat untuk pulih dari bencana. Jitupasna mengakui keseluruhan aspek kehidupan manusia dan masyarakat, baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Tujuannya agar upaya-upaya pemulihan pascabencana berorientasi pada pemulihan harkat dan martabat manusia secara utuh, yang tertuang pada komponen dan lingkup Jitupasna. Kajian Jitupasna akan memandu para pihak dengan menyajikan tiga komponen informasi penting untuk pemulihan

pascabencana, yaitu :

- Pengkajian akibat bencana;
- Pengkajian dampak bencana; dan
- Pengkajian kebutuhan pascabencana

Komponen-komponen dalam Jitupasna diatas memiliki kesaling- terhubungan dalam rangka memandu proses penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi maupun untuk melakukan upaya pemulihan pascabencana. Hubungan antara komponen pengkajian akibat bencana, pengkajian dampak bencana dan pengkajian kebutuhan pascabencana nampak pada diagram di bawah ini :

Table 7.
*Kerangka Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan
Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi*



Perkiraan kebutuhan pemulihan dalam Jitupasna berorientasi pada pemetaan kebutuhan untuk pemulihan awal, rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai berikut :

- Kebutuhan pemulihan awal adalah kebutuhan-kebutuhan kemanusiaan pascabencana yang berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan;
- Kebutuhan rehabilitasi adalah kebutuhan perbaikan dan



pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana;

- Sedangkan kebutuhan rekonstruksi adalah kebutuhan pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat.

Dengan demikian, komponen pembangunan, penggantian, penyediaan akses, pemulihan proses dan pengurangan resiko harus dipilah-pilah dalam kerangka pemulihan awal rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Berikut ini adalah tabel komponen perkiraan kebutuhan dalam Jitupasna

Table 8.
Komponen Perkiraan Kebutuhan

Komponen	Keterangan
Pembangunan	Kebutuhan pembangunan bertujuan untuk memulihkan kerusakan infrastruktur pemerintah, masyarakat, keluarga dan badan usaha setelah terjadi bencana. Pembangunan kembali ini harus mengutamakan prinsip pembangunan kembali yang lebih tahan bencana sehingga pengkajian resiko bencana wajib menjadi pertimbangan dalam perkiraan kebutuhan pascabencana
Stimulasi	Kebutuhan stimulasi bertujuan untuk mengganti kerugian ekonomi sebagai akibat dari bencana. Penggantian juga harus berorientasi pada perbaikan besaran-besaran ekonomi dalam jangka panjang sehingga harus efektif, efisien dan berkelanjutan.

Komponen	Keterangan
Penyediaan Akses	Kebutuhan penyediaan akses bertujuan untuk memulihkan akses masyarakat terhadap hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, pangan, jaminan sosial, perumahan, budaya, pekerjaan, kependudukan dan lain-lain. Penyediaan ini harus dilakukan dalam rangka pemulihan sistem pelayanan kebutuhan dasar yang ada.
Pemulihan Proses	Kebutuhan pemulihan proses merupakan pemulihan awal yang bertujuan untuk menjalankan kembali proses pemerintahan dan kemasyarakatan. Misalnya, pemulihan proses kemasyarakatan seperti pemulihan organisasi RT dan RW, kelompok posyandu, kelompok tani dan organisasi berbasis masyarakat lainnya.
Pengurangan Resiko	Kebutuhan pengurangan resiko meliputi kebutuhan mencegah dan melemahkan ancaman, kebutuhan mengurangi kerentanan terhadap bencana dan kebutuhan meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana di masa datang. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan pemulihan awal dan kebutuhan pemulihan jangka panjang untuk merespon peningkatan resiko akibat bencana.

Lingkup pengkajian kebutuhan pascabencana mengacu pada Peraturan Kepala BNPB Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana. Pedoman ini mengarahkan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi ke dalam 5 (lima) sektor yakni sektor perumahan, sektor infrastruktur, sektor ekonomi, sektor sosial dan lintas sektor.

Table 9.
Substansi Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Aspek	Keterangan
Perumahan	Aspek perumahan, terdiri dari perbaikan lingkungan daerah bencana, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat dan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat
Infrastruktur Pembangunan	Aspek infrastruktur pembangunan, antara lain terdiri dari perbaikan prasarana dan sarana umum, pemulihan fungsi pemerintah, pemulihan fungsi pelayanan publik, pembangunan kembali sarana dan prasarana, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, peningkatan fungsi pelayanan publik dan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat
Ekonomi	Aspek ekonomi, antara lain terdiri dari pemulihan sosial ekonomi dan budaya, peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya, mendorong peningkatan ekonomi lokal seperti pertanian, perdagangan, industri, pariwisata dan perbankan
Sosial	Aspek sosial antara lain terdiri dari pemulihan konstruksi sosial dan budaya, pemulihan kearifan dan tradisi masyarakat, pemulihan hubungan antar budaya dan keagamaan dan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat.
Lintas Sektor	Aspek lintas sektor antara lain terdiri dari pemulihan aktivitas/kegiatan yang meliputi tata pemerintahan dan lingkungan hidup

A. Kerusakan dan Kerugian

1. Sektor perumahan

Kerusakan pada sektor perumahan sub sektor rumah akibat bencana alam banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrem di Kabupaten Lima Puluh Kota, mencapai 453 unit rumah yang tersebar pada 4 wilayah Kecamatan. Wilayah dengan populasi rumah mengalami kerusakan paling banyak adalah di Kecamatan Gunuang Omeh sebanyak 339 unit rumah, disusul dengan Kecamatan Bukik Barisan sebanyak 112 unit rumah, sedangkan populasi rumah yang mengalami kerusakan paling sedikit adalah di Kecamatan Suliki dan Kecamatan Guguk yakni sebanyak 2 unit rumah. Pada sektor perumahan sub sektor prasarana lingkungan juga terdapat kerusakan pada 20 ruas jalan lingkungan yang tersebar di berbagai Nagari di Kecamatan Gunuang Omeh dan Kecamatan Bukik Barisan.

Berdasarkan jenis kerusakan yang terjadi pada komponen bangunan rumah dan kerusakan isi rumah yang berupa *meubelair* dan peralatan lainnya, maka data kondisi kerusakan rumah dapat diuraikan sebagai rumah kondisi rusak berat sebanyak 340 unit, kerusakannya berupa runtuhnya kolom dan pondasi hingga menyebabkan rumah ambruk dan penetapan zona merah rawan bencana menyebabkan kawasan didirikannya bangunan rumah tidak bisa ditinggali kembali. Rumah kondisi rusak sedang sebanyak 165 unit, kerusakannya berupa komponen struktur utama bangunan sebagian kecil rusak, dan komponen penunjang rusak namun bangunan masih tetap berdiri, diantara kerusakan pintu kusen, lantai retak, dan tembok retak rambut. Rumah kondisi rusak ringan sebanyak 189 unit, dengan kerusakannya berupa kerusakan pintu, jendela, dinding, tiang penyangga, penutup atap rumah yang

terbuat dari seng/genteng.

Sektor perumahan sub sektor rumah mengalami kerusakan dan kerugian dengan perkiraan total nilai sebesar Rp. 38,528,206,315,-, dengan rincian nilai kerusakan sebesar Rp. 24,201,967,415,- dan nilai kerugian sebesar Rp. 14,326,238,900,,-. Sektor perumahan sub sektor prasarana lingkungan mengalami kerusakan dan kerugian dengan perkiraan total nilai sebesar Rp. 462,099,000,-.

2. Sektor Infrastruktur

Kerusakan infrastruktur yang disebabkan oleh bencana alam banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrem di Kabupaten Lima Puluh Kota pada sektor infrastruktur meliputi sub sektor transportasi, sub sektor sumber daya air, sub sektor energi, sub sektor air dan sanitasi, dan sub sektor fasilitas keselamatan jalan.

Pada sub sektor transportasi, bencana alam banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrem di Kabupaten Lima Puluh Kota menyebabkan kerusakan pada berbagai titik bagian ruas jalan/jembatan provinsi dan jalan/jembatan kabupaten. Kerusakan pada sub sektor sanitasi terjadi di 3 kecamatan, sehingga mengakibatkan terganggunya jaringan air bersih di kawasan tersebut, sedangkan pada sub sektor sumber daya air mengakibatkan rusaknya sungai, irigasi, drainase, dan bendung. Lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran. Tabel Penilaian Kerusakan dan Kerugian Pascabencana alam banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrem Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

Bencana alam banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrem di Kabupaten Lima Puluh Kota pada sektor infrastruktur sub sektor transportasi menimbulkan nilai kerusakan sebesar Rp. 543,472,695,999,- dan menimbulkan kerugian dengan



perkiraan nilai sebesar Rp. 349,137,060,630,- dengan total nilai kerusakan dan kerugian sebesar Rp. 892,609,756,629,-

Pada sub sektor sumber daya air yang meliputi jaringan sungai, irigasi, drainase, dan bendung memiliki nilai kerusakan sebesar Rp. 5,813,882,000,- dan menimbulkan kerugian dengan perkiraan nilai sebesar Rp. 1,920,000,000,- dengan total nilai kerusakan dan kerugian sebesar Rp. 7,733,882,000,-.

Pada sub sektor energi yang meliputi jaringan ketenagalistrikan memiliki nilai kerusakan sebesar Rp.240,000,000,- dan menimbulkan kerugian dengan perkiraan nilai sebesar Rp.460,000,000,- dengan total nilai kerusakan dan kerugian sebesar Rp.700,000,000,-.

Pada sub sektor air dan sanitasi yang meliputi titik sarana air bersih memiliki nilai kerusakan sebesar Rp. 937,538,400,- dan menimbulkan kerugian dengan perkiraan nilai sebesar Rp.0,- dengan total nilai kerusakan dan kerugian sebesar Rp. 937,538,400,-.

Pada sub sektor fasilitas keselamatan jalan terkait rambu-rambu dan PJU memiliki perkiraan nilai kerusakan sebesar Rp.880,255,000,- dan menimbulkan kerugian dengan perkiraan nilai sebesar Rp.880,255,000,- dengan total nilai kerusakan dan kerugian sebesar Rp.1,760,510,000,-..

Berdasarkan seluruh data kerusakan dan kerugian pada sektor infrastruktur dapat diakumulasikan memiliki nilai kerusakan sebesar Rp. 551,344,371,399,- dan nilai kerugian sebesar Rp. 352,397,315,630,-, dengan total besaran nilai kerusakan dan kerugian keseluruhan sebesar Rp. 903,741,687,029,-.

Kajian Dampak Bencana

Infrastruktur merupakan sarana penting dalam



menunjang mobilitas aktivitas sosial dan ekonomi penduduk. Terjadinya bencana alam banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrem mengakibatkan rusaknya berbagai infrastruktur sehingga mobilitas dan aktivitas masyarakat menjadi terganggu. Pada sub sektor transportasi, bencana banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrem menimbulkan dampak rusaknya sejumlah ruas jalan antara lain 2 jalan provinsi dan 34 jalan Kabupaten. Bencana ini juga berdampak pada sejumlah ruas jembatan antara lain 3 jembatan Provinsi, 19 jembatan Kabupaten dan 27 jembatan gantung, dan 2 fasilitas keselamatan jalan Provinsi.

Bencana banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrem kemudian turut berdampak pada sub sektor sumber daya air berupa 2 sungai, 8 irigasi, 2 drainase, dan 5 bendung. Kemudian bencana ini juga berdampak pada sub sektor energi yakni berupa 1 set jaringan listrik, berdampak pada sub sektor air dan sanitasi berupa 5 titik sarana air bersih, dan berdampak pada sub sektor fasilitas keselamatan jalan berupa 1 rambu lalu lintas dan 2 penerangan jalan umum.

Dampak utama yang diakibatkan oleh kerusakan pada sektor infrastruktur adalah memperlambat mobilisasi, menurunnya kualitas hidup masyarakat, dan meningkatkan risiko kecelakaan dalam perjalanan.

3. Sektor Ekonomi

Bencana alam banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrem telah mengganggu kegiatan ekonomi masyarakat di beberapa Kecamatan, khususnya di Kecamatan Gunuang Omeh, Baruah Gunuang, Mungka, Lareh Sago Halaban, Harau, dan Luak. Sektor ekonomi merupakan salah satu sektor yang mengalami kerusakan dan berpotensi mengakibatkan kerugian yang cukup besar dalam aktivitas ekonomi seperti sub sektor pertanian, sub sektor pangan,



sub sektor perikanan, sub sektor perindustrian, sub sektor pariwisata, sub sektor koperasi dan usaha kecil menengah, dan sub sektor hutan.

Nilai perkiraan kerusakan untuk sub sektor pertanian yang meliputi lahan sawah, lahan non sawah, sarana prasarana pertanian, tanaman hortikultura dan perkebunan adalah sebesar Rp. 5,042,134,295,- dengan perkiraan nilai kerugian sebesar Rp. 395,646,000,- dengan total besaran nilai kerusakan dan kerugian keseluruhan sebesar Rp. 5,437,780,295,-.

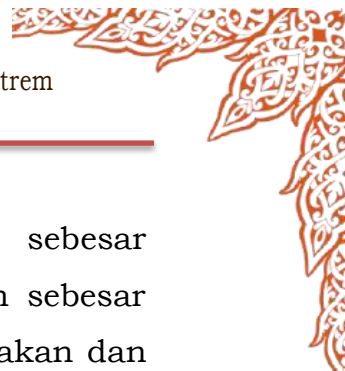
Nilai perkiraan kerusakan untuk sub sektor pangan terkait rumah bibit adalah sebesar Rp.5,700,000,- dengan perkiraan nilai kerugian sebesar Rp.3,000,000,- dengan total besaran nilai kerusakan dan kerugian keseluruhan sebesar Rp. 8,700,000,-.

Nilai perkiraan kerusakan untuk sub sektor perikanan terkait bibit ikan nila adalah sebesar Rp.0,- dengan perkiraan nilai kerugian sebesar Rp. 24,375,000,- dengan total besaran nilai kerusakan dan kerugian keseluruhan sebesar Rp. 24,375,000,-.

Nilai perkiraan kerusakan untuk sub sektor perindustrian terkait dapur produksi industri kecil menengah (IKM) adalah sebesar Rp. 426,000,000,- dengan perkiraan nilai kerugian sebesar Rp. 360,000,000,- dengan total besaran nilai kerusakan dan kerugian keseluruhan sebesar Rp. 786,000,000,-.

Nilai perkiraan kerusakan untuk sub sektor pariwisata adalah sebesar Rp. 142,020,000,- dengan perkiraan nilai kerugian sebesar Rp. 142,020,000,- dengan total besaran nilai kerusakan dan kerugian keseluruhan sebesar Rp. 284,040,000,-.

Nilai perkiraan kerusakan untuk sub sektor koperasi



dan Usaha Kecil Menengah (UKM) adalah sebesar Rp. 92,000,000,- dengan perkiraan nilai kerugian sebesar Rp. 67,300,000,- dengan total besaran nilai kerusakan dan kerugian keseluruhan sebesar Rp. 159,300,000,-.

Nilai perkiraan kerusakan untuk sub sektor hutan adalah sebesar Rp. 26,143,099,- dengan perkiraan nilai kerugian sebesar Rp. 26,143,099,- dengan total besaran nilai kerusakan dan kerugian keseluruhan sebesar Rp. 52,286,198,.

Berdasarkan seluruh data kerusakan dan kerugian pada sektor ekonomi dapat diakumulasikan memiliki nilai kerusakan sebesar Rp. 5,733,997,394,- dan nilai kerugian sebesar Rp. 1,018,484,099,-, dengan total besaran nilai kerusakan dan kerugian keseluruhan sebesar Rp. 6,752,481,493,-.

Kajian Dampak Bencana

Pada sektor ekonomi dampak bencana terjadi di sub sektor pertanian, sub sektor pangan, sub sektor perikanan, sub sektor perindustrian, sub sektor pariwisata, sub sektor koperasi dan usaha kecil menengah, dan sub sektor hutan.

Pada sub sektor pertanian, bencana alam banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrem menyebabkan kerusakan di beberapa fasilitas dan pendukung aktivitas pertanian, seperti kerusakan pada sarana dan prasarana pertanian, lahan, dan jembatan. Pada sub sektor pangan, terjadi kerusakan pada satu rumah bibit di Kecamatan Pangkalan. Pada sub sektor perikanan, bencana alam banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrem menyebabkan kerugian dengan menghanyutkan dan matinya ribuan bibit ikan di Kecamatan Gunuang Omeh. Pada sub sektor perindustrian, bencana alam banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrem menyebabkan kerusakan pada puluhan dapur produksi IKM yang tersebar

di berbagai Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Pada sub sektor perdagangan, bencana alam banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrem menyebabkan rusaknya sarana prasarana pasar di beberapa Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Pada sub sektor pariwisata, bencana alam banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrem menyebabkan rusaknya 2 spot pariwisata. Pada sub sektor koperasi & UKM, bencana alam banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrem menyebabkan kerusakan pada 10 bangunan UMKM di Kecamatan Gunuang Omeh. Pada sub sektor hutan, bencana alam banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrem menyebabkan kerusakan pada beberapa titik hutan di Kecamatan Harau dan Kecamatan Lareh Sago Halaban.

Segala hal yang terjadi dampak bencana alam banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrem adalah menyebabkan penurunan omset, terganggunya *supply* pangan, kesulitan dalam akses pangan terdekat, serta kerugian finansial secara massif pada masyarakat terdampak.

4. Sektor Sosial

Perhitungan kerusakan dan kerugian pascabencana alam banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrem Kabupaten Lima Puluh Kota pada sektor sosial mencakup sub sektor kesehatan dan sub sektor pendidikan. Nilai perkiraan kerusakan untuk sub sektor kesehatan sebesar Rp. 2,000,000,000,-, sedangkan nilai kerusakan pada sub sektor pendidikan senilai Rp. 14,922,288,000,- perkiraan nilai kerugian sebesar Rp. 298,724,400,-, dengan perkiraan total nilai kerusakan dan kerugian adalah sebesar Rp. 15,221,012,400,-. Dengan demikian pada sektor sosial dapat diakumulasikan memiliki nilai kerusakan sebesar Rp. 16,922,288,000,- dan nilai kerugian sebesar Rp. 298,724,400,-, dengan total besaran nilai kerusakan dan

kerugian keseluruhan sebesar Rp. 17,221,012,400,-.

Kajian Dampak Bencana

Pada sektor sosial dampak bencana terjadi di sub sektor kesehatan dan sub sektor pendidikan. Pada sektor sosial, bencana alam banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrem menimbulkan dampak terhadap rusaknya sarana dan prasarana pendukung. Sehingga sebab hal ini, *morbidity* dan trauma psikologis pada masyarakat menjadi semakin rentan. Akses mendapatkan pelayanan Kesehatan ditengah situasi bencana juga menjadi sulit sehingga dibutuhkan bantuan pemerintah untuk mendatangkan tim medis ke lokasi bencana.

5. Lintas Sektor

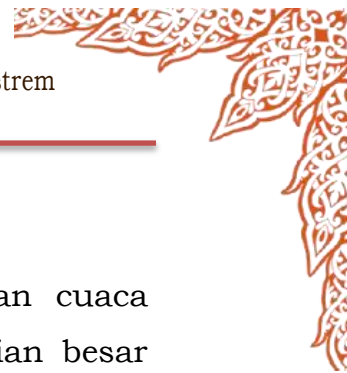
Kerusakan yang terjadi pada lintas sektor berada pada sub sektor Pemerintahan dan sub sektor sarana peribadatan. Bencana alam banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrem Kabupaten Lima Puluh Kota mengakibatkan 2 bangunan gedung pemerintahan mengalami kerusakan, dengan nilai kerusakan sebesar Rp. 702,662,000,-. Total perkiraan nilai kerusakan kerugian pada lintas sektor adalah sebesar Rp. 702,662,000,-.

Kajian Dampak Bencana

Pada lintas sektor dampak bencana yang terjadi di sub sektor pemerintahan menyebabkan pelayanan kepada masyarakat menjadi terganggu, karena jadwal program kegiatan tidak bisa terlaksana secara maksimal. Pada sub sektor sarana peribadatan yang terdampak, mengakibatkan fungsi masjid sebagai pusat ibadah umat muslim menjadi terganggu.

B. Gangguan Akses, Gangguan Fungsi dan Peningkatan Risiko

1. Sektor Perumahan



a. Gangguan akses

Bencana alam banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrem menyebabkan kerusakan pada sebagian besar struktur rumah karena pergerakan tanah yang signifikan, sehingga sebab hal ini akses masyarakat untuk memiliki tempat tinggal yang aman menjadi terganggu. Kemudian hal ini mengakibatkan ketidakmampuan warga mengakses area rumah karena berada di zona bahaya (zona merah likuifikasi) yang ditetapkan pemerintah pasca bencana terjadi. Terganggunya akses masyarakat untuk menggunakan jalan juga menjadi persoalan pada sektor ini.

b. Gangguan fungsi

Kerusakan aset pada sub sektor rumah mengakibatkan terganggunya fungsi rumah sebagai tempat tinggal dan berlindung untuk sementara waktu. Terhentinya kegiatan usaha mikro berbasis rumah (warung, industri rumah tangga) karena rusaknya ruang kerja atau peralatan produksi di dalam rumah.

Kerusakan aset pada sub sektor jalan lingkungan mengakibatkan terganggunya fungsi jalan sebagai sarana lalu lintas untuk sementara waktu.

c. Peningkatan resiko

Kerusakan aset sub sektor rumah akibat kondisi rumah yang memiliki klasifikasi rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat menjadi penyebab meningkatnya resiko keamanan berupa peningkatan potensi pencurian atau penjarahan pada rumah-rumah yang ditinggalkan atau rumah dengan kerusakan dinding/pintu. Bangunan rumah dengan kerusakan sedang memiliki risiko runtuh total jika terkena beban angin kencang atau lanjutan pergeseran tanah (struktural tidak stabil). Munculnya

penyakit menular akibat kepadatan tinggi masyarakat yang berada di pengungsian dan lingkungan rumah yang lembap/terkontaminasi lumpur.

2. Sektor infrastruktur

a. Gangguan akses

Gangguan akses yang terjadi karena kerusakan pada sub sektor transportasi adalah kehilangan hak akses terhadap prasarana transportasi sebagai kebutuhan dasar perpindahan manusia dan barang di lingkungan pedesaan dan perkotaan. Kerusakan pada sub sektor ini juga menjadi masalah utama dalam sulitnya mobilisasi pendistribusian bantuan logistik ke daerah-daerah terdampak bencana. Di beberapa lokasi, jembatan putus mengakibatkan akses masyarakat ke sekolah dan lokasi mata pencaharian menjadi terhenti.

Kerusakan pada sub sektor sanitasi yang berupa jaringan air bersih menyebabkan akses masyarakat untuk mendapatkan air bersih menjadi sulit sehingga menyebabkan kerentanan terkena penyakit pada para penduduk yang terkena dampak bencana ini. Kerusakan pada sub sektor energi yang berupa jaringan kelistrikan menyebabkan kesulitan dalam berkegiatan pada masyarakat.

b. Gangguan fungsi

Gangguan fungsi karena kerusakan aset pada sub sektor transportasi darat mengakibatkan terganggunya fungsi transportasi untuk sementara waktu. Kerusakan aset pada sub sektor sanitasi mengakibatkan terganggunya fungsi jaringan air bersih untuk sementara waktu. Kerusakan aset pada sub sektor energi mengakibatkan terganggunya fungsi jaringan kelistrikan untuk sementara waktu. Kerusakan aset pada sub sektor

sumber daya air mengakibatkan terganggunya fungsi jaringan sungai untuk sementara waktu.

c. Peningkatan risiko

Kerusakan aset sub sektor transportasi akibat kondisi jalan dan jembatan yang rusak menyebabkan meningkatnya resiko kerusakan kendaraan, kerusakan pada sub sektor sanitasi mendorong meningkatnya resiko penduduk terkena penyakit, dan kerusakan pada sub sektor sumber daya air menyebabkan kekeringan dan kesulitan air berkepanjangan.

3. Sektor ekonomi

a. Gangguan akses

Gangguan akses yang terjadi karena kerusakan pada sub sektor ekonomi adalah kehilangan hak akses terhadap pemenuhan kebutuhan dasar karena terganggunya transaksi jual beli barang dan jasa di sektor perdagangan, menurunnya jumlah pendapatan dari sektor pariwisata, dan akses serta aktivitas petani juga menjadi terganggu dan terhambat. Pada masa sebelum bencana biasanya masyarakat dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, tetapi sesudah terjadi bencana masyarakat kesulitan dalam memperoleh, mengakses serta beraktivitas terhadap mata pencahariannya.

b. Gangguan fungsi

Gangguan fungsi dalam bidang ekonomi berupa terganggunya fungsi kelembagaan organisasi kelompok ekonomi yang ada di masyarakat seperti kelompok tani, kelompok budidaya ikan, TPI dan lain-lain.

c. Peningkatan risiko

Gangguan akses berupa sulitnya pemenuhan kebutuhan dasar dan gangguan fungsi kelembagaan

organisasi usaha ekonomi masyarakat dan kelompok tani mengakibatkan meningkatnya risiko berupa turunnya daya beli masyarakat yang berdampak pada melambatnya laju perekonomian, sehingga dapat mendorong resiko meningkatnya angka kemiskinan.

4. Sektor sosial

a. Gangguan akses

Penilaian gangguan akses pada sektor sosial sub sektor kesehatan adalah terganggunya akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sebagai kebutuhan dasar bagi masyarakat. Begitu pula dengan kerusakan pada sub sektor pendidikan, menyebabkan kegiatan belajar mengajar menjadi tidak berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan

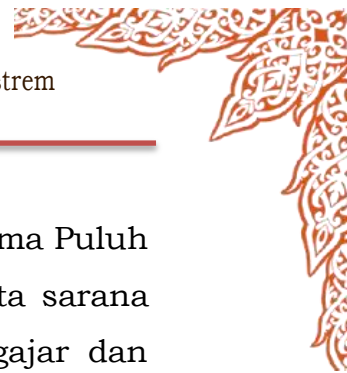
b. Gangguan fungsi

Gangguan fungsi sub sektor kesehatan mengakibatkan terganggunya fungsi rumah sakit dan puskesmas sebagai sarana pelayanan kesehatan. Gangguan fungsi pada sub sektor pendidikan mengakibatkan terganggunya fungsi pada layanan pendidikan seperti sekolah.

c. Peningkatan risiko

Meningkatnya resiko sub sektor kesehatan ditandai dengan menurunnya kapasitas kesehatan dan meningkatnya kerentanan penyakit yang dapat mengakibatkan memburuknya kondisi kesehatan, sehingga diperlukan bangunan dan sarana/prasarana kesehatan yang memadai dalam situasi tanggap darurat bencana.

Pada sub sektor pendidikan, banyak faktor yang menyebabkan terganggunya kegiatan belajar mengajar akibat dampak dari bencana alam banjir, tanah longsor



dan cuaca ekstrem yang terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota. Rusaknya akses jalan dan jembatan serta sarana pendidikan menjadi kendala bagi tenaga pengajar dan murid untuk berangkat ke sekolah dan melakukan aktivitas rutin belajar mengajar, karena dengan dampak bencana alam yang terjadi mengakibatkan kerusakan pada beberapa sekolah menjadi penyebab fungsi dari sarana pendidikan tersebut menjadi terganggu karena akan beresiko apabila proses belajar mengajar tetap dilakukan di dalam bangunan sekolah yang rusak akibat terdampak bencana.

5. Lintas sektor

a. Gangguan akses

Gangguan akses lintas sektor pada sub sektor pemerintahan adalah terganggunya aktivitas pegawai dan jadwal yang telah ditetapkan sebagai akibat rusaknya beberapa bangunan kantor dan sarana prasarana penunjang sehingga mengakibatkan akses masyarakat dalam memperoleh pelayanan di kantor pemerintahan menjadi terganggu. Terputusnya jaringan internet pemerintah selama beberapa hari selama bencana mengakibatkan akses pegawai dan masyarakat ke *database* pemerintahan menjadi terkunci. Kemudian kerusakan pada sub sektor sarana peribadatan menyebabkan akses masyarakat untuk ke masjid menjadi terganggu.

b. Gangguan fungsi

Gangguan fungsi sub sektor pemerintahan adalah lumpuhnya fungsi pemerintah sebagai sarana penyedia administrasi dan informasi. Penurunan tingkat SDM juga terjadi selama masa darurat bencana sebab banyak sekali pegawai/ASN yang juga menjadi korban sehingga rasio



pelayanan publik terhadap masyarakat menurun drastis. Gangguan fungsi sub sektor sarana peribadatan adalah terhentinya kegiatan rutin yang biasa dilakukan masyarakat di masjid seperti sholat berjamaah dan kajian mingguan sehingga menurunkan fungsi masjid sebagai pusat sarana peribadatan.

c. Peningkatan risiko

Peningkatan resiko yang dapat terjadi sebab bencana alam banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrem pada sub sektor pemerintahan adalah lemahnya pengawasan administrasi di masa darurat yang kemudian dapat meningkatkan risiko maladministrasi atau penyimpangan pada penyaluran bantuan. Kemudian pada sub sektor sarana peribadatan adalah menurunnya minat dan kebiasaan masyarakat untuk sholat dan melakukan ibadah-ibadah lainnya di masjid.

C. Perkiraan Kebutuhan

Berdasarkan analisis akibat dan dampak bencana alam banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrem yang terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota maka dibutuhkan penanganan pemulihan pascabencana mencakup 5 sektor yaitu :

➤ Sektor Perumahan	Rp. 62,530,768,248,-.
➤ Sektor Infrastruktur	Rp. 844.992.879.457,-.
➤ Sektor Sosial	Rp. 127.011.030.423,-.
➤ Sektor Ekonomi	Rp. 57.187.265.402,-.
➤ Lintas Sektor	Rp. 110.072.902.966,-.

Sehingga total kebutuhan sebesar Rp. 1.201.794.846.496,-. Detail lebih lanjut terkait kebutuhan kegiatan sebagaimana tercantum pada lampiran.

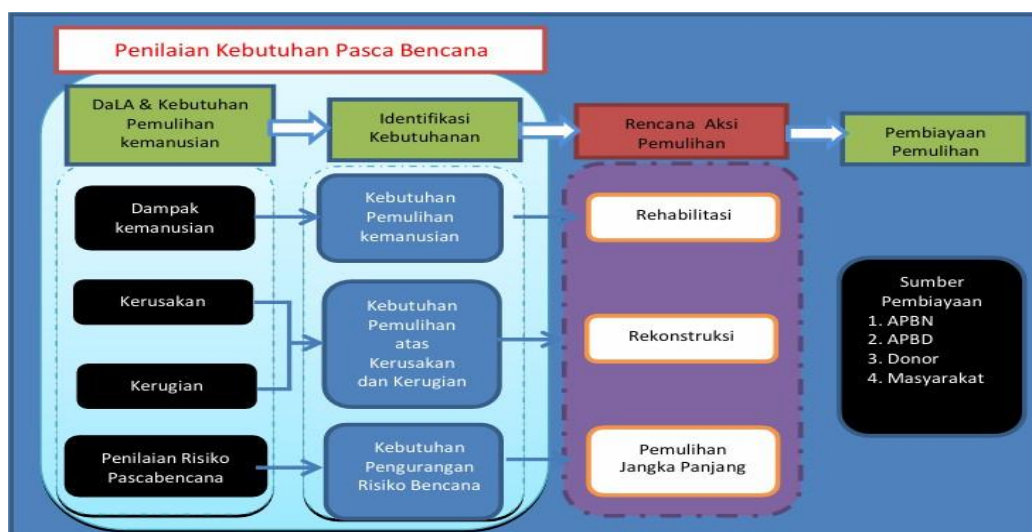


BAB IV

PRINSIP, KEBIJAKAN DAN STRATEGI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA

Penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrem dikoordinasikan oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota melalui BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota dan difasilitasi oleh BNPB dengan melibatkan partisipasi aktif dari Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota, SKPD yang terdampak, Kementerian/Lembaga serta BPBD Provinsi Sumatera Barat. Proses penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana didasarkan pada hasil Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) yang dipadukan dengan kebijakan dan kemampuan pembiayaan dari pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan sumber dana lainnya yang sah.

Jitupasna dilakukan melalui penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana alam banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrem di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan pendekatan sektoral menggunakan metodologi survei, pengkajian dan pembahasan oleh tim terpadu. Hasil Jitupasna dipadukan dengan kebijakan dan strategi pembangunan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang merupakan daerah terdampak serta penyediaan anggaran dari berbagai pihak yang berkomitmen untuk membiayai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.



Gambar 7
Penilaian Kebutuhan Pascabencana

Pemulihan suatu wilayah pascabencana merupakan tanggung jawab pemerintah daerah terdampak bersama-sama dengan pemerintah pusat, masyarakat, dan dunia usaha. Maka rencana pemulihan yang memuat kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana wilayah dan kehidupan masyarakat yang terdampak bencana harus diintegrasikan dengan program dan kegiatan pembangunan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah, yang kemudian dalam bencana Hidrometeorologi Sumatera terkhusus bencana alam banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrem Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 juga diintegrasikan dengan program dan kegiatan pembangunan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Penyediaan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dilakukan dengan menghimpun potensi-potensi sumber pendanaan yang tersedia, seperti APBD Kabupaten Lima Puluh Kota dan APBD provinsi Sumatera Barat, APBN/DIPA kementerian/lembaga yang lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta program dan kegiatannya, sekaligus dana yang bersumber dari dunia usaha dan organisasi pembangunan multilateral.

Beberapa pokok pikiran yang perlu ditindaklanjuti pascabencana banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrem di Kabupaten Lima Puluh Kota :

- Masyarakat yang menjadi korban bencana banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrem membutuhkan makanan dan minuman, perbaikan rumah dan perbaikan sarana prasarana publik dengan segera;
- Pemerintah Kabupaten dan BNPB bersama dengan Kementerian/Lembaga menugaskan tim pengkajian kebutuhan pascabencana sehingga hasilnya dapat menjadi dasar dalam penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
- Identifikasi dan inventarisasi kerusakan dan kerugian yang dapat ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Pusat/Kementerian/Lembaga;
- Mempercepat upaya pemulihan aktifitas sosial ekonomi masyarakat di daerah terdampak bencana dengan sumber pembiayaan berasal dari APBD Kabupaten, APBD provinsi, BNPB dan Kementerian/Lembaga sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya;
- Dalam upaya pengurangan risiko bencana perlu dioptimalkan upaya pencegahan dan mitigasi pada kawasan rawan bencana baik berupa mitigasi struktural maupun non struktural.

A. Prinsip Dasar dan Kebijakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

Prinsip pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana perlu menetapkan langkah-langkah sebagai berikut:

1. komitmen pemerintah untuk segera melaksanakan pemulihan pascabencana terhadap seluruh sektor terdampak bencana (kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi);



2. melaksanakan penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana dan kajian kebutuhan pemulihan kemanusiaan, yang dilanjutkan dengan pengkajian kebutuhan pemulihan kehidupan masyarakat maupun wilayah yang terdampak bencana;
3. penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dengan melibatkan seluruh kementerian/lembaga di tingkat pusat maupun daerah, yang dikoordinasikan oleh BNPB dengan peran serta aktif BPBD Provinsi dan Kabupaten;
4. pemulihan dilakukan secara komprehensif, yang meliputi semua sektor terdampak yaitu sektor perumahan, infrastruktur, ekonomi, sosial, dan lintas sektor;
5. rehabilitasi dan rekonstruksi mengutamakan partisipasi semua pihak termasuk pihak non pemerintah.

Adapun prinsip dasar penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana adalah:

1. Merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah dan Pemerintah;
2. Membangun menjadi lebih baik (*build back better*) yang terpadu dengan konsep pengurangan risiko bencana dalam bentuk pengalokasian dana minimal 10% dari dana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
3. Mendahulukan kepentingan kelompok rentan seperti lansia, perempuan, anak dan penyandang cacat;
4. Mengoptimalkan sumber daya daerah;
5. Mengarah pada pencapaian kemandirian masyarakat, keberlanjutan program dan kegiatan serta perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik;



6. Mengedepankan keadilan dan kesetaraan gender.

Berdasarkan karakteristik hasil dan dampak sosialnya, maka pokok- pokok kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrem di Kabupaten Lima Puluh Kota meliputi:

1. Aspek Kebijakan pencegahan dan mitigasi
 - a. Peningkatan peran Penataan Ruang dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah dimulai dari pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana dalam Perencanaan Tata Ruang, meningkatkan konsistensi pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendaliannya;
 - b. Meningkatkan upaya pencegahan dan mitigasi struktural untuk penanganan bencana alam banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrem dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
 - c. Meningkatkan upaya pencegahan dan mitigasi non struktural untuk penanganan bencana alam banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrem dengan membangun kesadaran tentang pengurangan risiko bencana dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya konservasi;
 - d. Mengembangkan solusi alternatif mata pencaharian bagi penduduk yang kehilangan mata pencaharian akibat bencana alam banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrem.
2. Aspek Rehabilitasi, Rekonstruksi Dan Pemulihan Ekonomi
 - a. Melaksanakan kegiatan Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana secara bertahap terhadap lingkungan permukiman dan prasarana lingkungan pendukungnya, Infrastruktur publik dan Pemerintahan yang rusak akibat bencana alam banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrem, khususnya dengan memperhatikan standar teknis perbaikan lingkungan permukiman pada daerah rawan

- bencana dengan prinsip *build back better and safer*;
- b. Mengupayakan dengan segera pemulihan kegiatan ekonomi masyarakat baik pada sektor pariwisata, perdagangan, usaha mikro kecil dan menengah dan Industri Kecil dan Menengah.
3. Aspek Kebijakan Umum
- a. Dilaksanakan dengan pendekatan tata kelola pemerintahan yang baik sehingga menjamin adanya keterbukaan (transparansi) dalam proses dan pertanggungjawaban yang akuntabel, efisien, efektif, dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengawasan yang kuat;
 - b. Meningkatkan koordinasi yang efektif antar pelaksana kegiatan dan mengedepankan aspirasi masyarakat korban bencana;
 - c. Dilaksanakan oleh pemerintah daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya yang harus diikuti dengan mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. Dengan pertimbangan dampak kerusakan dan ketersediaan anggaran, maka rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana akan meliputi periode tahun anggaran 2025 - 2026, baik kegiatan pencegahan dan mitigasi maupun kegiatan rehabilitasi, rekonstruksi dan pemulihan ekonomi.

B. Strategi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga.



Terkait tanggung jawab tersebut, dalam rangka menyelenggarakan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrem, untuk melakukan penilaian terhadap kerusakan, kerugian dan kebutuhan pascabencana banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrem di Kabupaten Lima Puluh Kota, maka Sekretaris Daerah selaku Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah membentuk Tim Pengkajian Kebutuhan Pascabencana yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Lima Puluh Kota Nomor : 800/144/BPBD-LK/VIII-2025 tentang Pembentukan Tim Kerja Pengkajian dan Kebutuhan Pascabencana Kabupaten Lima Puluh Kota. Tim tersebut diketuai oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan beranggotakan para Kepala dan unsur SKPD terkait.

Adapun tugas tim diatas adalah :

- Melakukan pengkajian dan penilaian yang meliputi identifikasi, perhitungan kerusakan dan kerugian fisik dan non fisik yang menyangkut aspek kemanusiaan, perumahan, infrastuktur, ekonomi dan Lintas Sektor;
- Menganalisis dampak dari akibat bencana dan implikasi umumnya terhadap aspek-aspek fisik dan lingkungan, perekonomian, psikososial, budaya politik dan pemerintahan;
- Membuat perkiraan kebutuhan dan perhitungan biaya yang diperlukan untuk menyelenggarakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- Menyusun rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi;
- Melaporkan hasil kajian dan penilain kebutuhan pascabencana banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrem



kepada Bupati Lima Puluh Kota.

Strategi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dilakukan dengan:

- Koordinasi intensif antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi maupun kementerian/lembaga sebagai penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- Mobilisasi sumber daya secara cepat sesuai dengan tugas dan fungsi.
- Integrasi data dan perencanaan berbasis satu data sehingga tidak terjadi tumpang tindih program dan kegiatan.
- Penanganan bagian hulu melalui pengendalian deforestasi, rehabilitasi hutan, penguatan tata kelola lingkungan, serta penegakan hukum terhadap korporasi yang merusak ekosistem.
- Sinkronisasi kebijakan antara tata ruang wilayah, pemanfaatan hutan, pembangunan infrastruktur, perekonomian guna pembangunan berkelanjutan.
- Penguatan infrastuktur dan mitigasi melalui penerapan standar bangunan ramah bencana sesuai karakter wilayah terdampak.
- Kerja sama dengan komunitas/lembaga masyarakat, dan dunia usaha untuk memperkuat rehabilitasi dan rekonstruksi.
- Pelibatan masyarakat lokal guna mendukung padat karya serta mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat terdampak.
- Pendampingan psikososial untuk mengurangi trauma dan memperkuat ketahanan masyarakat terhadap bencana.
- Penyediaan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dilakukan dengan menghimpun potensi-

potensi sumber pendanaan yang tersedia, seperti APBD kabupaten dan APBD provinsi, APBN kementerian/lembaga, dana masyarakat/komunitas, dunia usaha serta sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

1. Sektor perumahan

Pendataan awal kerusakan sektor perumahan dihimpun oleh setiap Kecamatan terdampak bersumber dari laporan kerusakan dari para Kepala Nagari dan kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Bupati Nomor : 300.2.3/265/BUP-LK/XI/2025 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir, Tanah Longsor dan Cuaca Ekstrem Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 yang ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Bupati Nomor : 300.2.3/270/BUP-LK/XI/2025 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Alam Banjir, Tanah Longsor Dan Cuaca Ekstrem Di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Mekanisme pemulihan sektor perumahan berupa:

- a. Menyampaikan permohonan usulan kegiatan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor perumahan kepada Kementerian/Lembaga dan BNPB sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Pemberian bantuan stimulan untuk pelaksanaan pemulihan sektor perumahan berdasarkan hasil verifikasi penerima bantuan perumahan;
- c. Bantuan diberikan melalui pola pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan kearifan lokal, karakter, dan budaya masyarakat setempat sesuai mekanisme yang telah ditetapkan;
- d. Rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan harus mengikuti peraturan perundangan-undangan terkait rencana tata ruang wilayah;

- e. Pembangunan rumah mengikuti standar teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan masukan dari instansi/lembaga terkait sekaligus aspirasi masyarakat korban bencana.

2. Sektor infrastruktur

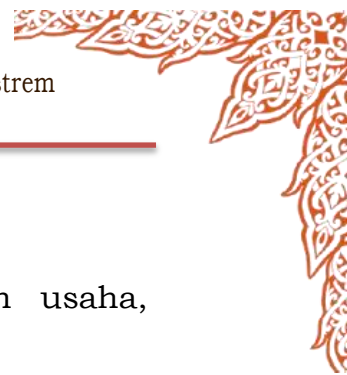
Strategi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor infrastruktur meliputi :

- a. Rehabilitasi dan rekonstruksi sektor infrastruktur dilaksanakan dalam rangka mendukung terselenggaranya pemulihan perekonomian masyarakat;
- b. Pembangunan kembali infrastruktur publik dengan memperhatikan kebijakan sektor terkait dan rencana tata ruang wilayah Kabupaten;
- c. Memulihkan fungsi dan membangun kembali infrastruktur publik, yaitu transportasi, sumber daya air, serta air bersih;
- d. Rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur mengacu pada standar teknis terkait;
- e. Pembangunan pengendali sedimen yang baru serta perawatan bangunan secara berkesinambungan agar tetap berfungsi optimal;
- f. Menyampaikan permohonan usulan kegiatan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor infrastruktur Kementerian/Lembaga dan BNPB sesuai ketentuan yang berlaku

3. Sektor ekonomi

Pada sektor ekonomi, strategi yang ditetapkan meliputi:

- a. Mendorong dan mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana fisik di bidang ekonomi;
- b. Pemberian bantuan stimulan untuk pemulihan ekonomi masyarakat yang berorientasi pada pembangunan



- jangka menengah dan jangka Panjang;
- c. Pemberian pendampingan dalam pemulihan usaha, termasuk pelatihan kewirausahaan;
 - d. Pembentukan kelompok usaha kecil menengah berbadan hukum di lokasi relokasi untuk pemenuhan penyaluran bantuan sektor ekonomi;
 - e. Menyampaikan permohonan usulan kegiatan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor ekonomi kepada Kementerian/Lembaga dan BNPB sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Sektor sosial

Strategi yang ditetapkan untuk mencapai sasaran penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi di sektor sosial meliputi:

- a. Pemulihan layanan kesehatan melalui rehabilitasi sarana dan prasarana kesehatan milik pemerintah, layanan gizi masyarakat, dan pemulihan psikososial;
- b. Menyampaikan permohonan usulan kegiatan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor sosial kepada Kementerian/Lembaga dan BNPB sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Lintas sektor

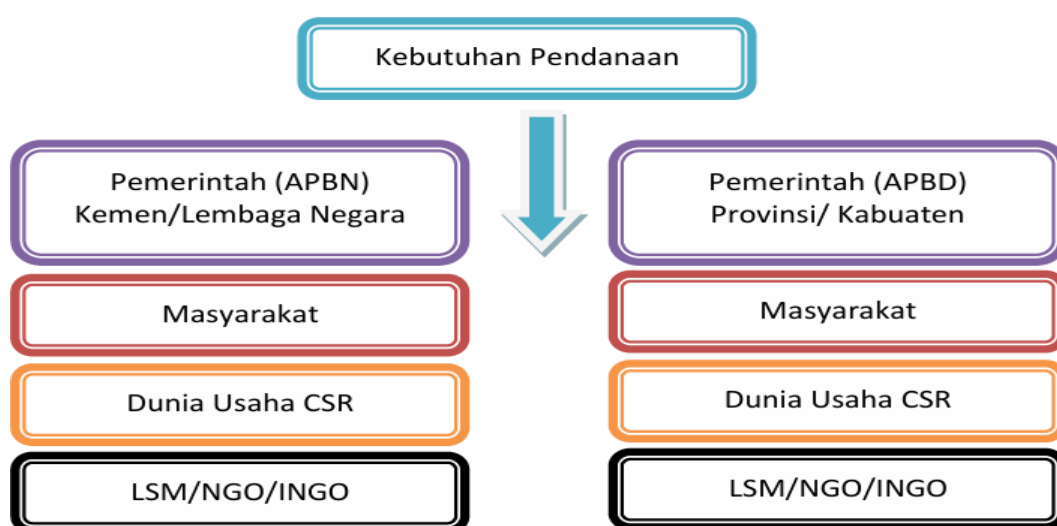
Strategi untuk mencapai sasaran penyelenggaraan pelayanan lintas sektor meliputi:

- a. Pemulihan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, keamanan dan ketertiban serta fungsi pelayanan kepada masyarakat dengan melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi kantor pemerintahan, TNI dan POLRI;
- b. Memulihkan fungsi lingkungan hidup sebagai salah satu bentuk pengurangan risiko bencana, seperti vegetasi hutan, sumber mata air dan pengelolaan sampah;
- c. Menyampaikan permohonan usulan kegiatan bantuan

rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana lintas sektor kepada Kementerian/Lembaga dan BNPB sesuai ketentuan yang berlaku.

C. Skema Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

Skema pendanaan bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, Masyarakat, Swasta (CSR) maupun bantuan luar negeri.



Gambar 8
Skema Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

D. Indikasi Sumber Pendanaan

Secara umum, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi selama tiga tahun merupakan proses pemulihan awal (*early recovery*) yang perlu dilanjutkan dalam proses pemulihan lanjutan dan terintegrasi dengan proses pembangunan reguler di daerah terdampak. Karena itu, proses pemulihan awal harus sejak awal dihubungkan dengan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) daerah.

Table 10.
Tahapan Pemulihan Pascabencana

Tahap Pemulihan	waktu Dari Kejadian	Kegiatan Pemulihan
Tanggap Darurat	28 Hari Pertama	- Penyaluran bantuan - Respon Medis - Kaji Cepat Dampak - <i>Need Assesment</i>
Transisi	180 Hari	- <i>Temporary Housing</i> - Rekonstruksi Perumahan - <i>Disaster Relief Activity</i> - Aset dan Properti
Rehabilitasi & Rekonstruksi	1 Tahun Pasca Bencana	- Pemulihan Awal - Rehabilitasi/Rekonstruksi - Pendampingan Psikologikal - Kajian Bencana
Pemulihan Lanjutan Melalui RPJP RPJMD	5 Tahun	- Pemulihan lanjutan - Rekonstruksi lanjutan - <i>Livelihood recovery</i>
Pemulihan Kehidupan (<i>Life Recovery</i>)		

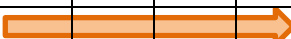
Mengacu pada Tabel 9, tahapan pemulihan pascabencana alam banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrem dapat dijabarkan sebagai berikut. Dalam 28 hari pertama pascabencana alam banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrem merupakan tahap tanggap darurat. Kegiatan pada masa tanggap darurat lebih banyak difokuskan pada penyaluran bantuan, respon medis, kaji cepat dampak dan penilaian kebutuhan. Masa transisi merupakan masa 180 hari setelah tanggap darurat. Pada masa transisi pekerjaan terkait pada *temporary housing*, rekonstruksi perumahan, aktivitas *disaster relief*, serta aset dan properti. Tahap ketiga dari pemulihan adalah masa rehabilitasi dan rekonstruksi (Rehab/Rekon) selama tiga tahun pertama. Dalam tahap rehab/rekon tersebut dilaksanakan kegiatan seperti pemulihan awal, rehabilitasi/rekonstruksi, pendampingan psikososial dan kajian bencana bencana alam banjir, tanah

longsor dan cuaca ekstrem. Untuk menjamin kesinambungan kegiatan pemulihan secara berkelanjutan, perlu dilakukan asesmen pemulihan secara berkala, dan hasilnya diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah. Tujuan akhir dari semua tahapan tersebut adalah untuk pemulihan kehidupan yang lebih baik dan aman.

E. Jadwal Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi akan dilaksanakan dan direncanakan untuk dianggarkan oleh masing-masing sumber anggaran pada tahun anggaran 2026 untuk kebutuhan yang bersifat mendesak dan diselesaikan pada tahun anggaran 2028. Jadwal akan tercapai dengan asumsi anggaran tersedia secara tepat waktu dan cukup, serta komponen pendukung kegiatan dan lain-lain dapat selesai tepat waktu.

Table 11.
Jadwal Pelaksanaan Rehabilitasi & Rekonstruksi Pascabencana alam banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrem Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kegiatan	2025	2026				PASCA RR2027
		TW4	TW1	TW2	TW3	TW4	
1	Penanganan Darurat Bencana						
2	Pelaksanaan Transisi Darurat Bencana						
3	Persiapan Operasional						
4	Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi						
	• Sektor Permukiman						
	• Sektor Infrastruktur						
	• Sektor Ekonomi						
	• Sektor Sosial						
	• Lintas Sektor						



BAB V

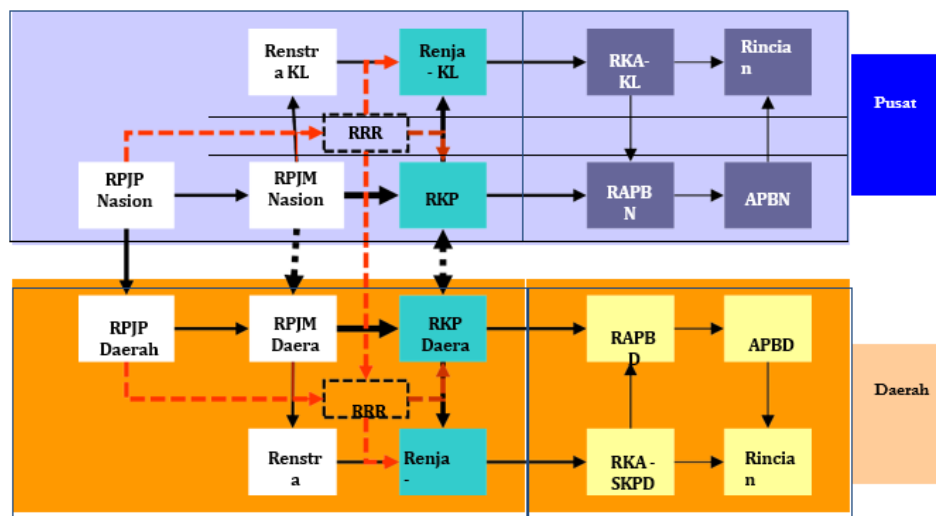
PENYELENGGARAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA

Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perencanaan kegiatan (termasuk identifikasi dan penghimpunan sumber pembiayaan), pelaksanaan kegiatan, pengorganisasian pelaksana kegiatan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pemantauan dan evaluasi kegiatan (termasuk pengawasan oleh pihak internal maupun eksternal pemerintah dan/atau pemerintah daerah), hingga pengalihan hasil kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai program pembangunan yang berkelanjutan.

A. Perencanaan dan Pendanaan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana adalah kebijakan yang harus diintegrasikan ke dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah sesuai dengan amanat Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, termasuk dalam kaitannya dengan mekanisme perencanaan dan penganggaran pembangunan tahunan. Rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahun pertama pascabencana, dimasukkan sebagai penyesuaian terhadap Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang sudah ditetapkan sebelumnya, demikian juga terhadap RAPBN dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) provinsi dan kabupaten/kota dan RAPBD tahun berjalan. Untuk tahun kedua dan seterusnya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi harus sudah dimasukkan dalam RKP, APBN, RKPD dan RAPBD, sesuai dengan mekanisme dalam peraturan dan perundang-undangan terkait.

Kedudukan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam Sistem Perencanaan Pembangunan (Sumber: Bappenas 2013), sebagai berikut :



Gambar 9
Kedudukan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

Table 12
Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

Keterangan:	
Renstra K/L	Rencana Strategis Kementerian/Lembaga
Renja K/L	Rencana Kerja Kementerian/Lembaga
RKA-K/L	Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga
RKA-SKPD	Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
RAPBN	Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
RAPBD	Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
RPJP	Rencana Pembangunan Jangka Pendek
RPJM	Rencana Pembangunan Jangka Menengah



Keterangan:	
RRRN	Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nasional
RRRD	Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah
RKP	Rencana Kerja Pemerintah

Sumber pendanaan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi berasal dari APBN, APBD Provinsi Sumatera Barat, APBD Kabupaten Lima Puluh Kota dan sumber lainnya seperti dana masyarakat, dunia usaha, dan bantuan/hibah dari lembaga atau negara donor. Pemerintah pusat dapat memberikan bantuan untuk pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi kepada pemerintah daerah yang terkena bencana dalam hal APBD tidak memadai dalam membiayai rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Bantuan diberikan melalui BNPB berdasarkan usulan kebutuhan dari pemerintah daerah yang telah diverifikasi oleh BNPB.

Penyusunan kebutuhan pendanaan tersebut dilakukan secara *bottom-up* dan partisipatif, yang disinkronkan dengan usulan-usulan dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah serta dikonsolidasikan oleh BNPB dan BPBD. Proses ini dilakukan dengan tujuan mengurangi potensi duplikasi kegiatan dan pembiayaan serta menganalisis prioritas pemulihan masing-masing sektor berdasarkan kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Besarnya kebutuhan pendanaan untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dihitung berdasarkan hasil Kajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) serta penilaian kerusakan dan kerugian (*Damage and Loss Assesment*) dipadukan dengan hasil penilaian kebutuhan pemulihan kemanusiaan (*Human Recovery Needs Assesment*). Pengkajian



kebutuhan pascabencana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan berdasarkan hasil pengkajian terhadap akibat bencana dan dampak bencana. Komponen akibat bencana yang dikaji terdiri dari penilaian kerusakan, kerugian, gangguan akses, gangguan fungsi dan peningkatan risiko bencana. Pengkajian akibat bencana, dampak bencana sampai kepada kebutuhan pascabencana meliputi sektor perumahan, infrastruktur, ekonomi, sosial, dan lintas sektor. Perkiraan total kebutuhan pendanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrem di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 adalah sebesar Rp. 1,098,106,586,199,-.

Prioritas kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi akan dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahun anggaran, dengan uraian sebagai berikut :

1. Pemulihan sektor perumahan dilaksanakan pada tahun pertama dengan mengutamakan bantuan rumah masyarakat dengan model eksitu (relokasi) maupun insitu;
2. Pemulihan sektor infrastruktur dilaksanakan secara bertahap selama 3 (tahun) dengan mengutamakan prasarana infrastruktur untuk pelayanan transportasi, air minum, sumber daya air dan energi;
3. Pemulihan sektor ekonomi dilaksanakan secara bertahap selama 3 (tahun) dengan mengutamakan bantuan stimulan modal usaha penghidupan maupun mata pencaharian masyarakat terdampak bencana;
4. Pemulihan sektor sosial dilaksanakan secara bertahap selama 3 (tahun) dengan mengutamakan pemulihan kesehatan masyarakat dan pembuatan prasarana dan sarana pendidikan;
5. Pemulihan lintas sektor dilaksanakan secara bertahap selama 3 (tahun) dengan mengutamakan pelayanan



masyarakat dan meningkatkan kapasitas dalam pengurangan resiko bencana.

Identifikasi potensi sumber pendanaan ditempuh dengan cara pendayagunaan anggaran pemerintah sebagai berikut:

1. Rupiah murni APBN, APBD provinsi/kabupaten pada tahun pertama didayagunakan secara optimal untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada daerah terkena dampak bencana melalui realokasi (jika dimungkinkan) kegiatan berdasarkan pedoman dan peraturan yang berlaku;
2. Anggaran perubahan APBN, APBD provinsi/kabupaten didayagunakan secara optimal untuk upaya lanjutan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada daerah yang terkena dampak bencana sesuai dengan prosedur perencanaan dan penganggaran tahunan yang berlaku;
3. Anggaran pemerintah APBN, APBD provinsi/kabupaten tahun kedua dan ketiga didayagunakan secara optimal untuk upaya lanjutan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah yang terkena dampak bencana sesuai dengan prosedur perencanaan dan penganggaran tahunan yang berlaku.

B. Kelembagaan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan tanggung jawab pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang terkena bencana. Dalam pelaksanaannya, kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dikoordinasikan di tingkat daerah oleh BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota dan BPBD Provinsi Sumatera Barat, serta BNPB untuk koordinasi di tingkat Pusat.

Pelaksanaan teknis substansial dilakukan oleh perangkat Kementerian/Lembaga dan atau Satuan Kerja Perangkat Daerah

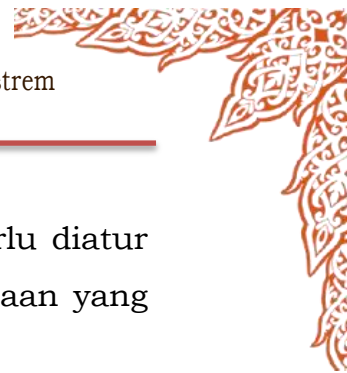
(SKPD) di Provinsi dan/atau Kabupaten. Semua pelaksanaan teknis dari aspek- aspek rehabilitasi dan rekonstruksi harus mengacu pada standar teknis yang ditetapkan peraturan perundangan. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku. Semua hasil kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi aset Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan atau masyarakat dan dilakukan penatausahaan sesuai peraturan yang berlaku.

C. Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi/Mekanisme Anggaran

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan tanggungjawab pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang terkena bencana. Dalam penyelenggaraan pelaksanaannya, kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dikoordinasikan oleh BNPB dan/atau BPBD. Sebagai pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi, pemerintah daerah melalui BPBD yang bersangkutan berkewajiban untuk:

1. melaksanakan koordinasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi antar sektor di tingkat kabupaten yang bersangkutan;
2. melaporkan hasil pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi kepada BNPB; dan
3. melaksanakan koordinasi dengan Bappeda dalam menyusun RKPD penanggulangan bencana sesuai peraturan dan perundang- undangan.

Sehubungan dengan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang dibuat terdapat kegiatan dan pendanaan dari kementerian/lembaga yang terkait, maka koordinasi pelaksanaan maupun pelaporan pelaksanaan kegiatan



rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi bagian yang perlu diatur dengan baik sehingga tercapai sinkronisasi pelaksanaan yang optimal.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, sasaran rehabilitasi adalah kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan kondisi sosial psikologis, pelayanan kesehatan, pemulihan sosial- ekonomi-budaya, serta pemulihan keamanan dan ketertiban yang pada prinsipnya pemulihan fungsi pemerintahan dan fungsi pelayanan publik.

Sasaran kegiatan rekonstruksi dan rekonstruksi pascabencana mengintegrasikan berbagai program pembangunan ke dalam pendekatan pembangunan daerah yang dilakukan dengan pendekatan membangun kembali yang lebih baik dan aman, berkelanjutan, berbasis pengurangan risiko bencana dengan memperhatikan kearifan lokal, meliputi perbaikan maupun pembangunan kembali sarana dan prasarana yang rusak, membangkitkan kembali kehidupan sosial masyarakat, peningkatan kondisi sosial dan ekonomi, serta peningkatan fungsi pelayanan publik dan pemerintahan, dengan menerapkan aspek pengurangan resiko bencana dan mengutamakan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan kegiatan

D. Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan dan pertanggungjawaban anggaran dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik dalam pengelolaan APBN maupun APBD termasuk hibah kepada Pemerintah Daerah.



Untuk pembiayaan dengan sumber APBD, perlu dicermati Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampiannya, yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan untuk pembiayaan yang bersumber dari hibah Pemerintah (rupiah murni) kepada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yang dikelola melalui mekanisme APBD, agar juga memperhatikan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku tentang hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam rangka bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana serta Naskah Perjanjian Hibah antara Menteri Keuangan dengan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana mengatur bahwa pelaporan keuangan penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN dan APBD dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Dalam peraturan pemerintah ini juga diatur bahwa sistem akuntansi dana penanggulangan bencana yang bersumber dari masyarakat dilakukan sesuai pedoman yang ditetapkan oleh menteri keuangan. Dalam rangka melakukan pengendalian terhadap partisipasi masyarakat dunia usaha dan masyarakat internasional, penatausahaan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang hibah daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang peran serta lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah dalam penanggulangan bencana, dan peraturan pelaksanaan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan

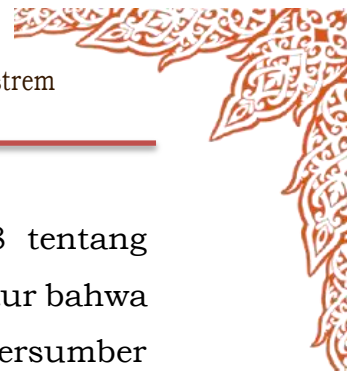
yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 224/PMK.07/2017 Tanggal 29 Desember 2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan kegiatan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat maupun Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota juga memberikan laporan pelaksanaan kegiatan dan anggaran selain kepada Pengguna Anggaran (PA) masing-masing sesuai dengan sumber anggarannya.

Atas pelaksanaan kegiatan yang menggunakan Hibah, maka Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota wajib menyampaikan laporan secara triwulanan kepada Menteri Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan BNPB dalam hal ini Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Laporan triwulan menyajikan informasi mengenai kemajuan pelaksanaan pekerjaan, penyerapan anggaran, permasalahan dan kendala yang dihadapi dan alternatif solusi yang sudah dilaksanakan maupun yang masih perlu dilaksanakan.

E. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi secara umum merujuk pada peraturan yang berlaku mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan yang mencakup tahapan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan. Pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana diperlukan sebagai upaya pengendalian proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Sementara itu, evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan dalam rangka menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran serta manfaat kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.



Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana mengatur bahwa pelaporan keuangan penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN dan APBD dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Dalam peraturan pemerintah ini juga diatur bahwa sistem akuntansi dana penanggulangan bencana yang bersumber dari masyarakat dilakukan sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Untuk mengevaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, digunakan lima indikator yaitu:

1. konsistensi pelaksanaan kebijakan dan strategi pemulihan, kegiatan prioritas, dan pendanaan dengan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi;
2. koordinasi antara pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat yang menghasilkan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran;
3. partisipasi melalui mekanisme konsultasi yang menjaring aspirasi masyarakat penerima manfaat;
4. kapasitas lembaga pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi dalam perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi melalui laporan keuangan dan laporan kinerja, serta kapasitas pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
5. potensi keberlanjutan dalam kerangka pembangunan jangka menengah dan jangka panjang.

Proses pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan secara berkala diyakini dapat memunculkan dinamisasi data kebutuhan yang bergerak sesuai kondisi mutakhir di lapangan. Hal ini terkait erat dengan jarak waktu yang cukup panjang antara perencanaan dan pelaksanaan program, sehingga data kebutuhan akan bergerak dinamis sesuai dengan respons

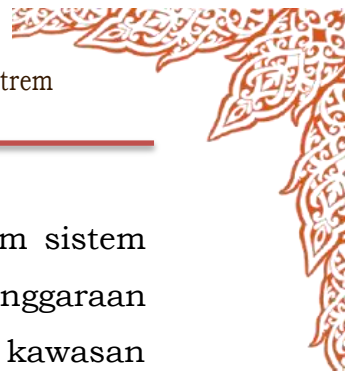


masyarakat dan para pihak. Untuk itu diperlukan mekanisme tertentu yang dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan guna menjawab dinamisasi kebutuhan yang dimaksud.

F. Kestinambungan Pemulihan Pascabencana Berbasis PRB

Setelah pelaksanaan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi ini, perlu disusun strategi kebijakan yang dikaitkan dengan siklus perencanaan dan penganggaran reguler guna memastikan kestinambungan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam pembangunan “normal” sesuai kewenangan instansi terkait. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pemerintah daerah juga perlu mengupayakan untuk melaksanakan:

1. Perencanaan penanggulangan bencana melalui pengenalan dan pengkajian ancaman bencana, melakukan kajian analisis risiko bencana, melakukan analisis kerentanan dan kapasitas daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana, identifikasi tindakan pengurangan risiko bencana, dan penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB);
2. Pengurangan faktor-faktor penyebab risiko bencana melalui pengendalian dan pelaksanaan penataan ruang dengan mengkaji ulang tata ruang dan wilayah berbasis mitigasi bencana, pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam RPJMD, RKPD, RKA dan DPA OPD, serta RTRW.
3. Dengan adanya kejadian bencana banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrem di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025, diharapkan pemerintah daerah melakukan kajian ulang terhadap RTRW daerah terdampak;
4. Penelitian, pendidikan, dan pelatihan penanggulangan bencana dan kesiapsiagaan melalui penyelenggaraan



pendidikan pengurangan risiko bencana ke dalam sistem pendidikan formal dan informal dan penyelenggaraan penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat di kawasan rawan bencana;

5. Berdasarkan potensi bencana, pencegahan, dan pengurangan risiko bencana, mengendalikan pemanfaatan ruang dan wilayah melalui mekanisme perizinan dan persyaratan teknis pembangunan sesuai kewenangan lembaga yang terkait;
6. Mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana secara memadai dari APBD



BAB VI

PENUTUP

A. Aspek Legal Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

Rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrem di Kabupaten Lima Puluh Kota telah disepakati bersama oleh kementerian/lembaga dan Pemerintah daerah melalui serangkaian proses koordinasi dan konsultasi. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana harus berpedoman pada rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrem di Kabupaten Lima Puluh Kota yang ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah.

Dengan pertimbangan bahwa sebagian pendanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana bersumber dari APBN, maka pelaksanaan kegiatannya berpedoman pada peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4732);



3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
6. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023-2043;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026.



B. Jangka Waktu Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Jangka waktu rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrem Kabupaten Lima Puluh Kota dilaksanakan dalam kurun waktu 3 (Tiga) Tahun sejak dokumen ditetapkan.

C. Aspek Akuntabilitas Pelaksanaan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi

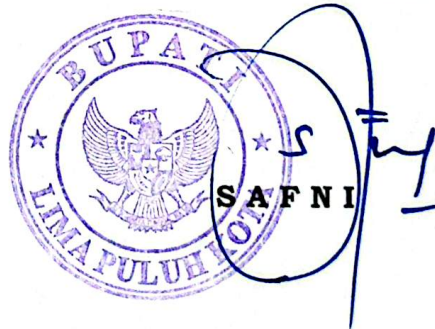
Dalam kerangka pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, pengawasan internal dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan pengawasan eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta lembaga pengawasan yang lain. Informasi tentang perencanaan, penganggaran dan laporan penggunaan anggaran harus dapat diakses oleh masyarakat dan dipublikasikan di media-media publik. Pemerintah perlu mengatur agar pengelolaan bantuan masyarakat memiliki laporan keuangan yang memenuhi standar.

Untuk memfasilitasi penyaluran bantuan masyarakat pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, pemerintah daerah melalui BPBD provinsi Sumatera Barat dan BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota mengacu pada rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrem di Kabupaten Lima Puluh Kota.

D. Aspek Pengakhiran Masa Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Setelah berakhirnya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrem di Kabupaten Lima Puluh Kota, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota harus segera menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana secara lengkap kepada BNPB. Selanjutnya, kegiatan koordinasi pembangunan di daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai ketentuan perundang- undangan yang berlaku.

BUPATI LIMA PULUH KOTA,



**PENILAIAN KERUSAKAN DAN KERUGIAN PASCABENCANA BANJIR, TANAH LONGSOR DAN CUACA EKSTREM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2025**

Sektor / Sub Sektor	Sarana dan Prasarana	Lokasi (Kecamatan/ Desa)	Data Kerusakan				Luas/ Jumlah Rata2	Harga Satuan (Rp)	Nilai Kerusakan (Rp.)			Perkiraan Kerusakan (Rp)	Prakiraan Kerugian (Rp)	Total Kerusakan dan Kerugian (Rp)	Keterangan
			Berat	Sedang	Ringan	Satuan			Berat	Sedang	Ringan				
PERUMAHAN												24.664.066.415	14.326.238.900	38.990.305.315	
1. Rumah			340	41	72							24.201.967.415	14.326.238.900	38.528.206.315	
	A. Rumah Non Relokasi		0	41	72							1.575.464.615	1.466.331.000	3.041.795.615	
		Kecamatan Gunung Omeh	0	0	12	Unit	53,67	1.500.000			75.600.000	75.600.000	83.160.000	158.760.000	
			0	28	16	Unit	42,7	1.500.000		627.690.000	170.130.000	797.820.000	710.399.500	1.508.219.500	
			0	0	15	Unit	38	1.500.000			59.325.000	59.325.000	65.077.500	124.402.500	
		Kecamatan Bukit Barisan	0	2	11	Unit	53	1.500.000		63.200.000	70.320.000	133.520.000	102.036.000	235.556.000	
			0	0	2	Unit	67	1.500.000			19.950.000	19.950.000	21.900.000	41.850.000	
			0	11	15	Unit	42,70	1.500.000		224.044.615	262.805.000	486.849.615	483.493.000	970.342.615	
		Kecamatan Guguk	0	0	1	Unit	20	1.500.000			2.400.000	2.400.000	265.000	2.665.000	
	B. Rumah Relokasi		340	0	0							22.626.502.800	12.859.907.900	35.486.410.700	
		Kecamatan Gunung Omeh	Relokasi Pada Satu Kawasan	196											
			Nagari Koto Tinggi	196	0	0	Unit	69	1.500.000	14.504.490.000		14.504.490.000	8.087.730.900	22.592.220.900	
			Relokasi Mandiri	72											
			Nagari Pandam Gadang	6	0	0	Unit	54	1.500.000	347.700.000		347.700.000	382.470.000	730.170.000	
			Nagari Koto Tinggi	65	0	0	Unit	49,76	1.500.000	3.468.894.000		3.468.894.000	1.895.843.000	5.364.737.000	
			Nagari Talang Anau	1	0	0	Unit	42	1.500.000	44.730.000		44.730.000	48.510.000	93.240.000	
		Kecamatan Bukit Barisan	Relokasi Pada Satu Kawasan	44											
			Nagari Baruah Gunung	44	0	0	Unit	55,16	1.500.000	2.657.608.800		2.657.608.800	1.134.580.000	3.792.188.800	
			Relokasi Mandiri	27											
			Nagari Baruah Gunung	18	0	0	Unit	59	1.500.000	1.162.890.000		1.162.890.000	1.116.898.000	2.279.788.000	
			Nagari KotoTangah	1	0	0	Unit	58	1.500.000	63.510.000		63.510.000	12.936.000	76.446.000	
			Nagari Sungai Naniang	6	0	0	Unit	38	1.500.000	249.660.000		249.660.000	154.000.000	403.660.000	
			Nagari Barja Loweh	2	0	0	Unit	40	1.500.000	87.600.000		87.600.000	21.000.000	108.600.000	
		Kecamatan Suliki	Relokasi Mandiri	1											
			Nagari Suliki	1	0	0	Unit	36	1.500.000	39.420.000		39.420.000	5.940.000	45.360.000	
2. Prasarana Lingkungan												462.099.000	-	462.099.000	
	A. Jalan Lingkungan											462.099.000	-	462.099.000	
		1. Jalan Tanjung Haro-Bukik Runciang	Gunuang Omeh/Koto Tinggi	20			meter	1.100.000	16.060.000			16.060.000		16.060.000	
		2. Jalan Pasia - Lubuak Aua	Gunuang Omeh/Koto Tinggi	25			meter	1.100.000	20.075.000			20.075.000		20.075.000	
		3. Jalan Sungai Dadok Mudiak Nama	Gunuang Omeh/Koto Tinggi	30			meter	1.100.000	24.090.000			24.090.000		24.090.000	
		4. Jalan Lubuak Aua Bukit Pinang	Gunuang Omeh/Koto Tinggi	40			meter	1.100.000	32.120.000			32.120.000		32.120.000	
		5. Jalan Dalam Kampuang Lubuak Aua	Gunuang Omeh/Koto Tinggi	50			meter	1.100.000	40.150.000			40.150.000		40.150.000	

	6	Jalan Ateh Data Bukit Runciang 1	Gunuang Omeh/Koto Tinggi		6		meter		1.100.000		3.300.000		3.300.000		3.300.000	
	7	Jalan Ateh Data Bukit Runciang 2	Gunuang Omeh/Koto Tinggi	8			meter		1.100.000	6.424.000			6.424.000		6.424.000	
	8	Jalan Sunai Siriah - Bukit Runciang 1	Gunuang Omeh/Koto Tinggi		7		meter		1.100.000		3.850.000		3.850.000		3.850.000	
	9	Jalan Sunai Siriah - Bukit Runciang 2	Gunuang Omeh/Koto Tinggi		20		meter		1.100.000		11.000.000		11.000.000		11.000.000	
	10	Jalan Pitopang Tobek Godang	Gunuang Omeh/Koto Tinggi		20		meter		1.100.000		11.000.000		11.000.000		11.000.000	
	11	Jalan Kampuang Muaro Domang	Gunuang Omeh/Koto Tinggi		15		meter		1.100.000		8.250.000		8.250.000		8.250.000	
	12	Jalan Kampuang Baru Lokuang	Gunuang Omeh/Koto Tinggi		10		meter		1.100.000		5.500.000		5.500.000		5.500.000	
	13	Jalan Jambak Solok	Gunuang Omeh/Koto Tinggi		10		meter		1.100.000		5.500.000		5.500.000		5.500.000	
	14	Jalan Titian Barayun Pitopang	Gunuang Omeh/Koto Tinggi	30			meter		1.100.000	24.090.000			24.090.000		24.090.000	
	15	Jalan Kampuang Melayu Jalan Kampuang Balai	Gunuang Omeh/Koto Tinggi		15		meter		1.100.000		8.250.000		8.250.000		8.250.000	
	16	Jalan Lingkung Sungai Dadok	Gunuang Omeh/Koto Tinggi		30		meter		1.100.000		16.500.000		16.500.000		16.500.000	
	17	Jalan Simp. Guguak Menuju Masjid Darussalam 1	Bukik Barisan/Baruah Gunuang	100			meter		1.100.000	80.300.000			80.300.000		80.300.000	
	18	Jalan Simp. Guguak Menuju Masjid Darussalam 2	Bukik Barisan/Baruah Gunuang	30			meter		1.100.000	24.090.000			24.090.000		24.090.000	
	19	Jalan Simp. Cubodak Menuju Bukit Kambuk	Bukik Barisan/Baruah Gunuang		75		meter		1.100.000		41.250.000		41.250.000		41.250.000	
	20	Jalan Lingkar Bigau	Bukik Barisan/Baruah Gunuang	100			meter		1.100.000	80.300.000			80.300.000		80.300.000	
INFRASTRUKTUR													551.344.371.399	352.397.315.630	903.741.687.029	
1 Transportasi													543.472.695.999	349.137.060.630	892.609.756.629	
A. Transportasi Darat													543.472.695.999	349.137.060.630	892.609.756.629	
1 Jalan Kabupaten													378.058.346.000	75.611.668.200	453.670.015.200	
	1	Sulki - Sp.Sei.Dadok (R-027)	Gunuang Omeh/ Koto Tinggi	5.400			meter		3.500.000	18.900.000.000			18.900.000.000	3.780.000.000	22.680.000.000	
	2	Koto Tinggi - Sp. Sei.Dadok (R-022)	Gunuang Omeh/ Koto Tinggi	4.528,6			meter		3.499.978	15.850.000.000			15.850.000.000	3.170.000.000	19.020.000.000	
	3	Bukt Kambuk - Banda Raik (R-101)	Bukik Barisan/ Baruah Gunuang	3.314,3			meter		3.499.985	11.600.000.000			11.600.000.000	2.320.000.000	13.920.000.000	
	4	Koto Kociak - Jopang (R-076)	Guguak/ Guguak VII Koto	4.714,3			meter		3.499.989	16.500.000.000			16.500.000.000	3.300.000.000	19.800.000.000	
	5	Maek - Tanjung Bungo (R-080)	Bukik Barisan/ Maek	5.150			meter		3.553.398	18.300.000.000			18.300.000.000	3.660.000.000	21.960.000.000	
	6	Jalan Jorong Lombah - Ateh Koto	Sulki/ Sulki	857			meter		3.500.583	3.000.000.000			3.000.000.000	600.000.000	3.600.000.000	
	7	Sp. Sei Ipuh - Ampalu (R-125)	Lareh Sago Halaban/ Ampalu	4.500			meter		2.500.000	11.250.000.000			11.250.000.000	2.250.000.000	13.500.000.000	
	8	Plobang - Koto Panjang (R-007)	Payakumbuh/ Plobang	3.100			meter		2.864.075	8.878.632.000			8.878.632.000	1.775.726.400	10.654.358.400	
	9	Koto Baru - Bukit Apik (R-006)	Payakumbuh/ Koto Baru	4.300			meter		3.063.633	13.173.620.000			13.173.620.000	2.634.724.000	15.808.344.000	
	10	Batu Hampa - Suyan (R-015)	Akabilur/ Batu Hampa	11.700			meter		2.893.346	33.852.148.000			33.852.148.000	6.770.429.600	40.622.577.600	
	11	Tarok - Andaleh (R-043)	Luak/ Andaleh	2.500			meter		2.573.254	6.433.136.000			6.433.136.000	1.286.627.200	7.719.763.200	
	12	Andaleh - Taram (R-044)	Luak/ Andaleh	2.400			meter		2.404.654	5.771.170.000			5.771.170.000	1.154.234.000	6.925.404.000	
	13	Jembatan Harau - Solok Bio-Bio (R-051)	Harau/ Solok Bio-Bio	2.400			meter		2.543.315	6.103.957.000			6.103.957.000	1.220.791.400	7.324.748.400	
	14	Sp. AndiAng - Maek (R-029)	Bukik Barisan/ Maek	3.300			meter		2.773.009	9.150.931.000			9.150.931.000	1.830.186.200	10.981.117.200	
	15	Suyan - Siamang Bunyi (R-107)	Akabilur/ Suyan	5.500			meter		2.776.796	15.272.376.000			15.272.376.000	3.054.475.200	18.326.851.200	
	16	Koto Ronah - Lubuak Tabuan (R-187)	Pangkalan/ Pangkalan	11.100			meter		6.150.665	68.272.376.000			68.272.376.000	13.654.475.200	81.926.851.200	
	17	Sarilamak - KOMPI Unit (R- 214)	Harau/ Sarilamak	1.100			meter		2.500.000	2.750.000.000			2.750.000.000	550.000.000	3.300.000.000	
	18	KOMPI Unit -Lubuak Batingkok (R-057)	Harau/ Sarilamak	4.500			meter		2.500.000	11.250.000.000			11.250.000.000	2.250.000.000	13.500.000.000	
	19	sei data - Koto Tinggi (R-223)	Harau/ Harau	3.300			meter		2.500.000	8.250.000.000			8.250.000.000	1.650.000.000	9.900.000.000	
	20	Mangghin - Bts Kota Payakumbuh (R-105)	Situjuh Limo Nagari/ Situjuh Gadang	2.500			meter		2.500.000	6.250.000.000			6.250.000.000	1.250.000.000	7.500.000.000	
	21	Tanjung Haro - Situjuh Gadang (R-042)	Situjuh Limo Nagari/ Situjuh Gadang	8.700			meter		2.500.000	21.750.000.000			21.750.000.000	4.350.000.000	26.100.000.000	
	22	Siamang Bunyi - Mudiak Liki (R-021)	Guguak/ Kubang	4.400			meter		2.500.000	11.000.000.000			11.000.000.000	2.200.000.000	13.200.000.000	
	23	Muaro - Talang Anau (R-026)	Gunuang Omeh/ Talang Anau	2.200			meter		2.500.000	5.500.000.000			5.500.000.000	1.100.000.000	6.600.000.000	
	24	Lakuang - Luak Begak (R-185)	Gunuang Omeh/ Koto Tinggi	2.400			meter		2.500.000	6.000.000.000			6.000.000.000	1.200.000.000	7.200.000.000	

25	Bukik Apik Luak Begak - Talang Anau (R-149)	Gunuang Omeh/ Koto Tinggi	2.400		meter	2.500.000	6.000.000.000		6.000.000.000	1.200.000.000	7.200.000.000	
26	Jalan Jorong Padang Tengah Baruah Gunuang	Bukik Barisan/ Baruah Gunuang	1.000		meter	2.000.000	2.000.000.000		2.000.000.000	400.000.000	2.400.000.000	
27	Jalan Jorong Banda Raik	Bukik Barisan/ Baruah Gunuang	1.000		meter	2.000.000	2.000.000.000		2.000.000.000	400.000.000	2.400.000.000	
28	Jalan Tungkar - Simbatak (R-063)	Situjuh Limo Nagari/ Tungkar	4.500		meter	2.500.000	11.250.000.000		11.250.000.000	2.250.000.000	13.500.000.000	
29	Simpang Kubang - Siamang Bunyi (R-074)	Gugua/ Kubang	1.500		meter	2.500.000	3.750.000.000		3.750.000.000	750.000.000	4.500.000.000	
30	Hulu Ala - Landai (R-088)	Harau/ Harau	286		meter	3.496.503	1.000.000.000		1.000.000.000	200.000.000	1.200.000.000	
31	Sp. Sei Mangkirai - Sei Mangkirai (R-106)	Gunuang Omeh/ Pandam Gadang	2.500		meter	2.500.000	6.250.000.000		6.250.000.000	1.250.000.000	7.500.000.000	
32	Subarang Parik - Padang Siantah (R-098)	Akabilun/ Koto Tengah Batu Hampa	1.500		meter	2.500.000	3.750.000.000		3.750.000.000	750.000.000	4.500.000.000	
33	Jalan Monumen menuju Huitap	Gunuang Omeh/ Koto Tinggi	1.500		meter	3.333.333	5.000.000.000		5.000.000.000	1.000.000.000	6.000.000.000	
34	Rogeh - Sibaladuang (R-117)	Luak/ Sungai Kamuyang	1.200		meter	1.666.667	2.000.000.000		2.000.000.000	400.000.000	2.400.000.000	
2	Jalan Provinsi								30.453.061.439	234.808.902.868	265.261.964.307	
1	Bts. Payakumbuh Tinggi Sulki-Koto (P.069.1)	Kab. Lima Puluh Kota		2.500	meter	6.000.000		15.000.000.000	15.000.000.000	215.280.641.429	230.280.641.429	
2	Pangkalan Sialang Gelugur (P.076)	Kab. Lima Puluh Kota		2.575	meter	6.001.189		15.453.061.439	15.453.061.439	19.528.261.439	34.981.322.878	
3	Jembatan Kabupaten								22.960.000.000	4.592.000.000	27.552.000.000	
1	Jembatan Kubang Balambak	Mungka/ Simpang Kapuak	6		meter	83.333.333	500.000.000		500.000.000	100.000.000	600.000.000	
2	Jembatan Nenani	Bukik Barisan/ Maek	28		meter	20.000.000	560.000.000		560.000.000	112.000.000	672.000.000	
3	Jembatan Mudiak Nyinyang	Kapur IX/ Koto Lamo	8		meter	100.000.000	800.000.000		800.000.000	160.000.000	960.000.000	
4	Jembatan Lubuak Jao	Kapur IX/ Koto Lamo	25		meter	150.000.000	3.750.000.000		3.750.000.000	750.000.000	4.500.000.000	
5	Jembatan Mudiak Pangan	Kapur IX/ Koto Lamo	15		meter	150.000.000	2.250.000.000		2.250.000.000	450.000.000	2.700.000.000	
6	Jembatan Sederhana Kubu Betung - TK	Kapur IX/ Koto Lamo	17		meter	150.000.000	2.550.000.000		2.550.000.000	510.000.000	3.060.000.000	
7	Jembatan Mudiak Tugu	Kapur IX/ Koto Lamo	15		meter	150.000.000	2.250.000.000		2.250.000.000	450.000.000	2.700.000.000	
8	Jembatan Puliah	Kapur IX/ Koto Lamo	10		meter	100.000.000	1.000.000.000		1.000.000.000	200.000.000	1.200.000.000	
9	Jembatan Mudiak Kida	Kapur IX/ Koto Lamo	14		meter	150.000.000	2.100.000.000		2.100.000.000	420.000.000	2.520.000.000	
10	Jembatan Mudiak Kulik	Kapur IX/ Koto Lamo	12		meter	100.000.000	1.200.000.000		1.200.000.000	240.000.000	1.440.000.000	
11	Jembatan Jorong Koto Tinggi Rumah Lim	Kapur IX/ Koto Lamo	10		meter	100.000.000	1.000.000.000		1.000.000.000	200.000.000	1.200.000.000	
12	Jembatan Sei Iago	Kapur IX/ Koto Lamo	10		meter	100.000.000	1.000.000.000		1.000.000.000	200.000.000	1.200.000.000	
13	Jembatan Sei Pimping	Kapur IX/ Koto Lamo	10		meter	100.000.000	1.000.000.000		1.000.000.000	200.000.000	1.200.000.000	
14	Jembatan Dalam Kampuang Muaro	Gunuang Omeh/ Koto Tinggi	10		meter	50.000.000	500.000.000		500.000.000	100.000.000	600.000.000	
15	Jembatan Pitopang	Gunuang Omeh/ Koto Tinggi	10		meter	50.000.000	500.000.000		500.000.000	100.000.000	600.000.000	
16	Jembatan Mudiak Dodok	Gunuang Omeh/ Koto Tinggi	10		meter	50.000.000	500.000.000		500.000.000	100.000.000	600.000.000	
17	Jembatan Sipinang	Gunuang Omeh/ Koto Tinggi	10		meter	50.000.000	500.000.000		500.000.000	100.000.000	600.000.000	
18	Jembatan Titian Berayun	Gunuang Omeh/ Koto Tinggi	10		meter	50.000.000	500.000.000		500.000.000	100.000.000	600.000.000	
19	Jembatan Jorong Koto Tinggi II Maek	Gunuang Omeh/ Koto Tinggi	10		meter	50.000.000	500.000.000		500.000.000	100.000.000	600.000.000	
4	Jembatan Gantung								102.440.000.000	20.488.000.000	122.928.000.000	
1	Jembatan Pauah Sangik	Akabilun/ Pauah Sangik	52		meter	81.538.462	4.240.000.000		4.240.000.000	848.000.000	5.088.000.000	
2	Jembatan Ateh Koto Nagari Sungai Rimbang	Sulki/ Sungai Rimbang	40		meter	100.000.000	4.000.000.000		4.000.000.000	800.000.000	4.800.000.000	
3	Jembatan Jorong Mudiak Liki	Sulki/ Kurai	40		meter	80.000.000	3.200.000.000		3.200.000.000	640.000.000	3.840.000.000	
4	Jembatan Muaro Jorong Ikan Banyak	Gunuang Omeh/ Pandam Gadang	15		meter	80.000.000	1.200.000.000		1.200.000.000	240.000.000	1.440.000.000	
5	Jembatan Ujuang Labuah Tungkar	Situjuh Limo Nagari/ Tungka	35		meter	80.000.000	2.800.000.000		2.800.000.000	560.000.000	3.360.000.000	
6	Jembatan Sawah Gadang Bumbuang Situjuh Batua	Situjuh Limo Nagari/ Situjuh Batua	35		meter	80.000.000	2.800.000.000		2.800.000.000	560.000.000	3.360.000.000	
7	Jembatan Sariak Laweh	Akabilun/ Sariak Laweh	84		meter	50.000.000	4.200.000.000		4.200.000.000	840.000.000	5.040.000.000	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	C. Drainase										275.794.000	-	275.794.000	
	1	Gorong-gorong jalan sarilamak	Herau/ Sarilamak	30		meter		7.749.667	232.490.000		232.490.000	-	232.490.000	
	2	Drainase Jalan Purwajaya	Herau/ Sarilamak	1.700		meter		25.473	43.304.000		43.304.000	-	43.304.000	
	D. Bendung										3.491.704.000	150.000.000	3.641.704.000	
	1	D.I Banda Kina	Bukik Barisan/ Baruah Gunung	13		Meter		49.468.154	643.086.000		643.086.000	30.000.000	673.086.000	
	2	Banda Rumpuk Lunak 1,2,3	Bukik Barisan/ Baruah Gunung	5		Meter		80.512.800	402.564.000		402.564.000	30.000.000	432.564.000	
	3	D.I Kampuang Aua	Bukik Barisan/ Baruah Gunung	14		Meter		114.225.286	1.599.154.000		1.599.154.000	30.000.000	1.629.154.000	
	4	Banda Bigau	Bukik Barisan/ Baruah Gunung	7		Meter		58.290.571	408.034.000		408.034.000	30.000.000	438.034.000	
	5	D.I Banda Polam	Bukik Barisan/ Baruah Gunung	8		Meter		54.858.250	438.866.000		438.866.000	30.000.000	468.866.000	
3 Energi											240.000.000	460.000.000	700.000.000	
	A. Ketenagalistrikan										240.000.000	460.000.000	700.000.000	
		Jaringan Tenaga Listrik	Gunuang Omeh dan Bukik Barisan	1		set		240.000.000	240.000.000		240.000.000	460.000.000	700.000.000	
4 Air dan Sanitasi											937.538.400	-	937.538.400	
	A. Sarana Air Bersih										937.538.400		937.538.400	
	1	Intake Pamsimas Banda Rait	Bukit Barisan/ Baruah Gunung	12		m²		3.333.333	40.000.000		40.000.000		40.000.000	
	2	Pipa Pamsimas Batu Sodah	Gunuang Omeh/ Koto Tinggi	150		meter		65.600	9.840.000		9.840.000		9.840.000	
	3	PAMSIMAS Nagari Pandam Gadang	Gunuang Omeh/ Pandam Gadang	200		meter		115.400	23.080.000		23.080.000		23.080.000	
	4	Bak Reservoir SPAM Batu Hampa	Akabilun/ Batu Hampa	1		Unit		340.000.000	340.000.000		340.000.000		340.000.000	
	5	SPAM IKK Tugu Bela Negara Unit Sulki	Gunuang Omeh/ Koto Tinggi	48		m²		10.929.550	524.618.400		524.618.400		524.618.400	
5 Fasilitas Keselamatan Jalan (Rambu-rambu, PJU, Marka Jalan)											880.255.000	880.255.000	1.760.510.000	
	A. Rambu-Rambu										18.380.000	18.380.000	36.760.000	
	1	RAMBU LALU LINTAS UK: 75 CM X 75 CM	Kec. HARAUI Kel. SARILAMAK Lokasi : R.036 Batas Riau-Batas Kota Payakumbuh	20		Unit		919.000	18.380.000		18.380.000	18.380.000	36.760.000	
	B. PJU										861.875.000	861.875.000	1.723.750.000	
	1	ALAT PENERANGAN JALAN (APJ) SOLAR CEL	Kec. PANGKALAN KOTO BARU Kel. TANJUANG BALIK Lokasi : R.036 Batas Riau-Batas Kota Payakumbuh	50		Unit		12.557.500	627.875.000		627.875.000		1.255.750.000	
	2	LAMPU PERINGATAN TENAGA SURYA (WARNING LIGHT SOLAR CELL)	Kec. HARAUI Kel. SARILAMAK Lokasi : R.036 Batas Riau-Batas Kota Payakumbuh	4		Lokasi		58.500.000	234.000.000		234.000.000	234.000.000	468.000.000	
EKONOMI PRODUKTIF											5.733.997.394	1.018.484.099	6.752.481.493	
1. Pertanian											5.042.134.295	395.646.000	5.437.780.295	
	A. Lahan (Sawah)										1.542.642.960	395.646.000	1.938.288.960	
	1	KWT Sarugo	Gunuang Omeh - Koto Tinggi	0,5		Ha		21.000.000	10.500.000		10.500.000	11.860.000	22.360.000	
	2	Harapan Maju	Gunuang Omeh - KOTO TINGGI	1,5		Ha		21.000.000	31.500.000		31.500.000	35.580.000	67.080.000	
	3	Hidup Bersama	Gunuang Omeh - KOTO TINGGI	0,2		Ha		21.000.000	4.200.000		4.200.000	4.745.000	8.945.000	
	4	Pucauk Mudo	Gunuang Omeh - KOTO TINGGI	1,2		Ha		21.000.000	25.200.000		25.200.000	28.465.000	53.665.000	
	5	Harapan Baru	Gunuang Omeh - KOTO TINGGI	2,47		Ha		21.000.000	51.870.000		51.870.000	58.590.000	110.460.000	
	6	Saiyo Sakato	Gunuang Omeh - KOTO TINGGI	0,3		Ha		21.000.000	6.300.000		6.300.000	7.116.000	13.416.000	
	7	Bina Tari	Gunuang Omeh - KOTO TINGGI	8,4		Ha		21.000.000	176.400.000		176.400.000	199.240.000	375.640.000	
	8	Tunggak Lansie	Gunuang Omeh - KOTO TINGGI	0,2		Ha		21.000.000	4.200.000		4.200.000	4.745.000	8.945.000	
	9	Pinang Balirik	Gunuang Omeh - KOTO TINGGI	1,91		Ha		21.000.000	40.110.000		40.110.000	45.305.000	85.415.000	
	10	Keltan Bundo Saiyo	Gunuang Omeh - KOTO TINGGI		2,58	Ha		20.000.000		51.600.000	51.600.000		51.600.000	
	11	Perintis	Gunuang Omeh - KOTO TINGGI		1,05	Ha		20.000.000		21.000.000	21.000.000		21.000.000	
	12	KWT Kanuro	Gunuang Omeh - KOTO TINGGI		0,97	Ha		20.000.000		19.400.000	19.400.000		19.400.000	
	13	Keltan Satampang Baniah	Gunuang Omeh - KOTO TINGGI		1,65	Ha		20.000.000		33.000.000	33.000.000		33.000.000	
	14	Keltan Nusa Indah	Gunuang Omeh - KOTO TINGGI		1,66	Ha		20.000.000		33.200.000	33.200.000		33.200.000	
	15	Keltan Amanah	Gunuang Omeh - KOTO TINGGI		4,31	Ha		20.000.000		86.200.000	86.200.000		86.200.000	

16	Kelompok Tani Gua Imam Borjol	Gunuang Omeh - KOTO TINGGI		3,4		Ha		20.000.000		68.000.000		68.000.000		68.000.000	
17	Poktan Karupak Rigi Batu Komba	Gunuang Omeh - Pandam Gadang		0,48		Ha		20.000.000		9.600.000		9.600.000		9.600.000	
18	Tirta Bening	Bukik Barisan - Baruah Gunuang			2,5	Ha		19.528.000			48.820.000	48.820.000		48.820.000	
19	Keltan Serbaguna	Bukik Barisan - Baruah Gunuang			0,7	Ha		19.528.000			13.669.600	13.669.600		13.669.600	
20	Padang Tengah	Bukik Barisan - Baruah Gunuang			6,5	Ha		19.528.000			126.932.000	126.932.000		126.932.000	
21	Jorong Parontian	Bukik Barisan - Baruah Gunuang			0,5	Ha		19.528.000			9.764.000	9.764.000		9.764.000	
22	Banda Raik	Bukik Barisan - Baruah Gunuang			1,5	Ha		19.528.000			29.292.000	29.292.000		29.292.000	
23	pandam gadang	Gunuang Omeh - Pandam Gadang			0,48	Ha		19.528.000			9.373.440	9.373.440		9.373.440	
24	sungai rimbang	Sulki - Sungai Rimbang			0,34	Ha		19.528.000			6.639.520	6.639.520		6.639.520	
25	Mungo	Luak - Mungo			5,25	Ha		19.528.000			102.522.000	102.522.000		102.522.000	
26	andaleh	Luak - ANDALEH			5	Ha		19.528.000			97.640.000	97.640.000		97.640.000	
27	taram	Harau - Taram			8,3	Ha		19.528.000			162.082.400	162.082.400		162.082.400	
28	balai panjang	Lareh Sago Halaban - Balai Panjang			11,5	Ha		19.528.000			224.572.000	224.572.000		224.572.000	
29	pintu koto	Harau - Bukik Limbuku			0,5	Ha		19.528.000			9.764.000	9.764.000		9.764.000	
30	seberang air	Lareh Sago Halaban - Batu Payuang			1,5	Ha		19.528.000			29.292.000	29.292.000		29.292.000	
B. Lahan (Non Sawah)												1.036.400.000	-	1.036.400.000	
1	Baruah Gunuang II	Bukik Barisan - Baruah Gunuang			2,5	Ha		80.000.000			200.000.000	200.000.000		200.000.000	
2	koto tinggi	Gunuang Omeh - KOTO TINGGI			2	Ha		30.000.000			60.000.000	60.000.000		60.000.000	
3	sei rimbang	Sulki - Sungai Rimbang			0,12	Ha		100.000.000			12.000.000	12.000.000		12.000.000	
4	sungai rimbang	Sulki - Sungai Rimbang			0,18	Ha		30.000.000			5.400.000	5.400.000		5.400.000	
5	koto talago	Guguak - Villi Koto Talago			1	Ha		30.000.000			30.000.000	30.000.000		30.000.000	
6	mungka	Mungka - Mungka			10	Ha		30.000.000			300.000.000	300.000.000		300.000.000	
7	balai panjang	Lareh Sago Halaban - Balai Panjang			10	Ha		30.000.000			300.000.000	300.000.000		300.000.000	
8	koto malintang	Harau - Bukik Limbuku			4,3	Ha		30.000.000			129.000.000	129.000.000		129.000.000	
C. Sarana dan Prasarana Pertanian												1.950.000.000	-	1.950.000.000	
1	Jembatan Mudiak Dadok	Gunuang Omeh - KOTO TINGGI	5			meter		30.000.000	150.000.000			150.000.000		150.000.000	
2	jembatan sipinang	Gunuang Omeh - KOTO TINGGI	5			meter		30.000.000	150.000.000			150.000.000		150.000.000	
3	Jembatan Titian Barayun	Gunuang Omeh - KOTO TINGGI	5			meter		30.000.000	150.000.000			150.000.000		150.000.000	
4	Jembatan Pasia	Gunuang Omeh - KOTO TINGGI	5			meter		30.000.000	150.000.000			150.000.000		150.000.000	
5	Jembatan Talao	Gunuang Omeh - KOTO TINGGI	5			meter		30.000.000	150.000.000			150.000.000		150.000.000	
6	Jembatan Pitopang	Gunuang Omeh - KOTO TINGGI	5			meter		30.000.000	150.000.000			150.000.000		150.000.000	
7	jembatan dalam kampung	Gunuang Omeh - KOTO TINGGI	5			meter		30.000.000	150.000.000			150.000.000		150.000.000	
8	jembatan tanjung	Gunuang Omeh - KOTO TINGGI	5			meter		30.000.000	150.000.000			150.000.000		150.000.000	
9	Jembatan Tadah	Gunuang Omeh - KOTO TINGGI	5			meter		30.000.000	150.000.000			150.000.000		150.000.000	
10	Jembatan Kelok Aua	Gunuang Omeh - KOTO TINGGI	5			meter		30.000.000	150.000.000			150.000.000		150.000.000	
11	Jembatan Jorong Aia Angek	Gunuang Omeh - KOTO TINGGI	5			meter		30.000.000	150.000.000			150.000.000		150.000.000	
12	Jembatan Batang Siraduak	Gunuang Omeh - KOTO TINGGI	5			meter		30.000.000	150.000.000			150.000.000		150.000.000	
13	Jembatan Rambek	Mungka - Mungka	5			meter		30.000.000	150.000.000			150.000.000		150.000.000	
D. Tanaman Hortikultura (komoditi)												513.091.335	-	513.091.335	
1	komoditi - mentimun	Gunuang Omeh - KOTO TINGGI	3			Ha		171.030.445	513.091.335			513.091.335		513.091.335	

2 Pangan												5.700.000	3.000.000	8.700.000	
	1 Rumah Bibit	Pangkalan Koto Baru-Manggilang	1			Unit	60 m3	5.700.000	5.700.000			5.700.000	3.000.000	8.700.000	
3 Perikanan												-	24.375.000	24.375.000	
	1 Ikan nila ukuran 8 ekor/Kg sebanyak 1500 ekor	Jorong Lubuk Aua, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh											4.687.500	4.687.500	
	2 Ikan nila ukuran 8 ekor/Kg sebanyak 1800 ekor	Jorong Lakuang, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh											5.625.000	5.625.000	
	3 Ikan nila ukuran 8 ekor/Kg sebanyak 4500 ekor	Jorong Sei Dadok, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh											14.062.500	14.062.500	
4 Perindustrian												426.000.000	360.000.000	786.000.000	
	1 Dapur produksi IKM Keripik Ubi Zeshermi	Batu Balabuah I/Sungai Naniang		1	unit		24.000.000			24.000.000		24.000.000	2.000.000	26.000.000	
	2 Dapur Produksi IKM Keripik Ubi Ardianto	Pematang aur/sungai Naniang	1		unit		9.000.000	9.000.000				9.000.000	15.000.000	24.000.000	
	3 Dapur Produksi IKM Jualan Kue Hadiyatul Fitri	Pematang Aur / Sungai Naniang	1		unit		12.500.000	12.500.000				12.500.000	30.000.000	42.500.000	
	4 Dapur Produksi IKM Gula Aren Ardi Saputra	Kaampung Cibodak / Koto Tinggi	1		unit		110.000.000	110.000.000				110.000.000	23.000.000	133.000.000	
	5 Hüller Renggi Andoza Putra	Lubuk Aua / Koto Tinggi		1	unit		90.000.000		90.000.000			90.000.000	5.000.000	95.000.000	
	6 Dapur Produksi IKM Gula Aren Anizar	Lubuk Aua / Koto Tinggi		1	unit		25.000.000		25.000.000			25.000.000	5.000.000	30.000.000	
	7 Dapur Produksi IKM Gula Aren Abasri	Aia Angek / Koto Tinggi	1		unit		5.000.000	5.000.000				5.000.000	10.000.000	15.000.000	
	8 Tempat Porduksi IKM Perabot Renggi Andoza Putra	Lubuk Aua / Koto Tinggi		1	unit		8.000.000		8.000.000			8.000.000	5.000.000	13.000.000	
	9 Dapur Produksi IKM Gula Aren Zainal Arifin	Aia Angek / Koto Tinggi	1		unit		5.000.000	5.000.000				5.000.000	10.000.000	15.000.000	
	10 Dapur Produksi IKM Gula Aren Samsurizal	Aia Angek / Koto Tinggi	1		unit		5.000.000	5.000.000				5.000.000	10.000.000	15.000.000	
	11 Dapur Produksi IKM Gula Aren Elfia Oslfi	Aia Angek / Koto Tinggi	1		unit		5.000.000	5.000.000				5.000.000	10.000.000	15.000.000	
	12 Dapur Produksi IKM Gula Aren Joni Yulandri	Aia Angek / Koto Tinggi	1		unit		5.000.000	5.000.000				5.000.000	10.000.000	15.000.000	
	13 Dapur Produksi IKM Gula Aren Zelma Pondri	Aia Angek / Koto Tinggi	1		unit		5.000.000	5.000.000				5.000.000	10.000.000	15.000.000	
	14 Dapur Produksi IKM Gula Aren Daswir	Aia Angek / Koto Tinggi	1		unit		5.000.000	5.000.000				5.000.000	10.000.000	15.000.000	
	15 Dapur Produksi IKM Gula Aren Arpnedi	Aia Angek / Koto Tinggi	1		unit		5.000.000	5.000.000				5.000.000	10.000.000	15.000.000	
	16 Dapur Produksi IKM Gula Aren Murahman	Aia Angek / Koto Tinggi	1		unit		5.000.000	5.000.000				5.000.000	10.000.000	15.000.000	
	17 Dapur Produksi IKM Gula Aren Saiful Wardi	Aia Angek / Koto Tinggi	1		unit		5.000.000	5.000.000				5.000.000	10.000.000	15.000.000	
	18 Dapur Produksi IKM Gula Aren Darwinis	Aia Angek / Koto Tinggi	1		unit		5.000.000	5.000.000				5.000.000	10.000.000	15.000.000	
	19 Dapur Produksi IKM Gula Aren Mukhlis	Aia Angek / Koto Tinggi	1		unit		5.000.000	5.000.000				5.000.000	10.000.000	15.000.000	
	20 Dapur Produksi IKM Gula Aren Saipulwardi	Aia Angek / Koto Tinggi		1	unit		4.000.000		4.000.000			4.000.000	8.000.000	12.000.000	
	21 Dapur Produksi IKM Gula Aren Syamsul Rizal	Aia Angek / Koto Tinggi		1	unit		4.000.000		4.000.000			4.000.000	8.000.000	12.000.000	
	22 Dapur Produksi IKM Gula Aren Hendri Wijaya	Aia Angek / Koto Tinggi	1		unit		5.000.000	5.000.000				5.000.000	10.000.000	15.000.000	
	23 Dapur Produksi IKM Gula Aren Zainul Akhyiar	Aia Angek / Koto Tinggi	1		unit		5.000.000	5.000.000				5.000.000	10.000.000	15.000.000	
	24 Dapur Produksi IKM Gula Aren Hamitul Zaeфри	Aia Angek / Koto Tinggi	1		unit		5.000.000	5.000.000				5.000.000	10.000.000	15.000.000	
	25 Dapur Produksi IKM Gula Aren Jasri	Aia Angek / Koto Tinggi	1		unit		5.000.000	5.000.000				5.000.000	10.000.000	15.000.000	
	26 Dapur Produksi IKM Gula Aren Hendra Saputra	Aia Angek / Koto Tinggi	1		unit		5.000.000	5.000.000				5.000.000	10.000.000	15.000.000	
	27 Dapur Produksi IKM Gula Aren Suardi	Aia Angek / Koto Tinggi	1		unit		5.000.000	5.000.000				5.000.000	10.000.000	15.000.000	
	28 Dapur Produksi IKM Gula Aren Aldiniswan	Aia Angek / Koto Tinggi		1	unit		4.000.000		4.000.000			4.000.000	8.000.000	12.000.000	
	29 Dapur Produksi IKM Gula Aren Arif Rahman Hakim	Aia Angek / Koto Tinggi	0	1	unit		4.000.000		4.000.000			4.000.000	8.000.000	12.000.000	
	30 Dapur Produksi IKM Gula ArenIvan Viktor Nugroho	Aia Angek / Koto Tinggi		1	unit		3.500.000			3.500.000		3.500.000	7.000.000	10.500.000	
	31 Dapur Produksi IKM Gula Aren Nurjal	Aia Angek / Koto Tinggi	1		unit		5.000.000	5.000.000				5.000.000	10.000.000	15.000.000	
	32 Dapur Produksi IKM Gula Aren Supratman	Aia Angek / Koto Tinggi		1	unit		4.000.000		4.000.000			4.000.000	8.000.000	12.000.000	
	33 Dapur Produksi IKM Gula Aren Sahrlimaridon	Aia Angek / Koto Tinggi		1	unit		4.000.000		4.000.000			4.000.000	8.000.000	12.000.000	
	34 Dapur Produksi IKM Gula Aren Taipul Wardi	Aia Angek / Koto Tinggi	1		unit		5.000.000	5.000.000				5.000.000	10.000.000	15.000.000	
	35 Hüller Inem	Aia Angek / Koto Tinggi		1	unit		20.000.000		20.000.000			20.000.000	20.000.000	40.000.000	

5	Pariwisata												142.020.000	142.020.000	284.040.000	
	1	Spot Foto Ikan Banyak	Gunuang OmeH/Pandam Gadang	2			Spot	5	1.000.000	10.000.000			10.000.000	10.000.000	20.000.000	
	2	Dam trigasi Taman Bermain Anak Lembah harau	Lembah Harau/Kecamatan harau	35			Meter		3.772.000	132.020.000			132.020.000	132.020.000	264.040.000	
6 Koperasi dan UKM												92.000.000	67.300.000	159.300.000		
	1	UMKM Toko Elektronik Halby Azwar	GUNJANG OMEH/Pandam Gadang			1	unit	24	6.000.000			6.000.000	6.000.000	4.000.000	10.000.000	
	2	UMKM Kedai Harien dan Kedai Kopi Ermawilis	GUNJANG OMEH/Pandam Gadang	1			unit	12	10.000.000	10.000.000			10.000.000	6.300.000	16.300.000	
	3	UMKM Kedai Kopi dan Gorengan Ondra Nofendra	GUNJANG OMEH/Pandam Gadang			1	unit	12	6.000.000			6.000.000	6.000.000	3.500.000	9.500.000	
	4	UMKM Lapak Jajanan dan Kedai Kopi Rukria	GUNJANG OMEH/Pandam Gadang	1			unit	12	10.000.000	10.000.000			10.000.000	6.300.000	16.300.000	
	5	UMKM Lapak Jajanan dan Kedai Kopi Deli Masri	GUNJANG OMEH/Pandam Gadang	1			unit	12	10.000.000	10.000.000			10.000.000	6.300.000	16.300.000	
	6	UMKM Lapak Jajanan dan Kedai Kopi Erna	GUNJANG OMEH/Pandam Gadang	1			unit	12	10.000.000	10.000.000			10.000.000	6.300.000	16.300.000	
	7	UMKM Lapak Jajanan dan Kedai Kopi Mutia Gustizon	GUNJANG OMEH/Pandam Gadang	1			unit	12	10.000.000	10.000.000			10.000.000	6.300.000	16.300.000	
	8	UMKM Pedagang Sate dan Kedai Harien Erwina Yoza	GUNJANG OMEH/Pandam Gadang	1			unit	16	10.000.000	10.000.000			10.000.000	6.300.000	16.300.000	
	9	UMKM Pedagang Sate Satria Rici Andila	BUKIK BARISAN/Baruah Gunuang	1			unit	28	10.000.000	10.000.000			10.000.000	15.000.000	25.000.000	
	10	UMKM Kedai Harien Jaswandi	BUKIK BARISAN/Baruah Gunuang	1			unit	20	10.000.000	10.000.000			10.000.000	7.000.000	17.000.000	
7 Hutan												26.143.099	26.143.099	52.286.198		
	1	TWA Sago Malintang	Kec. LAREH SAGO HALABAN Kel. BUKIK SIKUMPA Lokasi : Dalam Kawasan Konservasi	0,012447979			Ha		100.000.000	1.244.797			1.244.797	1.244.797	2.489.594	
	2	SM Rimbang Baling	Kec. LAREH SAGO HALABAN Kel. SITANANG Lokasi : Dalam Kawasan Konservasi	0,09959554			Ha		100.000.000	9.959.554			9.959.554	9.959.554	19.919.108	
	3	SM Rimbang Baling	Kec. HARAUI Kel. TARAM Lokasi : Dalam Kawasan Konservasi	0,118264705			Ha		100.000.000	11.826.470			11.826.470	11.826.470	23.652.940	
	4	SM Rimbang Baling	Kec. LAREH SAGO HALABAN Kel. TARAM Lokasi : Dalam Kawasan Konservasi	0,01867433			Ha		100.000.000	1.867.433			1.867.433	1.867.433	3.734.866	
	5	SM Rimbang Baling	Kec. HARAUI Kel. SARILAMAK Lokasi : Dalam Kawasan Konservasi	0,01244845			Ha		100.000.000	1.244.845			1.244.845	1.244.845	2.489.690	
SOSIAL												16.922.288.000	298.724.400	17.221.012.400		
1. Kesehatan												2.000.000.000	-	2.000.000.000		
	1	Puskesmas Baru Gunung	Kec. Bukik Barisan													
		Plafon Puskesmas dan Gedung Puskesmas				2	m²	86	150.000.000			300.000.000	300.000.000		300.000.000	
		DAM Bangunan Puskesmas				2	m²	167	375.000.000			750.000.000	750.000.000		750.000.000	
		Pencoran Keliling Puskesmas				2	m²	40	50.000.000			100.000.000	100.000.000		100.000.000	
	2	Poskesri Banda Raik (Poskesdes)	Kec. Bukik Barisan										-		-	
		Dam Pengamanan Bangunan				2	m²	67	150.000.000			300.000.000	300.000.000		300.000.000	
		Jalan Cor menuju Poskesri (Retak)				2	m²	20	25.000.000			50.000.000	50.000.000		50.000.000	
		pinggiran Gedung Poskesri				2	m²	75	75.000.000			150.000.000	150.000.000		150.000.000	
	3	Poskesri Batu Balabuah (Poskesdes)	Bukik Barisan/Baruah Gunuang										-		-	
		Retak Dinding Ruang Pelayanan				2	m²	40	50.000.000			100.000.000	100.000.000		100.000.000	
		Tanah Turun dan Retakan di pinggir Gedung				2	m²	22	50.000.000			100.000.000	100.000.000		100.000.000	
	4	Poskesri Pematang Aur (Poskesdes)	Kec. Bukik Barisan										-		-	
		Retak Dinding Ruang Pelayanan				2	m²	72	75.000.000			150.000.000	150.000.000		150.000.000	
2. Pendidikan												14.922.288.000	298.724.400	15.221.012.400		
	1	UPTD SD Negeri 05 Baruah Gunuang	Nagari baruah Gunuang Kecamatan Bukik Barisan													
		Dinding Penahan Tanah				1	m³	90	1.700.000			153.000.000	153.000.000		153.000.000	
	2	UPTD SD Negeri 02 Baruah Gunuang	Nagari baruah Gunuang Kecamatan Bukik Barisan													
		Dinding Penahan Tanah				1	m³	70	1.700.000			119.000.000	119.000.000		119.000.000	
		Pagar Sekolah + Gerbang				1	meter	60	2.500.000			150.000.000	150.000.000		150.000.000	
	3	UPTD SD Negeri 06 Pandam Gadang	Nagari Pandam Gadang Kecamatan Gunuang OmeH													

	Ruang Kelas			3		m²	72	5.000.000		1.080.000.000		1.080.000.000		1.080.000.000	
	Ruang Guru			1		m²	72	5.000.000		360.000.000		360.000.000		360.000.000	
	Ruang Uks			1		m²	36	5.000.000		180.000.000		180.000.000		180.000.000	
	Dinding Penahan Tanah			1		m³	40	1.700.000		68.000.000		68.000.000		68.000.000	
	4 UPTD SD Negeri 04 Koto Tinggi	Nagari Koto Tinggi Kecamatan Gunuang Omeh													
	Ruang Kelas + Mobiler		6			m²	72	5.500.000	2.376.000.000			2.376.000.000		2.376.000.000	
	Ruang Guru + Mobiler		1			m²	72	5.500.000	396.000.000			396.000.000		396.000.000	
	Ruang Perpustakaan + Mobiler		1			m²	72	5.500.000	396.000.000			396.000.000		396.000.000	
	Ruang Uks + Mobiler		1			m²	36	5.500.000	198.000.000			198.000.000		198.000.000	
	Wc/Toilet		1			m²	30	5.000.000	150.000.000			150.000.000		150.000.000	
	Paving Blok		1			m²	200	400.000	80.000.000			80.000.000		80.000.000	
	Parkiran		1			m²	200	500.000	100.000.000			100.000.000		100.000.000	
	Pagar Sekolah + Gerbang		1			meter	200	2.500.000	500.000.000			500.000.000		500.000.000	
	5 UPTD SD Negeri 06 Koto Tinggi	Nagari Koto Tinggi Kecamatan Gunuang Omeh													
	Ruang Kelas			6		m²	72	5.000.000		2.160.000.000		2.160.000.000		2.160.000.000	
	6 UPTD SD Negeri 04 Taeh Bukik	Nagari Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh													
	Ruang Kelas + Mobiler			6		m²	72	5.500.000		2.376.000.000		2.376.000.000		2.376.000.000	
	Ruang Guru + Mobiler			1		m²	72	5.500.000		396.000.000		396.000.000		396.000.000	
	Ruang Perpustakaan + Mobiler			1		m²	72	5.500.000		396.000.000		396.000.000		396.000.000	
	Ruang Uks + Mobiler			1		m²	36	5.500.000		198.000.000		198.000.000		198.000.000	
	Wc/Toilet			1		m²	30	5.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	
	Paving Blok			1		m²	200	400.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000	
	Parkiran			1		m²	200	500.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
	Pagar Sekolah + Gerbang			1		meter	200	2.500.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	
	7 UPTD SD Negeri 01 Banja Loweh	Nagari Banja Loweh Kecamatan Bukik Barisan													
	Ruang Kelas			2		m²	72	5.000.000		720.000.000		720.000.000		720.000.000	
	Dinding Penahan Tanah			1		m³	65	1.700.000		110.500.000		110.500.000		110.500.000	
	8 UPTD SMP Negeri 4 Kec. Bukik Barisan	Nagari Banja Loweh Kecamatan Bukik Barisan													
	Ruang Guru			1		m²	72	5.000.000		360.000.000		360.000.000		360.000.000	
	Ruang Labor			1		m²	84	5.000.000		420.000.000		420.000.000		420.000.000	
	Ruang Perpustakaan			1		m²	84	5.000.000		420.000.000		420.000.000		420.000.000	
	9 SMAN 2 Kec. Pangkalan Koto Baru	Kec. PANGKALAN KOTO BARU		1		m²	36	6.383.000		229.788.000		229.788.000	298.724.400	528.512.400	
LINTAS SEKTOR												702.662.000	-	702.662.000	
1. Pemerintahan												702.662.000	-	702.662.000	
	A. Gedung Pemerintahan											702.662.000	-	702.662.000	
	1 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sarilamak	Harau/ Sarilamak	200			m²		2.763.310	552.662.000			552.662.000		552.662.000	
	2 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Koto Tuo	Harau/ Koto Tuo	24			m²		6.250.000	150.000.000			150.000.000		150.000.000	
TOTAL												599.367.385.208	368.040.763.029	967.408.148.237	

PENILAIAN KEBUTUHAN (KEWENANGAN ASET)
PASCABENCANA BANJIR, TANAH LONGSOR DAN CUACA EKSTREM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2025

SEKTOR/SUBSEKTOR	NO	SARANA DAN PRASARANA	KECAMATAN/ NAGARI	KEGIATAN	Data Kebutuhan		Harga satuan	Nilai Kebutuhan	KEWENANGAN	KEWENANGAN ASET					KETERANGAN
					Volume	Satuan				Kabupaten	Provinsi	KIL	Masyarakat	Dunia Usaha	
1	PERUMAHAN							62.530.768.248		2.616.099.000	-	-	59.914.669.248	-	
1.1	RUMAH							62.068.669.248		2.154.000.000	-	-	59.914.669.248	-	
		1	HUNTAP TERPADU	GUNJANG OMEH'KOTO TINGGI	Relokasi pada satu kawasan	204	unit	253.699.343	51.754.669.248	Masyarakat			51.754.669.248		K1 (135), K2 (69)
		2	HUNTAP MANDIRI	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Relokasi Mandiri	49	unit	60.000.000	2.940.000.000	Masyarakat			2.940.000.000		K3.2
		3	STIMULAN RUMAH RUSAK RINGAN	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Perbaikan/Pembangunan Kembali Rumah Rusak Pascabencana	29	unit	15.000.000	435.000.000	Masyarakat			435.000.000		K3.2 (28), K4 (1)
		4	STIMULAN RUMAH RUSAK SEDANG	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Perbaikan/Pembangunan Kembali Rumah Rusak Pascabencana	47	unit	30.000.000	1.410.000.000	Masyarakat			1.410.000.000		K3.2 (44), K4 (3)
		5	SITE PLAN HUNTAP PERUMAHAN RELOKASI SATU KAWASAN	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Penyusunan Site Plan Huntap Perumahan Relokasi Satu Kawasan	1	dokumen	100.000.000	100.000.000	Kabupaten	100.000.000				K4
		6	PARTEK LIMBAH PERUMAHAN RELOKASI PADA SATU KAWASAN	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Penyusunan Partek Limbah Perumahan Relokasi Pada Satu Kawasan	1	dokumen	100.000.000	100.000.000	Kabupaten	100.000.000				K4
		7	DOKUMEN UKL-UPL PERUMAHAN PADA SATU KAWASAN	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Penyusunan Dokumen UKL-UPL Perumahan Pada Satu Kawasan	1	dokumen	100.000.000	100.000.000	Kabupaten	100.000.000				K4
		8	AMDALLALIN PERUMAHAN RELOKASI PADA SATU KAWASAN	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Penyusunan Dokumen Amdallalin Perumahan Relokasi Pada Satu Kawasan	1	dokumen	85.000.000	85.000.000	Kabupaten	85.000.000				K4
		9	PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA KABUPATEN/ KOTA	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	161	unit	15.000.000	2.415.000.000	Masyarakat			2.415.000.000		K3.2 (108), K4 (53)
				KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	18	unit	30.000.000	540.000.000	Masyarakat			540.000.000		K3.2 (1), K4 (17)
				KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	4	unit	60.000.000	240.000.000	Masyarakat			240.000.000		K3.2 (2), K4 (2)
		10	PEMBONGKARAN DAN MOBILISASI PUNG RUMAH YANG RELOKASI	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Pembongkaran dan Mobilisasi Pung Rumah yang Relokasi	204	unit	2.500.000	510.000.000	Kabupaten	510.000.000				K4
		11	PEMATANGAN LAHAN HUNTAP PERUMAHAN RELOKASI SATU KAWASAN	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Pematangan Lahan Huntap Perumahan Relokasi Satu Kawasan	1	lokasi	900.000.000	900.000.000	Kabupaten	900.000.000				K4
		12	BOP PEMBANGUNAN RUMAH BAGI KORBAN BENCANA	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Biaya Operasional	1	Paket	117.787.200	117.787.200	Kabupaten	117.787.200				K4
		13	BOP PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM DI PERUMAHAN	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Biaya Operasional	1	Paket	152.212.800	152.212.800	Kabupaten	152.212.800				K4
		14	BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN REKAYASA-JASA DESAIN REKAYASA UNTUK KONSTRUKSI FONDASI SERTA STRUKTUR BANGUNAN	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	-	1	Paket	89.000.000	89.000.000	Kabupaten	89.000.000				K4
		15	BANTUAN SOSIAL PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	-	12	unit	15.000.000	180.000.000	Masyarakat			180.000.000		K4 (12)
1.2	PRASARANA LINGKUNGAN							462.099.000		462.099.000	-	-	-	-	
		1	JALAN PITOPANG - TOBEK GODANG	GUNJANG OMEH' KOTO TINGGI	Rehabilitasi Jalan	20	meter	550.000	11.000.000	Kabupaten	11.000.000				K3.2
		2	JALAN PASIA - LUBUAK AJA	GUNJANG OMEH' KOTO TINGGI	Rehabilitasi Jalan	25	meter	803.000	20.075.000	Kabupaten	20.075.000				K3.2
		3	JALAN DALAM KAMPUNG - LUBUAK AJA	GUNJANG OMEH' KOTO TINGGI	Rehabilitasi Jalan	50	meter	803.000	40.150.000	Kabupaten	40.150.000				K3.2
		4	JALAN KAMPUANG MUARO - DOMANG	GUNJANG OMEH' KOTO TINGGI	Rehabilitasi Jalan	15	meter	550.000	8.250.000	Kabupaten	8.250.000				K3.2
		5	JALAN SUNGAI DADOK - MUDIAK NAMA	GUNJANG OMEH' KOTO TINGGI	Rehabilitasi Jalan	30	meter	803.000	24.090.000	Kabupaten	24.090.000				K3.2
		6	JALAN KAMPUANG BARU - LOKUANG	GUNJANG OMEH' KOTO TINGGI	Rehabilitasi Jalan	10	meter	550.000	5.500.000	Kabupaten	5.500.000				K3.2
		7	JALAN LUBUAK AJA - BUKIK PINANG	GUNJANG OMEH' KOTO TINGGI	Rehabilitasi Jalan	40	meter	803.000	32.120.000	Kabupaten	32.120.000				K3.2
		8	JALAN TITIAN BARAYUN - PITOPANG	GUNJANG OMEH' KOTO TINGGI	Rehabilitasi Jalan	30	meter	803.000	24.090.000	Kabupaten	24.090.000				K3.2
		9	JALAN KAMPUANG MELAYU - KAMPUANG BALAI	GUNJANG OMEH' KOTO TINGGI	Rehabilitasi Jalan	15	meter	550.000	8.250.000	Kabupaten	8.250.000				K3.2
		10	JALAN JAMBAK - SOLOK	GUNJANG OMEH' KOTO TINGGI	Rehabilitasi Jalan	10	meter	550.000	5.500.000	Kabupaten	5.500.000				K3.2
		11	JALAN LINGKUNG SUNGAI DADOK	GUNJANG OMEH' KOTO TINGGI	Rehabilitasi Jalan	30	meter	550.000	16.500.000	Kabupaten	16.500.000				K3.2

		12	JALAN SIMPANG GUGUAK MENUJU MESJID DARUSSALAM 1	GUNJANG OMEH/ KOTO TINGGI	Rehabilitasi Jalan	100	meter	803.000	80.300.000	Kabupaten	80.300.000					K3.2
		13	JALAN SIMPANG GUGUAK MENUJU MESJID DARUSSALAM 2	BUKIK BARISAN/ BARUAH GUNJANG	Rehabilitasi Jalan	30	meter	803.000	24.090.000	Kabupaten	24.090.000					K3.2
		14	JALAN ATEH DATA BUKIK RUNCIANG 1	GUNJANG OMEH/ KOTO TINGGI	Rehabilitasi Jalan	6	meter	550.000	3.300.000	Kabupaten	3.300.000					K3.2
		15	JALAN SIMPANG CIBODAK-MENUJU BUKIK KAMBUIK	BUKIK BARISAN/ BARUAH GUNJANG	Rehabilitasi Jalan	75	meter	550.000	41.250.000	Kabupaten	41.250.000					K3.2
		16	JALAN LINGKAR BIGAU	BUKIK BARISAN/ BARUAH GUNJANG	Rehabilitasi Jalan	100	meter	803.000	80.300.000	Kabupaten	80.300.000					K3.2
		17	JALAN ATEH DATA BUKIK RUNCIANG 2	GUNJANG OMEH/ KOTO TINGGI	Rehabilitasi Jalan	8	meter	803.000	6.424.000	Kabupaten	6.424.000					K3.2
		18	JALAN SUNGAI SIRIAH - BUKIK RUNCIANG 1	GUNJANG OMEH/ KOTO TINGGI	Rehabilitasi Jalan	7	meter	550.000	3.850.000	Kabupaten	3.850.000					K3.2
		19	JALAN TANJUANG HARO -BUKIK RUNCIANG	GUNJANG OMEH/ KOTO TINGGI	Rehabilitasi Jalan	20	meter	803.000	16.060.000	Kabupaten	16.060.000					K3.2
		20	JALAN SUNGAI SIRIAH - BUKIK RUNCIANG 2	GUNJANG OMEH/ KOTO TINGGI	Rehabilitasi Jalan	20	meter	550.000	11.000.000	Kabupaten	11.000.000					K3.2
2	INFRASTRUKTUR								844.992.879.457		727.483.607.341	37.233.738.560	66.679.569.769	1.820.183.997	1.249.464.000	
2,1	TRANSPORTASI								633.570.354.717		555.341.970.283	37.233.738.560	40.994.645.874	-	-	
		1	PANGKALAN SIALANG GELUGUR (P.076)	KAPUR IX	Pembangunan dan Preservasi Jalan Nasional (7696)	1	Paket	15.000.000.000	15.000.000.000	Provinsi		15.000.000.000				K1
		2	BTS. PAYAKUMBUH TINGGI SULIKI-KOTO (P.069.1)	GUNJANG OMEH	Pembangunan dan Preservasi Jalan Nasional (7696)	1	Paket	15.000.000.000	15.000.000.000	Provinsi		15.000.000.000				K1
		3	TAROK - ANDALEH (R-043)	LUAK/ ANDALEH	Pembangunan dan Preservasi Jalan Nasional (7696)	1	Paket	6.433.136.000	6.433.136.000	Kabupaten/Kota	6.433.136.000					K1
		4	SP. SEI IPUH - AMPALU (R-125)	LAREH SAGO HALABAN/ AMPALU	Pembangunan dan Preservasi Jalan Nasional (7696)	1	Paket	11.250.000.000	11.250.000.000	Kabupaten/Kota	11.250.000.000					K1
		5	ANDALEH - TARAM (R-044)	LUAK/ ANDALEH	Pembangunan dan Preservasi Jalan Nasional (7696)	1	Paket	5.771.170.000	5.771.170.000	Kabupaten/Kota	5.771.170.000					K1
		6	JEMBATAN MUDIAK NYINYANG	KAPUR IX/ KOTO LAMO	Pembangunan dan Preservasi Jalan Nasional (7696)	1	Paket	800.000.000	800.000.000	Kabupaten/Kota	800.000.000					K1
		7	KOMPI UNIT -LUBUAK BATINGKOK (R-057)	HARAU/ SARILAMAK	Pembangunan dan Preservasi Jalan Nasional (7696)	1	Paket	11.591.533.000	11.591.533.000	Kabupaten/Kota	11.591.533.000					K1
		8	JEMBATAN HARAU - SOLOK BIO-BIO (R-051)	HARAU/ SOLOK BIO BIO	Pembangunan dan Preservasi Jalan Nasional (7696)	1	Paket	6.103.957.000	6.103.957.000	Kabupaten/Kota	6.103.957.000					K1
		9	JEMBATAN LUBUAK JAO	KAPUR IX/ KOTO LAMO	Pembangunan dan Preservasi Jalan Nasional (7696)	1	Paket	3.750.000.000	3.750.000.000	Kabupaten/Kota	3.750.000.000					K1
		10	JEMBATAN MUDIAK PINGAN	KAPUR IX/ KOTO LAMO	Pembangunan dan Preservasi Jalan Nasional (7696)	1	Paket	2.250.000.000	2.250.000.000	Kabupaten/Kota	2.250.000.000					K1
		11	SULIKI - SP.SEI.DADOK (R-027)	GUNJANG OMEH/ KOTO TINGGI	Pembangunan dan Preservasi Jalan Nasional (7696)	1	Paket	18.900.000.000	18.900.000.000	Kabupaten/Kota	18.900.000.000					K1
		12	SP. ANDIANG - MAEK (R-029)	BUKIK BARISAN/ MAEK	Pembangunan dan Preservasi Jalan Nasional (7696)	1	Paket	9.150.931.000	9.150.931.000	Kabupaten/Kota	9.150.931.000					K1
		13	KOTO TINGGI - SP. SEI.DADOK (R-022)	GUNJANG OMEH/ KOTO TINGGI	Pembangunan dan Preservasi Jalan Nasional (7696)	1	Paket	15.850.000.000	15.850.000.000	Kabupaten/Kota	15.850.000.000					K1
		14	JALAN JORONG LOMBAH - ATEH KOTO	SULIKI/ SULIKI	Pembangunan dan Preservasi Jalan Nasional (7696)	1	Paket	3.000.000.000	3.000.000.000	Kabupaten/Kota	3.000.000.000					K1
		15	JEMBATAN KUBANG BALAMBAK	MUNGKA/ SIMPANG KAPUAK	Pembangunan dan Preservasi Jalan Nasional (7696)	1	Paket	500.000.000	500.000.000	Kabupaten/Kota	500.000.000					K1
		16	JEMBATAN MUDIAK TUGU	KAPUR IX/ KOTO LAMO	Pembangunan dan Preservasi Jalan Nasional (7696)	1	Paket	2.250.000.000	2.250.000.000	Kabupaten/Kota	2.250.000.000					K1
		17	BUKIT KAMBUIK - BANDA RAIK (R-101)	BUKIK BARISAN/ BARUAH GUNJANG	Pembangunan dan Preservasi Jalan Nasional (7696)	1	Paket	11.600.000.000	11.600.000.000	Kabupaten/Kota	11.600.000.000					K1
		18	KOTO KOZIAK - JOPANG (R-076)	GUGUAK/ VII KOTO TALAGO	Pembangunan dan Preservasi Jalan Nasional (7696)	1	Paket	16.500.000.000	16.500.000.000	Kabupaten/Kota	16.500.000.000					K1
		19	MAEK - TANJUNG BUNGO (R-080)	BUKIK BARISAN/ MAEK	Pembangunan dan Preservasi Jalan Nasional (7696)	1	Paket	18.300.000.000	18.300.000.000	Kabupaten/Kota	18.300.000.000					K1
		20	BATU HAMPA - SUAYAN (R-015)	AKABILURU/ BATU HAMPA	Pembangunan dan Preservasi Jalan Nasional (7696)	1	Paket	16.926.074.000	16.926.074.000	Kabupaten/Kota	16.926.074.000					K1
		21	JEMBATAN NENAN	BUKIK BARISAN/ MAEK	Pembangunan dan Preservasi Jalan Nasional (7696)	1	Paket	560.000.000	560.000.000	Kabupaten/Kota	560.000.000					K1
		22	BTS. PROV. RIAU - BTS. KOTA PAYAKUMBUH	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Pembangunan dan Preservasi Jalan Nasional (7696)	1700	M	13.310.942	22.628.601.400	Pusat			22.628.601.400			K2
		23	BTS. PAYAKUMBUH - SULIKI - KOTO TINGGI	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Pembangunan dan Preservasi Jalan Nasional (7696)	33	M	250.000.000	8.250.000.000	Provinsi			8.250.000.000			K2
		24	BIAYA PENUNJANG REKONSTRUKSI JALAN	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Rekonstruksi Jalan	1	kegiatan	700.243.000	700.243.000	Kabupaten/Kota	700.243.000					K4
		25	BIAYA PENUNJANG PENGANTIAN JEMBATAN	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	-		0,294118	M	169.999.796	50.000.000	Kabupaten/Kota	50.000.000				K4
		26	JALAN SIMPANG BERINGIN MUSHOLA BARUAH ANDURIANG JORONG KOTO KOZIAK TUJUAH KOTO TALAGO	GUGUAK/ VII KOTO TALAGO	Rekonstruksi Jalan	0,15	KM	1.000.000.000	150.000.000	Kabupaten/Kota	150.000.000					K4
		27	SIMALANGGANG - KOTO BARU (R-005)	PAYAKUMBUH/ SIMALANGGANG	Rekonstruksi Jalan	452,174	M	2.300.000	1.040.000.000	Kabupaten/Kota	1.040.000.000					K4
		28	JALAN SIMPANG TIGO BENDANG JORONG KOTO TANGAH LUBUAK	HARAU/ LUBUAK BATINGKOK	Rekonstruksi Jalan	0,16	KM	1.000.000.000	160.000.000	Kabupaten/Kota	160.000.000					K4
		29	BALAI RUPIH - BATANG PUNIK (R-133)	PAYAKUMBUH/ SIMALANGGANG	Rekonstruksi Jalan	452,174	M	2.300.000	1.040.000.000	Kabupaten/Kota	1.040.000.000					K4
		30	JALAN LINGKUNG PASAR MUARO PAITI	KAPUR IX/ MUARO PAITI	Rekonstruksi Jalan	0,13	KM	1.000.000.000	130.000.000	Kabupaten/Kota	130.000.000					K4

		31	JALAN SITUJUAH BANDA DALAM - LADANG LAWEH (R-033)	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Rekonstruksi Jalan	0,548913	KM	2.300.000.180	1.262.499.999	Kabupaten/Kota	1.262.499.999					K4
		32	BUKIK APIK – SP SUGIRAN (R-068)	PAYAKUMBUH/ SIMALANGGANG	Rekonstruksi Jalan	452.174	M	2.300.000	1.040.000.000	Kabupaten/Kota	1.040.000.000					K4
		33	AKAR BARAYUN – HARAU (R-175)	PAYAKUMBUH/ SIMALANGGANG	Rekonstruksi Jalan	478.261	M	2.299.999	1.100.000.001	Kabupaten/Kota	1.100.000.001					K4
		34	KOTO TANGAH - GUNTUANG (R-028)	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Rehabilitasi Jalan	20	M	3.000.000	60.000.000	Kabupaten/Kota	60.000.000					K4
		35	SP PULUTAN – PADANG BARANGAN (R-161)	PAYAKUMBUH/ SIMALANGGANG	Rekonstruksi Jalan	0,478261	KM	2.299.999.375	1.100.000.001	Kabupaten/Kota	1.100.000.001					K4
		36	PENGADAAN BAHAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM (LP3U) SOLAR CELL LENGAN TUNGGAH SPESIFIKASI : PENGADAAN BAHAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM (LP3U) SOLAR CELL LENGAN TUNGGAH	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	-	44.8337	Unit	17.677.015	792.526.000	Kabupaten/Kota	792.526.000					K4
		37	SIBALADUANG – MADANG KADOK (R-082)	LUAK	Rekonstruksi Jalan	0,548913	KM	2.300.000.180	1.262.499.999	Kabupaten/Kota	1.262.499.999					K4
		38	JEMBATAN BATANG NENAN	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Pembangunan jembatan permanen	2,0589	M	170.000.000	350.013.000	Kabupaten/Kota	350.013.000					K4
		39	LAKUANG - LUAK BEGAK (R-184)	GUNJANG OMEH KOTO TINGGI	Rekontruksi Jalan	1	Paket	682.500.000	682.500.000	Kabupaten/Kota	682.500.000					K4
		40	ALANG LAWEH – KEBUN MURBAI (R-108)	LAREH SAGO HALABAN	Rekonstruksi Jalan	329.193	M	2.299.997	757.142.858	Kabupaten/Kota	757.142.858					K4
		41	SP TARATAK – SITANANG (R-092)	LAREH SAGO HALABAN	Rekonstruksi Jalan	329.193	M	2.299.997	757.142.858	Kabupaten/Kota	757.142.858					K4
		42	PAKAN SINAYAN – PAKAN RABAA (R-126)	LAREH SAGO HALABAN	Rekonstruksi Jalan	329.193	M	2.299.997	757.142.858	Kabupaten/Kota	757.142.858					K4
		43	AIA RANDAH – LABUAH MALINTANG (R-127)	LAREH SAGO HALABAN	Rekonstruksi Jalan	329.193	M	2.299.997	757.142.858	Kabupaten/Kota	757.142.858					K4
		44	ALANG LAWEH - MANGUNAI (R-36)	LAREH SAGO HALABAN/ HALABAN	Rekonstruksi Jalan	0,108696	M	2.300.000.000	250.000.800	Kabupaten/Kota	250.000.800					K4
		45	PAKAN RABAA – BALAI PANJANG (SMAN 1 HALABAN) (R-038)	LAREH SAGO HALABAN	Rekonstruksi Jalan	329.193	M	2.299.997	757.142.858	Kabupaten/Kota	757.142.858					K4
		46	PERENCANAAN JEMBATAN GANTUNG PALAH SANGIK	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	-	0,294118	M	169.999.796	50.000.000	Kabupaten/Kota	50.000.000					K4
		47	TANJUNG GADANG RUMAH - BATU KABAU (R-250)	LAREH SAGO HALABAN	Rekonstruksi Jalan	329.193	M	2.299.997	757.142.858	Kabupaten/Kota	757.142.858					K4
		48	EXCAVATOR 7.5 TON SAMPAI 8.0 TON	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Pengadaan alat berat	3	Unit	750.000.000	2.250.000.000	Kabupaten/Kota	2.250.000.000					K4
		49	JALAN LINGKUNG DURIAN TINGGI SIALANG KAPUR IX	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Rekonstruksi Jalan	3,5	KM	200.000.000	700.000.000	Kabupaten/Kota	700.000.000					K4
		50	GUNJANG MALINTANG-KOTO LAMO (R-177)	PANGKALAN KOTO BARU	Rekonstruksi Jalan	0,652174	KM	2.300.000.000	1.500.000.200	Kabupaten/Kota	1.500.000.200					K4
		51	EXCAVATOR 13.5 TON LONG ARM	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Pengadaan Alat Berat	1	Unit	1.600.000.000	1.600.000.000	Kabupaten/Kota	1.600.000.000					K4
		52	TALAGO - KOTO KOCIAK (R-067)	GUGUAK	Rekonstruksi Jalan	0,313043	KM	2.300.003.514	720.000.000	Kabupaten/Kota	720.000.000					K4
		53	KURANJI – SEI TALANG BARAT (R-137)	GUGUAK	Rekonstruksi Jalan	0,313043	KM	2.300.003.514	720.000.000	Kabupaten/Kota	720.000.000					K4
		54	KUBANG TUNGKEK – TIAKAR (R-138)	GUGUAK	Rekonstruksi Jalan	0,313043	KM	2.300.003.514	720.000.000	Kabupaten/Kota	720.000.000					K4
		55	SP PADANG LAWEH - SP BALAI (R-14)	MUNGKA	Rekonstruksi Jalan	0,313043	KM	2.300.003.514	720.000.000	Kabupaten/Kota	720.000.000					K4
		56	KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR/LAPANGAN RODA DUA	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Pengadaan kendaraan dinas	5,57933	Unit	38.087.010	212.500.000	Kabupaten/Kota	212.500.000					K4
		57	PADANG MUNGKA – PADANG JOPANG (R-095)	MUNGKA	Rekonstruksi Jalan	0,3	M	1.000.000.000	300.000.000	Kabupaten/Kota	300.000.000					K4
		58	JALAN PENGHUBUNG KALUDAN – LUAK RAWANG – ANAK KAYU – BUKIK APIK	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Rekonstruksi Jalan	0,15	KM	1.000.000.000	150.000.000	Kabupaten/Kota	150.000.000					K4
		59	SP BALAI – KOTO TINGGI (R-070)	MUNGKA	Rekonstruksi Jalan	0,130435	KM	2.299.996.174	300.000.001	Kabupaten/Kota	300.000.001					K4
		60	SILARAK – BATAS KOTA (R-240)	LUAK	Rekonstruksi Jalan (Pembuatan turap/TPT/Pengamanan tebing jalan)	150	M	1.000.000	150.000.000	Kabupaten/Kota	150.000.000					K4
		61	JALAN PI SAMPAI PESANTREN ASABUL YAMIN, TARAM	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Rekonstruksi Jalan	0,15	KM	1.000.000.000	150.000.000	Kabupaten/Kota	150.000.000					K4
		62	PEMBANGUNAN RABAT BETON JALAN PANDAM PAKUBURAN JORONG I KOTO BANGUN	KAPUR IX/ KOTO BANGUN	Rekonstruksi Jalan	250	M	800.000	200.000.000	Kabupaten/Kota	200.000.000					K4
		63	PEBAIKAN JALAN TERBAN JORONG KAMPUANG BARU	PANGKALAN KOTO BARU/ PANGKALAN	Pembangunan DAM Jalan	1	Paket	78.455.000	78.455.000	Kabupaten/Kota	78.455.000					K4
		64	TUMPUAN - AMPANG GADANG MAEK	BUKIK BARISAN	Rekonstruksi Jalan	0,3	KM	1.000.000.000	300.000.000	Kabupaten/Kota	300.000.000					K4
		65	SITUJUH BATUR - SAWAH LAWEH (R-032)	SITUJUH LIMO NAGARI	Box Culver (Box Culver)	30	M	10.000.000	300.000.000	Kabupaten/Kota	300.000.000					K4
		66	ANDALEH - TARAM (R-044)	LUAK	Rekonstruksi Jalan (Pembuatan turap/TPT/Pengamanan tebing jalan)	300	M	1.000.000	300.000.000	Kabupaten/Kota	300.000.000					K4
		67	JALAN SMA 1 PILADANG	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Rekonstruksi Jalan	0,15	KM	1.000.000.000	150.000.000	Kabupaten/Kota	150.000.000					K4
		68	LAMPASI – MUNGKA (R-003)	PAYAKUMBUH	Rekonstruksi Jalan	0,452174	KM	2.299.999.558	1.040.000.000	Kabupaten/Kota	1.040.000.000					K4
		69	ANDALEH BALIAK BUKIK – TARAM (R-230)	LUAK	Rekonstruksi Jalan	0,3	KM	1.000.000.000	300.000.000	Kabupaten/Kota	300.000.000					K4
		70	JALAN PENGHUBUNG JORONG TABIANG MENUJU DENZIPUR/PADANG MANGATAS	LUAK/ SUNGAI KAMUYANG	Rekonstruksi Jalan	0,15	KM	1.000.000.000	150.000.000	Kabupaten/Kota	150.000.000					K4

		71	MUNGO BGS - PAKAN SABTU (R-121)	LUAK	Rekonstruksi Jalan (Pembuatan turap/TPT/Pengamanan tebing jalan)	180	M	1.000.000	180.000.000	Kabupaten/Kota	180.000.000					K4
		72	RUAS BUKIK APIK - LUAK BEGAK - TALANG ANAU (R-149)	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Rekonstruksi Jalan	0,15	KM	1.000.000.000	150.000.000	Kabupaten/Kota	150.000.000					K4
		73	LANJUTAN JALAN LAPEN PINTU ANGIN KE BATAS KOTA (R-246)	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Rekonstruksi Jalan	0,11	KM	1.000.000.000	110.000.000	Kabupaten/Kota	110.000.000					K4
		74	PAKAN RABAA - TALAWEH (R-165)	LUAK	Rekonstruksi Jalan (Pembuatan turap/TPT/Pengamanan tebing jalan)	180	M	1.000.000	180.000.000	Kabupaten/Kota	180.000.000					K4
		75	LUBUAK ALAI - KOTO LAMO (R-072)	KAPUR IX	Rekonstruksi Jalan (Pembuatan turap/TPT/Pengamanan tebing jalan)	300	M	1.000.000	300.000.000	Kabupaten/Kota	300.000.000					K4
		76	SAWAH LAWEH - SIALANG (R-115)	SITUJUAH LIMO NAGARI	Rekonstruksi Jalan (Pembuatan turap/TPT/Pengamanan tebing jalan)	300	M	1.000.000	300.000.000	Kabupaten/Kota	300.000.000					K4
		77	PINANG BARIRIK - ROGEH (R-064)	LUAK	Rekonstruksi Jalan (Pembuatan turap/TPT/Pengamanan tebing jalan)	200	M	1.000.000	200.000.000	Kabupaten/Kota	200.000.000					K4
		78	PAUH ANOK - LUBUAK TABUAN (R-143)	PANGKALAN KOTO BARU/ PANGKALAN	Rekonstruksi Jalan	0,3	KM	1.000.000.000	300.000.000	Kabupaten/Kota	300.000.000					K4
		79	BATANG TABIK - ANDALEH (R-083)	LUAK	Rekonstruksi Jalan	0,0652174	M	2.300.000.000	150.000.020	Kabupaten/Kota	150.000.020					K4
		80	JALAN LINGKAR JORONG TABEK PANJANG - MESJID	PAYAKUMBUH	Rekonstruksi Jalan	0,1	KM	1.000.000.000	100.000.000	Kabupaten/Kota	100.000.000					K4
		81	TARAM- GANTIANG	HARAU	Rekonstruksi Jalan	300	M	2.000.000	600.000.000	Kabupaten/Kota	600.000.000					K4
		82	JALAN LURAH BATU KUCIANG	LUAK	Rekonstruksi Jalan	0,18	KM	1.000.000.000	180.000.000	Kabupaten/Kota	180.000.000					K4
		83	JALAN LINGKUNG TANJUNG BALIK PANGKALAN	PANGKALAN KOTO BARU/ TANJUNGGAL	Rekonstruksi Jalan	1	KM	200.000.000	200.000.000	Kabupaten/Kota	200.000.000					K4
		84	JALAN JORONG KE LUDAN NAGARI SEI TALANG	GUGUAK	Rekonstruksi Jalan	0,15	KM	1.000.000.000	150.000.000	Kabupaten/Kota	150.000.000					K4
		85	JALAN BONCAH – MUARO BATU BALANG	HARAU	Rekonstruksi Jalan	0,25	KM	1.000.000.000	250.000.000	Kabupaten/Kota	250.000.000					K4
		86	JALAN LINGKUNG KOTO HARAU	HARAU	Rekonstruksi Jalan	0,15	KM	1.000.000.000	150.000.000	Kabupaten/Kota	150.000.000					K4
		87	JALAN LINGKAR KANDANG LAMO	HARAU	Rekonstruksi Jalan	0,18	KM	1.000.000.000	180.000.000	Kabupaten/Kota	180.000.000					K4
		88	JALAN LINGKUNG KAPALO BUKIK	LAREH SAGO HALABAN	Rekonstruksi Jalan	0,18	KM	1.000.000.000	180.000.000	Kabupaten/Kota	180.000.000					K4
		89	JALAN SIMPESJID NURUL HAQ – DALIMO (RABAT BETON)	MUNGKA	Rekonstruksi Jalan	0,0565217	KM	2.300.000.000	129.999.910	Kabupaten/Kota	129.999.910					K4
		90	JALAN SIMPANG 3 TAMPUNIAK KE DOMANG	PAYAKUMBUH	Rekonstruksi Jalan	0,15	KM	1.000.000.000	150.000.000	Kabupaten/Kota	150.000.000					K4
		91	JALAN KOTO KOCIAK MENUJU SMPN 3 KEC PAYAKUMBUH	PAYAKUMBUH	Rekonstruksi Jalan	0,15	KM	1.000.000.000	150.000.000	Kabupaten/Kota	150.000.000					K4
		92	JALAN LINGKAR JORONG PENAGO NAGARI LIMBANANG	SULIKI	Rekonstruksi Jalan	0,15	KM	1.000.000.000	150.000.000	Kabupaten/Kota	150.000.000					K4
		93	JALAN LINGKAR KAMPUANG TORONDAM NAGARI ANDIANG	SULIKI	Rekonstruksi Jalan	0,15	M	1.000.000.000	150.000.000	Kabupaten/Kota	150.000.000					K4
		94	JALAN BOTUANG NAGARI KURAI	SULIKI	Rekonstruksi Jalan	0,0782609	KM	2.300.000.000	180.000.070	Kabupaten/Kota	180.000.070					K4
		95	JALAN JORONG LOMBAH - ATEH KOTO	SULIKI	Rekonstruksi Jalan (Pembuatan turap/TPT/Pengamanan tebing jalan)	200	M	1.000.000	200.000.000	Kabupaten/Kota	200.000.000					K4
		96	JALAN PADANG LAWEH KOTO TINGGA KECAMATAN LUHAK	LUAK/ MUNGO	Rekonstruksi Jalan	0,18	KM	1.000.000.000	180.000.000	Kabupaten/Kota	180.000.000					K4
		97	JALAN JORONG SUNGAI MANGKIRAI	GUNJANG OMEH/ PANDAM GADANG	Rekonstruksi Jalan	0,0652174	KM	2.300.000.000	150.000.020	Kabupaten/Kota	150.000.020					K4
		98	SP. SEI IPUH - AMPALU (R-125)	LAREH SAGO HALABAN/ AMPALU	Rekonstruksi Jalan	329.193	M	2.299.997	757.142.857	Kabupaten/Kota	757.142.857					K4
		99	RUAS BATANG TABIK - ANDALEH (R-83)	LUAK/ SUNGAI KAMUYANG	Rekonstruksi Jalan	0,0652174	KM	2.299.999.693	150.000.000	Kabupaten/Kota	150.000.000					K4
		100	KOMPI UNIT – LUBUAK BATINGKOK (R-57)	HARAU/ LUBUAK BATINGKOK	Rekonstruksi Jalan	0,478261	KM	2.299.999.375	1.100.000.001	Kabupaten/Kota	1.100.000.001					K4
		101	JEMBATAN HARAU – SOLOK BIO BIO (R-51)	HARAU	Rekonstruksi Jalan	0,478261	KM	2.299.999.375	1.100.000.001	Kabupaten/Kota	1.100.000.001					K4
		102	KOTO TINGGI - SP. SEI DADOK (R-22)	GUNJANG OMEH KOTO TINGGI	Rekonstruksi Jalan (Pembuatan turap/TPT/Pengamanan tebing jalan)	400	M	1.000.000	400.000.000	Kabupaten/Kota	400.000.000					K4
		103	JALAN DATA SOROMAN KUBU KAMPUANG GADJANG NAGARI PANDAM	GUNJANG OMEH/ PANDAM GADANG	Rekonstruksi Jalan	0,0652174	KM	2.300.000.000	150.000.020	Kabupaten/Kota	150.000.020					K4
		104	MAEK - TANJUNG BUNGO (R-080)	BUKIK BARISAN/ MAEK	Rekonstruksi Jalan	0,565217	KM	2.300.001.592	1.300.000.000	Kabupaten/Kota	1.300.000.000					K4
		105	MUARO – TALANG ANAU (R-26)	GUNJANG OMEH/ TALANG ANAU	Rekonstruksi Jalan (Pembuatan turap/TPT/Pengamanan tebing jalan)	100	M	1.000.000	100.000.000	Kabupaten/Kota	100.000.000					K4
		106	TALANG ANAU - KAMPUANG PADANG (R-202)	GUNJANG OMEH/ TALANG ANAU	Rekonstruksi Jalan	0,3	KM	1.000.000.000	300.000.000	Kabupaten/Kota	300.000.000					K4
		107	SP. BATU HAMPAR – SUAYAN (R-15)	AKABILURU/ SUAYAN	Rekonstruksi Jalan	1,91304	KM	2.300.004.181	4.399.999.999	Kabupaten/Kota	4.399.999.999					K4
		108	SP. ANDIANG – MAEK (R-29)	BUKIK BARISAN/ MAEK	Rekonstruksi Jalan	0,586957	KM	2.300.000.000	1.350.001.100	Kabupaten/Kota	1.350.001.100					K4
		109	KOTO KOCIAK - JOPANG (R-76)	GUGUAK/ VII KOTO TALAGO	Rekonstruksi Jalan	0,313043	KM	2.300.003.511	719.999.999	Kabupaten/Kota	719.999.999					K4
		110	JALAN LINGKUNG MAKUR PURWAJAYA	HARAU/ SARILAMAK	Rekonstruksi Jalan	0,18	KM	1.000.000.000	180.000.000	Kabupaten/Kota	180.000.000					K4

		111	JALAN PENGHUBUNG JORONG BATANG TABIK MENUJU JORONG 8.12, RAGEH DAN MADANGKADOK	LUAK/ SUNGAI KAMUYANG	Rekonstruksi Jalan	0,15	KM	1.000.000.000	150.000.000	Kabupaten/Kota	150.000.000					K4
		112	JALAN PITOPANG JORONG KAMPUANG MUARO NAGARI KOTO TINGGI	GUNUANG OMEH KOTO TINGGI	Rekonstruksi Jalan	0,0652174	KM	2.300.000.000	150.000.020	Kabupaten/Kota	150.000.020					K4
		113	RUAS BUKIK KAMBUIK - BANDA RAIK (R-101)	BUKIK BARISAN/ BARUAH GUNUANG	Rekonstruksi Jalan (Pembuatan turap/TPT/Pengamanan tebing jalan)	150	M	1.000.000	150.000.000	Kabupaten/Kota	150.000.000					K4
		114	RUAS SULIKI - SP. SEI DADOK (R-27)	GUNUANG OMEH KOTO TINGGI	Rekonstruksi Jalan (Pembuatan turap/TPT/Pengamanan tebing jalan)	525	M	1.000.000	525.000.000	Kabupaten/Kota	525.000.000					K4
		115	PENGAWASAN JEMBATAN GANTUNG PAUH SANGIK	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Pembangunan jembatan permanen	0,294118	M	169.999.796	50.000.000	Kabupaten/Kota	50.000.000					K4
		116	JALAN SD 05 SARILAMAK	HARAU/ SARILAMAK	Rekonstruksi Jalan	0,15	KM	1.000.000.000	150.000.000	Kabupaten/Kota	150.000.000					K4
		117	JEMBATAN KAMPUANG BARU NAGARI PAUH SANGIK (AMBACANG KUNIK)	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Pembangunan Jembatan Permanen	60	M	200.000.000	12.000.000.000	Kabupaten/Kota	12.000.000.000					K4
		118	PLAT DECKER PUNCAK KB JORONG TARATAK	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Pembangunan jembatan permanen	1.17647	M	170.000.085	200.000.000	Kabupaten/Kota	200.000.000					K4
		119	JALAN DEPAN DINAS PERHUBUNGAN KE TIGA ALUA	HARAU/ SARILAMAK	Rekonstruksi Jalan	0,15	KM	1.000.000.000	150.000.000	Kabupaten/Kota	150.000.000					K4
		120	JALAN BALIAK BONCAH MESJID DARUL IMAN PADANG ARAI GUGUAK	GUGUAK/ VII KOTO TALAGO	Rekonstruksi Jalan	0,0543478	KM	2.300.000.000	124.999.940	Kabupaten/Kota	124.999.940					K4
		121	JALAN SIKABU - TANAH SIRAH JORONG SITUJUAH GADANG	SITUJUAH LIMO NAGARI/ SITUJUAH GADANG	Rekonstruksi Jalan	0,15	KM	1.000.000.000	150.000.000	Kabupaten/Kota	150.000.000					K4
		122	KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Koordinasi perencanaan dan money pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	1	tahun	50.000.000	50.000.000	Kabupaten/Kota	50.000.000					K4
		123	JEMBATAN GANTUNG PADANG RANTANG - SAWAH BANDANG	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Pembangunan jembatan permanen	1,47059	M	169.999.796	250.000.000	Kabupaten/Kota	250.000.000					K4
		124	JEMBATAN KUBANG BALAMBAK	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Pembangunan jembatan permanen	2,05882	M	170.000.291	350.000.000	Kabupaten/Kota	350.000.000					K4
		125	JALAN SIMPANG SIAMANG GUGUAK - SIMPANG JORONG PADANG KOTO TUO MUNGKA	MUNGKA/ MUNGKA	Rekonstruksi jalan	0,15	KM	1.000.000.000	150.000.000	Kabupaten/Kota	150.000.000					K4
		126	JALAN JORONG PADANG TAROK HARAU	HARAU/ HARAU	Rekonstruksi Jalan	0,15	KM	1.000.000.000	150.000.000	Kabupaten/Kota	150.000.000					K4
		127	JALAN JORONG SUNGAI DADOK NAGARI KOTO TINGGI	GUNUANG OMEH KOTO TINGGI	Rekonstruksi Jalan	0,0652174	KM	2.300.000.000	150.000.020	Kabupaten/Kota	150.000.020					K4
		128	JALAN LINGKAR SAMPING KANTOR WALI NAGARI SITUJUAH BATUA	SITUJUAH LIMO NAGARI/ SITUJUAH BATUA	Rekonstruksi Jalan	0,15	KM	1.000.000.000	150.000.000	Kabupaten/Kota	150.000.000					K4
		129	SIMPANG TIGO TANJUNG JORONG TIGO BALAI	HARAU/ LUBUAK BATINGKOK	Rekonstruksi Jalan	0,18	Km	1.000.000.000	180.000.000	Kabupaten/Kota	180.000.000					K4
		130	AMBACANG - LABUAH SILANG (R-86)	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Rekonstruksi Jalan	0,255072	KM	2.300.000.000	586.665.600	Kabupaten/Kota	586.665.600					K4
		131	JALAN BUKIK SIKUMPA JORONG BALAI PILUBANG	HARAU/ PILUBANG	Rekonstruksi Jalan	0,18	KM	1.000.000.000	180.000.000	Kabupaten/Kota	180.000.000					K4
		132	SITUJUAH LADANG LAWEH - BTS KOTA TANAH DATAR (R-228)	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Rekonstruksi Jalan	0,255072	KM	2.300.000.000	586.665.600	Kabupaten/Kota	586.665.600					K4
		133	PILADANG - BATU HAMPAR (R-91)	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Rekonstruksi Jalan	1,91304	KM	2.300.004.182	4.400.000.000	Kabupaten/Kota	4.400.000.000					K4
		134	JALAN PINTU KOTO BUKIK LIMBUKU	HARAU/ BUKIK LIMBUKU	Rekonstruksi Jalan	0,18	M	1.000.000.000	180.000.000	Kabupaten/Kota	180.000.000					K4
		135	JALAN MESJID ALHIDAYAH KOTO KOCIAK NAGARI BATU BALANG	HARAU/ BATU BALANG	Rekonstruksi Jalan	0,15	M	1.000.000.000	150.000.000	Kabupaten/Kota	150.000.000					K4
		136	ALAT PENERANGAN JALAN (APJ) SOLAR CEL	PANGKALAN KOTO BARU/ TANJUANG BALIK	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan negara	50	Unit	12.557.500	627.875.000	Pusat		627.875.000				K3.2
		137	LAMPU PERINGATAN TENAGA SURYA (WARNING LIGHT SOLAR CELL)	HARAU/ SARILAMAK	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan negara	4	Lokasi	58.500.000	234.000.000	Pusat		234.000.000				K3.2
		138	RAMBU LALU LINTAS UK. 75 CM X 75 CM	HARAU/ SARILAMAK	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan negara	20	Unit	919.000	18.380.000	Pusat		18.380.000				K3.2
		139	JEMBATAN SUNGAI PANJANG (P.076)	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Penggantian Jembatan	20	M	67.346.928	1.346.938.560	Provinsi		1.346.938.560				K3.2
		140	RAMBU LALU LINTAS	GUNUANG OMEH KOTO TINGGI	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi (Rambu Lahu Lintas)	20	M	2.050.000	41.000.000	Provinsi		41.000.000				K3.2
		141	RAMBU LALU LINTAS	GUNUANG OMEH KOTO TINGGI	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi (Rambu Tiang F dengan papan tambahan)	6	Unit	23.200.000	139.200.000	Provinsi		139.200.000				K3.2
		142	RAMBU LALU LINTAS	GUNUANG OMEH KOTO TINGGI	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi (Rambu Lahu Lintas)	20	M	2.050.000	41.000.000	Provinsi		41.000.000				K3.2
		143	JEMBATAN BATANG KAMPAR, TANJUNG JAJARAN (P.076)	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Rehabilitasi Jembatan	80	M	70.000.000	5.600.000.000	Provinsi		5.600.000.000				K3.2
		144	RAMBU LALU LINTAS	GUNUANG OMEH KOTO TINGGI	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi (Rambu Lahu Lintas)	20	M	2.050.000	41.000.000	Provinsi		41.000.000				K3.2
		145	RAMBU LALU LINTAS	GUNUANG OMEH KOTO TINGGI	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi (Rambu lalu lintas)	12	Unit	2.050.000	24.600.000	Provinsi		24.600.000				K3.2
		146	JEMBATAN MUARO JORONG IKAN BANYAK	GUNUANG OMEH/ PANDAM GADANG	Rehabilitasi Jembatan	15	M	80.000.000	1.200.000.000	Kabupaten/Kota	1.200.000.000					K3.2
		147	SIAMANG BUNYI - MUDIAK LIKI (R-021)	GUGUAK/ KUBANG	Rekonstruksi Jalan	4.400	M	2.500.000	11.000.000.000	Kabupaten/Kota	11.000.000.000					K3.2
		148	JEMBATAN UMPUN AUA	KAPUR IX/ GALUGUA	Rehabilitasi Jembatan	50	M	80.000.000	4.000.000.000	Kabupaten/Kota	4.000.000.000					K3.2
		149	SARILAMAK - KOMPI UNIT (R- 214)	HARAU/ SARILAMAK	Rekonstruksi Jalan	1.100	M	2.500.000	2.750.000.000	Kabupaten/Kota	2.750.000.000					K3.2

		150	BUKIK APIK LUAK BEGAK - TALANG ANAU (R-149)	GUNUANG OMEH KOTO TINGGI	Rehabilitasi Jalan	2.399	M	2.500.000	5.997.500.000	Kabupaten/Kota	5.997.500.000				K3.2
		151	JEMBATAN UJUANG LABUAH TUNGKAR	SITUJUAH LIMO NAGARI/ TUNGKA	Rehabilitasi Jembatan	35	M	80.000.000	2.800.000.000	Kabupaten/Kota	2.800.000.000				K3.2
		152	JEMBATAN LISUA	KAPUR IX/ GALUGUA	Rehabilitasi Jembatan	50	M	80.000.000	4.000.000.000	Kabupaten/Kota	4.000.000.000				K3.2
		153	JEMBATAN JORONG KOTO TINGGI RUMAH LIM	KAPUR IX/ KOTO LAMO	Rehabilitasi Jembatan	10	M	100.000.000	1.000.000.000	Kabupaten/Kota	1.000.000.000				K3.2
		154	JEMBATAN SAWAH GADANG BUMBUANG SITUJUAH BATUA	SITUJUAH LIMO NAGARI/ SITUJUAH BATUA	Rehabilitasi Jembatan	35	M	80.000.000	2.800.000.000	Kabupaten/Kota	2.800.000.000				K3.2
		155	JALAN TUNGKAR - SIMBATAK (R-063)	SITUJUAH LIMO NAGARI/ TUNGKA	Rekonstruksi Jalan	4.500	M	2.500.000	11.250.000.000	Kabupaten/Kota	11.250.000.000				K3.2
		156	GORONG-GORONG JALAN SARILAMAK	HARAU/ SARILAMAK	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	1	Paket	290.000.000	290.000.000	Kabupaten/Kota	290.000.000				K3.2
		157	JEMBATAN GANTUNG KOTO GILINGAN	KAPUR IX/ DURIAN TINGGI	Rehabilitasi Jembatan	50	M	80.000.000	4.000.000.000	Kabupaten/Kota	4.000.000.000				K3.2
		158	SIMPANG KUBANG - SIAMANG BUNYI (R-074)	GUGUAK/ KUBANG	Rekonstruksi Jalan	1.500	M	2.500.000	3.750.000.000	Kabupaten/Kota	3.750.000.000				K3.2
		159	JEMBATAN GANTUNG DAERAH TUNGGANG	KAPUR IX/ DURIAN TINGGI	Rehabilitasi Jembatan	50	M	80.000.000	4.000.000.000	Kabupaten/Kota	4.000.000.000				K3.2
		160	DRAINASE JALAN PURWAJAYA	HARAU/ SARILAMAK	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	1.700	M	20.588	35.000.000	Kabupaten/Kota	35.000.000				K3.2
		161	SEI DATA - KOTO TINGGI (R-223)	HARAU/ HARAU	Rekonstruksi Jalan	3.300	M	2.500.000	8.250.000.000	Kabupaten/Kota	8.250.000.000				K3.2
		162	JEMBATAN SARIAK LAWEH	AKABILURU/ SARIAK LAWEH	Rehabilitasi Jembatan	84	M	50.000.000	4.200.000.000	Kabupaten/Kota	4.200.000.000				K3.2
		163	KAPUR IX / NAGARI SIALANG JEMBATAN GANTUNG PANTAI LUBNA	KAPUR IX/ SIALANG	Rehabilitasi Jembatan	50	M	80.000.000	4.000.000.000	Kabupaten/Kota	4.000.000.000				K3.2
		164	JALAN JORONG PADANG TANGAH BARUAH GUNUANG	BUKIK BARISAN/ BARUAH GUNUANG	Rekonstruksi Jalan	1.075	M	1.860.465	2.000.000.000	Kabupaten/Kota	2.000.000.000				K3.2
		165	JEMBATAN DALAM KAMPUANG MUARO	GUNUANG OMEH KOTO TINGGI	Rehabilitasi Jembatan	10	M	50.000.000	500.000.000	Kabupaten/Kota	500.000.000				K3.2
		166	HULU AIA - LANDAI (R-088)	HARAU/ HARAU	Rekonstruksi Jalan	286	M	3.496.503	999.999.858	Kabupaten/Kota	999.999.858				K3.2
		167	KAPUR IX /NAGARI SIALANG JEMBATAN LIPEK PANDAN	KAPUR IX/ SIALANG	Rehabilitasi Jembatan	50	M	80.000.000	4.000.000.000	Kabupaten/Kota	4.000.000.000				K3.2
		168	JEMBATAN GANTUNG MONGAN	KAPUR IX/ DURIAN TINGGI	Rehabilitasi Jembatan	50	M	80.000.000	4.000.000.000	Kabupaten/Kota	4.000.000.000				K3.2
		169	MANGGIH - BTS KOTA PAYAKUMBUH (R-105)	SITUJUAH LIMO NAGARI/ SITUJUAH GADANG	Rekonstruksi Jalan	2.500	M	2.500.000	6.250.000.000	Kabupaten/Kota	6.250.000.000				K3.2
		170	JEMBATAN KAMPUNG DUYAN	KAPUR IX/ DURIAN TINGGI	Rehabilitasi Jembatan	50	M	80.000.000	4.000.000.000	Kabupaten/Kota	4.000.000.000				K3.2
		171	KAPUR IX / NAGARI MUARO PAITI JEMBATAN LUBUAK TAMPUI	KAPUR IX/ MUARO PAITI	Rehabilitasi Jembatan	50	M	80.000.000	4.000.000.000	Kabupaten/Kota	4.000.000.000				K3.2
		172	JEMBATAN PITOPANG	GUNUANG OMEH KOTO TINGGI	Rehabilitasi Jembatan	10	M	50.000.000	500.000.000	Kabupaten/Kota	500.000.000				K3.2
		173	JEMBATAN SUNGAI BAGONDANG	KAPUR IX/ KOTO BANGUN	Rehabilitasi Jembatan	50	M	80.000.000	4.000.000.000	Kabupaten/Kota	4.000.000.000				K3.2
		174	JEMBATAN Sederhana KUBU BETUNG - TK	KAPUR IX/ KOTO LAMO	Penggantian Jembatan	17	M	150.000.000	2.550.000.000	Kabupaten/Kota	2.550.000.000				K3.2
		175	JEMBATAN MUDI'AK DODOK	GUNUANG OMEH KOTO TINGGI	Rehabilitasi Jembatan	10	M	50.000.000	500.000.000	Kabupaten/Kota	500.000.000				K3.2
		176	KAPUR IX / NAGARI KOTO BANGUN JEMBATAN AIR KERUH	KAPUR IX/ KOTO BANGUN	Rehabilitasi Jembatan	50	M	80.000.000	4.000.000.000	Kabupaten/Kota	4.000.000.000				K3.2
		177	SP. SEI MANGKIRAI - SEI MANGKIRAI (R-106)	GUNUANG OMEH/ PANDAM GADANG	Rekonstruksi Jalan	2.500	M	2.500.000	6.250.000.000	Kabupaten/Kota	6.250.000.000				K3.2
		178	JEMBATAN SIPINANG	GUNUANG OMEH KOTO TINGGI	Rehabilitasi Jembatan	10	M	50.000.000	500.000.000	Kabupaten/Kota	500.000.000				K3.2
		179	SUAYAN - SIAMANG BUNYI (R-107)	AKABILURU/ SUAYAN	Rekonstruksi Jalan	5.501	M	2.776.796	15.275.154.796	Kabupaten/Kota	15.275.154.796				K3.2
		180	SUBARANG PARIK - PADANG SIANTAH (R-098)	AKABILURU/ KOTO TANGAH BATU AMPA	Rehabilitasi Jalan	1.500	M	2.500.000	3.750.000.000	Kabupaten/Kota	3.750.000.000				K3.2
		181	JEMBATAN SAWAH PADANG	AKABILURU/ SARIAK LAWEH	Rehabilitasi Jembatan	50	M	80.000.000	4.000.000.000	Kabupaten/Kota	4.000.000.000				K3.2
		182	KAPUR IX / NAGARI MUARO PAITI JEMBATAN BATANG TANGAI	KAPUR IX/ MUARO PAITI	Rehabilitasi Jembatan	50	M	80.000.000	4.000.000.000	Kabupaten/Kota	4.000.000.000				K3.2
		183	JEMBATAN TITIAN BERAYUN	GUNUANG OMEH KOTO TINGGI	Rehabilitasi Jembatan	10	M	50.000.000	500.000.000	Kabupaten/Kota	500.000.000				K3.2
		184	JALAN MONUMEN MENUJU HUNTAP	GUNUANG OMEH KOTO TINGGI	Rekonstruksi Jalan	1.500	M	3.333.333	4.999.999.500	Kabupaten/Kota	4.999.999.500				K3.2
		185	JEMBATAN AMBACANG KUNYIK	AKABILURU/ SARIAK LAWEH	Rehabilitasi Jembatan	50	M	80.000.000	4.000.000.000	Kabupaten/Kota	4.000.000.000				K3.2
		186	KAPUR IX /NAGARI SIALANG JEMBATAN GANTUNG KOPI KINCIU	KAPUR IX/ SIALANG	Relokasi Jembatan	50	M	80.000.000	4.000.000.000	Kabupaten/Kota	4.000.000.000				K3.2
		187	JEMBATAN JORONG KOTO TINGGI II MAEK	BUKIK BARISAN/ MAEK	Rehabilitasi Jembatan	10	M	50.000.000	500.000.000	Kabupaten/Kota	500.000.000				K3.2
		188	MUARO - TALANG ANAU (R-026)	GUNUANG OMEH TALANG ANAU	Rekonstruksi Jalan	2200	M	2.500.000	5.500.000.000	Kabupaten/Kota	5.500.000.000				K3.2
		189	ROGEH - SIBALADUANG (R-117)	LUAK/ SUNGAI KAMUYANG	Rekonstruksi Jalan	1200	M	1.666.667	2.000.000.400	Kabupaten/Kota	2.000.000.400				K3.2
		190	JEMBATAN BARUAH ANDALEH	AKABILURU/ SARIAK LAWEH	Rehabilitasi Jembatan	50	M	80.000.000	4.000.000.000	Kabupaten/Kota	4.000.000.000				K3.2
		191	KAPUR IX / NAGARI MUARO PAITI JEMBATAN AYIA ANGEK	KAPUR IX/ MUARO PAITI	Rehabilitasi Jembatan	50	M	80.000.000	4.000.000.000	Kabupaten/Kota	4.000.000.000				K3.2

		192	KOTO RONAH - LUBUAK TABUAN (R-187)	PANGKALAN KOTO BARU/ PANGKALAN	Rekonstruksi Jalan	11.100	M	6.150.665	68.272.381.500	Kabupaten/Kota	68.272.381.500					K3.2
		193	JEMBATAN PUTIAH	KAPUR IX/ KOTO LAMO	Rehabilitasi Jembatan	10	M	100.000.000	1.000.000.000	Kabupaten/Kota	1.000.000.000					K3.2
		194	PIOBANG - KOTO PANJANG (R-007)	PAYAKUMBUH/ PIOBANG	Rekonstruksi Jalan	3.100	M	2.864.075	8.878.632.500	Kabupaten/Kota	8.878.632.500					K3.2
		195	JEMBATAN PAUUAH SANGIK	AKABILURU/ PAUH SANGIK	Penggantian Jembatan	23.5294	M	170.000.085	4.000.000.001	Kabupaten/Kota	4.000.000.001					K3.2
		196	JEMBATAN MUDIAK KIDA	KAPUR IX/ KOTO LAMO	Penggantian Jembatan	14	M	150.000.000	2.100.000.000	Kabupaten/Kota	2.100.000.000					K3.2
		197	JEMBATAN ATEH KOTO NAGARI SUNGAI RIMBANG	SULIKI/ SUNGAI RIMBANG	Rehabilitasi Jembatan	40	M	100.000.000	4.000.000.000	Kabupaten/Kota	4.000.000.000					K3.2
		198	JALAN JORONG BANDA RAIK	BUKIK BARISAN/ BARUAH SUNJUANG	Rekonstruksi Jalan	911.05882	M	2.195.247	1.999.999.401	Kabupaten/Kota	1.999.999.401					K3.2
		199	JEMBATAN SIMPANG DUO SUNGAI DONDAU	KAPUR IX/ GALUGUA	Rehabilitasi Jembatan	50	M	80.000.000	4.000.000.000	Kabupaten/Kota	4.000.000.000					K3.2
		200	KOTO BARU - BUKIK APIK (R-006)	PAYAKUMBUH/ KOTO BARU SIMALANGGANG	Rekonstruksi Jalan	4.297	M	3.063.633	13.164.431.001	Kabupaten/Kota	13.164.431.001					K3.2
		201	GORONG-GORONG JALAN SARILAMAK	HARAU/ SARILAMAK	DED Drainase Kawasan IKK Sarilamak	1	dokumen	1.000.000.000	1.000.000.000	Kabupaten/Kota	1.000.000.000					K3.2
		202	JEMBATAN MUDIAK KULIK	KAPUR IX/ KOTO LAMO	Rehabilitasi Jembatan	12	M	100.000.000	1.200.000.000	Kabupaten/Kota	1.200.000.000					K3.2
		203	LAKUANG - LUAK BEGAK (R-185)	GUNJUANG OMEH/ KOTO TINGGI	Rekonstruksi Jalan	2.400	M	2.500.000	6.000.000.000	Kabupaten/Kota	6.000.000.000					K3.2
		204	KAPUR IX / NAGARI SIALANG JEMBATAN LUBUAK OGUNG	KAPUR IX/ SIALANG	Rehabilitasi Jembatan	50	M	80.000.000	4.000.000.000	Kabupaten/Kota	4.000.000.000					K3.2
		205	JEMBATAN SEI LAGO	KAPUR IX/ KOTO LAMO	Rehabilitasi Jembatan	10	M	100.000.000	1.000.000.000	Kabupaten/Kota	1.000.000.000					K3.2
		206	JEMBATAN JORONG MUDIAK LIKI	SULIKI/ KURAI	Rehabilitasi Jembatan	40	M	80.000.000	3.200.000.000	Kabupaten/Kota	3.200.000.000					K3.2
		207	JEMBATAN SEI PIMPING	KAPUR IX/ KOTO LAMO	Rehabilitasi Jembatan	10	M	100.000.000	1.000.000.000	Kabupaten/Kota	1.000.000.000					K3.2
		208	TANJUANG HARO - SITUJUJUH GADANG (R-042)	SITUJUJUH LIMO NAGARI/ SITUJUJUH GADANG	Rekonstruksi Jalan	8.699	M	2.500.000	21.747.500.000	Kabupaten/Kota	21.747.500.000					K3.2
		209	JEMBATAN SUNGAI GONDANG	KAPUR IX/ GALUGUA	Rehabilitasi Jembatan	50	M	80.000.000	4.000.000.000	Kabupaten/Kota	4.000.000.000					K3.2
		210	Infrastruktur Tanggap Darurat	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Infrastruktur Tanggap Darurat	1	paket	9.235.789.474	9.235.789.474	Pusat		9.235.789.474				K2
2.2	SUMBER DAYA AIR								41.246.237.057		19.511.637.060	-	20.421.766.000	1.312.833.997	-	
		1	SUNGAI BATANG SINAMAR P1-23 (BWS)	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Pembangunan sarana prasarana pengendalian banjir Batang Sinamar dan anak sungainya di Kota Bukittinggi, Kab. Agam, Kota Payakumbuh dan Kab. Limapuluh kota	1	Paket	20.196.018.000	20.196.018.000	Pusat		20.196.018.000				K3.1
		2	SUNGAI BATANG HARAU (DISEBELAH DINAS PERIKANAN)	HARAU/ TARANTANG	Normalisasi/Restorasi Sungai	1	Paket	225.748.000	225.748.000	Pusat		225.748.000				K3.1
		3	BIAYA PENUNJANG REHABILITASI JARINGAN IRRIGASI PERMUKAAN	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	-	1	kegiatan	170.000.000	170.000.000	Kabupaten/Kota	170.000.000					K4
		4	DRAINASE DI DEPAN MASJID JORONG PUAR DATA NAGARI KOTO TINGGI (	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	-	1	Paket	180.000.000	180.000.000	Kabupaten/Kota	180.000.000					K4
		5	DI TANJUANG UBA	AKABILURU/ SARIK LAWEH	-	9	M	133.359.667	1.200.237.003	Kabupaten/Kota	1.200.237.003					K4
		6	GORONG-GORONG JALAN SARILAMAK	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	-	1	Paket	290.000.000	290.000.000	Kabupaten/Kota	290.000.000					K4
		7	BIAYA PENUNJANG PEMBANGUNAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	-	1	Paket	90.000.000	90.000.000	Kabupaten/Kota	90.000.000					K4
		8	DI NAMANG SIMALANGGANG	PAYAKUMBUH/ SIMALANGGANG	-	602.297	M3	1.200.001	722.757.000	Kabupaten/Kota	722.757.000					K4
		9	DI PINCURAN RUYUANG	AKABILURU/ SUAYAN	-	500	M	3.000.000	1.500.000.000	Kabupaten/Kota	1.500.000.000					K4
		10	SUNGAI BATANG SINAMAR TITIK P9 NAGARI PANDAM GADANG	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	-	5771,43	M3	35.000	202.000.000	Kabupaten/Kota	202.000.000					K4
		11	SUNGAI BATANG SINAMAR TITIK P6 NAGARI KOTO TINGGI	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	-	7025,83	M3	35.000	245.904.000	Kabupaten/Kota	245.904.000					K4
		12	SUNGAI BATANG SINAMAR TITIK P5 NAGARI KOTO TINGG7025.82857142857	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	-	6285,71	M3	35.000	220.000.000	Kabupaten/Kota	220.000.000					K4
		13	SUNGAI BATANG SINAMAR TITIK P4 NAGARI KOTO TINGG	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	-	7142,86	M3	35.000	250.000.000	Kabupaten/Kota	250.000.000					K4
		14	SUNGAI BATANG SINAMAR TITIK P2 NAGARI KOTO TINGG	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	-	7542,86	M3	35.000	264.000.000	Kabupaten/Kota	264.000.000					K4
		15	SUNGAI BATANG SINAMAR TITIK P21 NAGARI VII KOTO TALAGO(JORONG KOTO KOGIAK - SIPINGAI)	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	-	12857,1	M3	35.000	450.000.000	Kabupaten/Kota	450.000.000					K4
		16	SUNGAI BATANG SINAMAR TITIK P1 NAGARI KOTO TINGGI	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	-	9200	M3	35.000	322.000.000	Kabupaten/Kota	322.000.000					K4
		17	SUNGAI BATANG SINAMAR TITIK P13 NAGARI PANDAM GADANG	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	-	9000	M3	35.000	315.000.000	Kabupaten/Kota	315.000.000					K4
		18	SUNGAI BATANG SINAMAR TITIK P12 NAGARI PANDAM GADANG	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	-	6742,86	M3	35.000	236.000.000	Kabupaten/Kota	236.000.000					K4
		19	BIAYA PENUNJANG NORMALISASI/RESTORASI SUNGAI	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	-	1805,4	M3	35.000	63.189.000	Kabupaten/Kota	63.189.000					K4

		20	SUNGA SARASAH BUNTA (DISEBELAH DINAS PERIKANAN KAB LIMA PULUH KOTA)	HARAU/ TARANTANG	-	4285,71	M3	35.000	150.000.001	Kabupaten/Kota	150.000.001					K4
		21	DI BATANG MUNGO	HARAU/ TARAM	-	41	M	5.853.659	240.000.019	Kabupaten/Kota	240.000.019					K4
		22	D.I LAKUAK SIPORAM	BUKIK BARISAN/ BARUAH GUNJANG	-	13	M	11.538.462	150.000.006	Kabupaten/Kota	150.000.006					K4
		23	SUNGA BATANG MAEK NAGARI GUNJANG MALINTANG (BELAKANG SUBAU AI JUBIDIYAH)	PANGKALAN KOTO BARU/ GUNJANG MALINTANG	-	2857,14	M3	35.000	100.000.001	Kabupaten/Kota	100.000.001					K4
		24	SUNGA BATANG MAEK NAGARI GUNJANG MALINTANG (BELAKANG TK NUBUL HIDAYAH)	PANGKALAN KOTO BARU/ GUNJANG MALINTANG	-	2857,14	M3	35.000	100.000.001	Kabupaten/Kota	100.000.001					K4
		25	SUNGA BATANG KAPUR NAGARI SIALANG	KAPUR IX/ SIALANG	-	21102,4	M3	35.000	738.585.001	Kabupaten/Kota	738.585.001					K4
		26	SUNGA BATANG MUNGO JORONG SEI BULUAH KASOK	HARAU/ SARILAMAK	-	50	M	2.944.700	147.235.000	Kabupaten/Kota	147.235.000					K4
		27	IRIGASI SUBALADUANG	LUAK/ SUNGAI KAMUYANG	-	66.6667	M	1.200.000	80.000.040	Kabupaten/Kota	80.000.040					K4
		28	D.I BANDA PANJANG	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Rehabilitasi jaringan irigasi	700	M	4.250.000	2.975.000.000	Kabupaten/Kota	2.975.000.000					K4
		29	DI SEI TALANG	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Rehabilitasi jaringan irigasi	1200	M	2.900.000	3.480.000.000	Kabupaten/Kota	3.480.000.000					K4
		30	D.I BANDA KINA	BUKIK BARISAN/ BARUAH GUNJANG	Rehabilitasi Bendungan	13	M	49.468.154	643.086.002	Kabupaten/Kota	643.086.002					K3.2
		31	D.I KAMPUANG AUA	BUKIK BARISAN/ BARUAH GUNJANG	Rehabilitasi Bendungan	1	Paket	1.599.154.000	1.599.154.000	Kabupaten/Kota	1.599.154.000					K3.2
		32	D.I BANDA KINA	BUKIK BARISAN/ BARUAH GUNJANG	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	416,67	M3	1.200.000	500.004.000	Kabupaten/Kota	500.004.000					K3.2
		33	D.I BANDA POLAM	BUKIK BARISAN/ BARUAH GUNJANG	Rehabilitasi Bendungan	8	M	54.858.250	438.866.000	Kabupaten/Kota	438.866.000					K3.2
		34	D.I KAMPUANG AUA	BUKIK BARISAN/ BARUAH GUNJANG	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	411,316	M3	1.200.000	493.579.000	Kabupaten/Kota	493.579.000					K3.2
		35	D.I BANDA POLAM	BUKIK BARISAN/ BARUAH GUNJANG	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	285,825	M3	1.200.000	342.990.000	Kabupaten/Kota	342.990.000					K3.2
		36	D.I BANDA KINA	BUKIK BARISAN/ BARUAH GUNJANG	DED Jaringan Irigasi Kabupaten	1	dokumen	200.000.000	200.000.000	Kabupaten/Kota	200.000.000					K3.2
		37	D.I BANDAR BARU	BUKIK BARISAN/ BARUAH GUNJANG	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	38	M	602.605	22.898.990	Kabupaten/Kota	22.898.990					K3.2
		38	D.I BANDA KAJAI	AKABILURU/ BATU HAMPAR	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	12	M	3.686.333	44.235.996	Kabupaten/Kota	44.235.996					K3.2
		39	BANDA PEMBUANG JORONG SARILAMAK KANDANG LAMO	HARAU/ SARILAMAK	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	1	Paket	23.949.000	23.949.000	Masyarakat		23.949.000				K3.2
		40	BANDA SUBALADUANG (CHECK DAM IRIGASI)	LUAK/ SUNGAI KAMUYANG	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	66,67	M3	1.200.000	80.004.000	Masyarakat		80.004.000				K3.2
		41	BANDA RUMPUK LUNAK 1,2,3	BUKIK BARISAN/ BARUAH GUNJANG	Rehabilitasi Bendungan	5	M	80.512.800	402.564.000	Masyarakat		402.564.000				K3.2
		42	BANDA BIGAU	BUKIK BARISAN/ BARUAH GUNJANG	Rehabilitasi Bendungan	7	M	58.290.571	408.033.997	Masyarakat		408.033.997				K3.2
		43	BANDA RUMPUK LUNAK 1,2,3	BUKIK BARISAN/ BARUAH GUNJANG	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	331,902	M3	1.200.002	398.283.000	Masyarakat		398.283.000				K3.2
		44	IRIGASI BANDA BIGAU	BUKIK BARISAN/ BARUAH GUNJANG	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	287,43	M3	1.200.000	344.916.000	Kabupaten/Kota	344.916.000					K4
2,3	ENERGI								1.249.464.000		-	-	-	-	1.249.464.000	
		1	JARINGAN TENAGA LISTRIK	GUNJANG OMEH	Perbaikan dan pembangunan jaringan listrik yang terdampak untuk dukungan pemulihan pasca bencana	1	Set	230.000.000	230.000.000	Swasta					230.000.000	K3.2
		2	JARINGAN TENAGA LISTRIK	GUNJANG OMEH	Pelunasan tagihan listrik	1	Wilayah	700.000.000	700.000.000	Swasta					700.000.000	K3.2
		3	JARINGAN TENAGA LISTRIK	GUNJANG OMEH	-				-	Swasta					-	K3.2
		4	JARINGAN TENAGA LISTRIK	GUNJANG OMEH	Biaya pasang baru daya 900W hunian tetap Jorong Ala Angek, Nagari Koto Tinggi, Kec. Gunung OmeH	204	Sambungan	1.566.000	319.464.000	Swasta					319.464.000	K3.2
2,4	AIR DAN SANITASI								168.326.823.683		152.029.999.998	-	5.263.157.895	507.350.000	-	
		1	SPAM IKK TUGU BELA NEGARA UNIT SULIKI	GUNJANG OMEH KOTO TINGGI	Penyelenggaraan Air Minum yang Aman	3	Paket	3.377.555.555	10.132.666.666	Kabupaten/Kota	10.132.666.666					K1
		2	INTAKE PAMSIMAS BANDA RAIT	BUKIK BARISAN/ BARUAH GUNJANG	Penyelenggaraan Air Minum yang Aman	3	Paket	10.132.666.667	30.398.000.000	Kabupaten/Kota	30.398.000.000					K1
		3	PIPA PAMSIMAS BATU SODAH	GUNJANG OMEH KOTO TINGGI	Penyelenggaraan Air Minum yang Aman	3	Paket	10.132.666.667	30.398.000.000	Kabupaten/Kota	30.398.000.000					K1
		4	SPAM NAGARI PANDAM GADANG	GUNJANG OMEH PANDAM GADANG	Penyelenggaraan Air Minum yang Aman	3	Paket	10.132.666.667	30.398.000.000	Kabupaten/Kota	30.398.000.000					K1
		5	BAK RESERVOAR SPAM BATU HAMPA	AKABILURU/ BATU HAMPAR	Penyelenggaraan Air Minum yang Aman	3	Paket	10.132.666.667	30.398.000.000	Kabupaten/Kota	30.398.000.000					K1
		6	SPAM IKK TUGU BELA NEGARA UNIT SULIKI	GUNJANG OMEH KOTO TINGGI	Penyelenggaraan Air Minum yang Aman	3	Paket	3.377.555.555	10.132.666.666	Kabupaten/Kota	10.132.666.666					K1
		7	SPAM IKK TUGU BELA NEGARA UNIT SULIKI	GUNJANG OMEH KOTO TINGGI	Penyelenggaraan Air Minum yang Aman	3	Paket	3.377.555.555	10.132.666.666	Kabupaten/Kota	10.132.666.666					K1
		8	BIAYA PENUNJANG PERLUASAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) JARINGAN PERPIPAAN	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	-	1	Paket	40.000.000	40.000.000	Kabupaten/Kota	40.000.000					K4

		9	PAMSIMAS NAGARI SARIK LAWEH PERLUASAN JARINGAN PERPIPAAN DAN SAMBUNGAN RUMAH	AKABILURU/ SARIK LAWEH	-	1	Paket	180.000.000	180.000.000	Masyarakat			180.000.000		K4
		10	SPAM JORONG SIMANTUANG NAGARI SITUJUAH GADANG	SITUJUAH LIMO NAGARI/ SITUJUAH GADANG	-	1	Paket	327.350.000	327.350.000	Masyarakat			327.350.000		K4
		11	Pengendalian Pelaksanaan, Kinerja Program dan Koordinasi Pengadaan Tanah Pembangunan Infrastruktur Cipta Karya	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Pengendalian Pelaksanaan, Kinerja Program dan Koordinasi Pengadaan Tanah Pembangunan Infrastruktur Cipta Karya	3	Paket	5.263.157.895	15.789.473.685	Pusat		5.263.157.895			K2
2,5			POS DAN TELEKOMUNIKASI						600.000.000		600.000.000	-	-	-	-
		1	BIAYA INTERNET STARLINK	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	Paket	9.800.000	9.800.000	Kabupaten/Kota	9.800.000				K4
		2	BIAYA PUBLIKASI MEDIA	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Relasi Media	1	Paket	150.000.000	150.000.000	Kabupaten/Kota	150.000.000				K4
		3	PENGADAAN PERALATAN ELEKTRONIK (TV, PC, LAPTOP, DAN PERLENGKAPAN LOGISTIK KANTOR)	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1	Paket	440.200.000	440.200.000	Kabupaten/Kota	440.200.000				K4
3			EKONOMI PRODUKTIF						57.187.265.402		6.458.864.100	-	29.076.921.310	21.651.479.992	-
3,1			PERTANIAN DAN PERKEBUNAN						27.901.354.588		2.842.429.900	-	15.650.444.687	9.408.480.001	-
		1	PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Tanaman	9	ha	900.000	8.100.000	Pusat		8.100.000			K2
		2	PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	-	0,47	ha	12.000.000	5.640.000	Pusat		5.640.000			K2
		3	PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	-	3,3	ha	3.000.000	9.900.000	Pusat		9.900.000			K2
		4	PENGLOLAAN PRODUKSI TANAMAN SEREALIA TANAMAN PANGAN	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Tanaman	54	ha	420.000	22.680.000			22.680.000			K2
		5	PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	-	1	kegiatan	33.333.333	33.333.333	Pusat		33.333.333			K2
		6	PEMANTAUAN KONDISI LAHAN TERDAMPAK BENCAHA BERBASIS CITRA SATELIT	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	-	1	Paket	8.333.333	8.333.333	Pusat		8.333.333			K2
		7	PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Penyediaan alat dan mesin pertanian pascapanen	21	Unit	278.224.381	5.842.712.001	Pusat		5.842.712.001			K2
		8	PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Penyediaan alat dan mesin pertanian prapanen	108	Unit	56.564.815	6.109.000.020	Pusat		6.109.000.020			K2
		9	PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Penyediaan bantuan pembenah tanah	15020	ha	85.000	1.276.700.000	Pusat		1.276.700.000			K2
		10	PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Irigasi Perpipaan	2	ha	100.000.000	200.000.000	Pusat		200.000.000			K2
		11	PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Irigasi Perpompaaan	8	Unit	160.000.000	1.280.000.000	Pusat		1.280.000.000			K2
		12	PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Optimalisasi Reproduksi	24000	-	34.565	829.560.000	Pusat		829.560.000			K2
		13	PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Bantuan Benih Padi	58	Paket	420.000	24.360.000	Pusat		24.360.000			K2
		14	PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Bantuan Benih Padi	0,3	ha	420.000	126.000	Pusat		126.000			K2
		15	PEMBANGUNAN JUT/JAPRO KELTAN PUCUK MUDO	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	460	M	390.000	179.400.000	Kabupaten/Kota	179.400.000				K4
		16	PEMBANGUNAN JUT/JAPRO KELTAN AMANAH SAIYO	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	385	M	390.000	150.150.000	Kabupaten/Kota	150.150.000				K4
		17	PEMBANGUNAN JUT/JAPRO KELTAN SATAMPANG BANIAH	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	385	M	390.000	150.150.000	Kabupaten/Kota	150.150.000				K4
		18	PEMBANGUNAN JUT/JAPRO KELTAN HIDUP BERSAMA	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	435	M	390.000	169.650.000	Kabupaten/Kota	169.650.000				K4
		19	PEMBANGUNAN JUT/JAPRO KELTAN TUKOGAK LANSIE	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	435	M	390.000	169.650.000	Kabupaten/Kota	169.650.000				K4
		20	PEMBANGUNAN JUT/JAPRO KELTAN BANDAR KUBU	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	385	M	390.000	150.150.000	Kabupaten/Kota	150.150.000				K4
		21	PEMBANGUNAN JUT/JAPRO KELTAN HARAPAN BARU	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	385	M	390.000	150.150.000	Kabupaten/Kota	150.150.000				K4
		22	PEMBANGUNAN JUT/JAPRO KELTAN PAUH SAIYO	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	385	M	390.000	150.150.000	Kabupaten/Kota	150.150.000				K4
		23	PEMBANGUNAN JUT/JAPRO LOKASI KELTAN TANGKOPU JAYA - KOTO BANGUN-KAPUR IX	KAPUR IX/ KOTO BANGUN	-	379	M	390.000	147.810.000	Kabupaten/Kota	147.810.000				K4
		24	PEMBANGUNAN JUT/JAPRO LOKASI KELTAN PAUAH SAIYO-TARANTANG- HARAU	HARAU/ TARANTANG	-	385	M	390.000	150.150.000	Kabupaten/Kota	150.150.000				K4
		25	PEMBANGUNAN JUT/JAPRO LOKASI KELTAN PANTANG MUNDUR-SARIK LAWEH-AKABILURU	AKABILURU/ SARIK LAWEH	-	385	M	390.000	150.150.000	Kabupaten/Kota	150.150.000				K4
		26	PEMBANGUNAN JUT/JAPRO LOKASI KELTAN KOTO JAYA-KOTO LAMO-KAPUR IX	KAPUR IX/ KOTO LAMO	-	456	M	390.000	177.840.000	Kabupaten/Kota	177.840.000				K4
		27	PEMBANGUNAN JUT/JAPRO LOKASI KELTAN HARAPAN TANI-KOTO TINGGI- GUNUANG OMEH	GUNUANG OMEH/ KOTO TINGGI	-	385	M	390.000	150.150.000	Kabupaten/Kota	150.150.000				K4
		28	PEMBANGUNAN JUT/JAPRO LOKASI GAPOKTAN LUBUAK AUA-KOTO TINGGI- GUNUANG OMEH	GUNUANG OMEH/ KOTO TINGGI	-	385	M	390.000	150.150.000	Kabupaten/Kota	150.150.000				K4
		29	PELAKSANAAN KEGIATAN GERAKAN PANGAN MURAH	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1	Paket	49.999.900	49.999.900	Kabupaten/Kota	49.999.900				K4

		30	BANTUAN HIBAH RUMAH BIBIT KECAMATAN GUNUANG OMEH	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1	Paket	25.000.000	25.000.000	Kabupaten/Kota	25.000.000					K4
		31	BANTUAN HIBAH RUMAH BIBIT NAGARI BARUAH GUNUANG	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1	Paket	25.000.000	25.000.000	Kabupaten/Kota	25.000.000					K4
		32	IBAH KEBENCANAAN DALAM RANGKA PENANGANAN PASCA KEBENCANAAN PADA KWT TUAH SAKATO NAGARI PANDAM GADANG	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1	Paket	7.500.000	7.500.000	Kabupaten/Kota	7.500.000					K4
		33	PENGAWASAN PEMBANGUNAN JUT/JAPRO	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	-	24	Dokumen	5.000.000	120.000.000	Kabupaten/Kota	120.000.000					K4
		34	BANTUAN SOSIAL DALAM RANGKA KEBUN B2SA	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1	Paket	60.000.000	60.000.000	Kabupaten/Kota	60.000.000					K4
		35	BOP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGANKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Biaya Operasional	1	Paket	45.000.000	45.000.000	Kabupaten/Kota	45.000.000					K4
		36	DESAIN PEMBANGUNAN JUT/JAPRO	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	-	24	Dokumen	5.000.000	120.000.000	Kabupaten/Kota	120.000.000					K4
		37	BIAYA PENUNJANG PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JALAN USAHA TANI	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	-	1	kegiatan	44.080.000	44.080.000	Kabupaten/Kota	44.080.000					K4
		38	JUT AIA MALANTAI BATU TIKA	GUGUAK/ GUGUAK VII KOTO	Pembangunan JUT Aia Malanteh Batu Tika	385	M	390.000	150.150.000	Kabupaten/Kota	150.150.000					K4
		39	PEMBANGUNAN JUT /JAPRO LOKASI KELTAN VENUS-BARUAH GUNJANG- BUKIK BARISAN	BUKIK BARISAN/ BARUAH GUNJANG	-	385	M	390.000	150.150.000	Masyarakat			150.150.000			K4
		40	PEMBANGUNAN JUT /JAPRO LOKASI KELTAN KARYA MAJU-BARUAH GUNJANG- BUKIK BARISAN	BUKIK BARISAN/ BARUAH GUNJANG	-	385	M	390.000	150.150.000	Masyarakat			150.150.000			K4
		41	PEMBANGUNAN JUT /JAPRO LOKASI KELTAN BUAH KUBANG-BARUAH GUNJANG-BUKIK BARISAN	BUKIK BARISAN/ BARUAH GUNJANG	-	385	M	390.000	150.150.000	Masyarakat			150.150.000			K4
		42	PEMBANGUNAN JUT /JAPRO LOKASI KELTAN BANDAR KUBU-MAEK-BUKIK BARISAN	BUKIK BARISAN/ MAEK	-	385	M	390.000	150.150.000	Masyarakat			150.150.000			K4
		43	PEMBANGUNAN JUT /JAPRO LOKASI KELTAN LUBUAK BULAN-SIMPANG KAPUR MUNGGA	MUNGKA/ SIMPANG KAPUAK	-	385	M	390.000	150.150.000	Masyarakat			150.150.000			K4
		44	PEMBANGUNAN JUT /JAPRO LOKASI KELTAN TANI HARAPAN - DURIAN TINGGI KAPUR IX	KAPUR IX/ DURIAN TINGGI	-	385	M	390.000	150.150.000	Masyarakat			150.150.000			K4
		45	PEMBANGUNAN JUT /JAPRO LOKASI KELTAN HARAPAN MAJU - SIALANG - KAPUR IX	KAPUR IX/ SIALANG	-	385	M	390.000	150.150.000	Masyarakat			150.150.000			K4
		46	PEMBANGUNAN JUT /JAPRO LOKASI KELTAN SUNGAI GEMURUH - KOTO BANGUN-KAPUR IX	KAPUR IX/ KOTO BANGUN	-	384	M	390.000	149.760.000	Masyarakat			149.760.000			K4
		47	PEMBANGUNAN JUT /JAPRO LOKASI KELTAN PANEN RAYA - KOTO BANGUN - KAPUR IX	KAPUR IX/ KOTO BANGUN	-	384	M	390.000	149.760.000	Masyarakat			149.760.000			K4
		48	PEMBANGUNAN JUT /JAPRO LOKASI KELTAN SIALANG-PAUH SANGIK- AKABILURU	AKABILURU/ PAUH SANGIK	-	385	M	390.000	150.150.000	Masyarakat			150.150.000			K4
		49	PANDAM GADANG	GUNUANG OMEH/ PANDAM GADANG	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	0,48	ha	5.400.000	2.592.000	Masyarakat			2.592.000			K3.2
		50	TUNGGAH LANSIE	GUNUANG OMEH KOTO TINGGI	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	0,2	ha	14.400.000	2.880.000	Masyarakat			2.880.000			K3.2
		51	KOTO TALAGO	GUGUAK/ VII KOTO TALAGO	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	1	ha	30.000.000	30.000.000	Masyarakat			30.000.000			K3.2
		52	NURJAL	GUNUANG OMEH KOTO TINGGI	Pemulihan IKM (Bantuan aset pondok atau dapur produksi IKM rusak yang rusak)	1	Unit	5.000.000	5.000.000	Masyarakat			5.000.000			K3.2
		53	SUNGA RIMBANG	SULIK/ SUNGAI RIMBANG	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	0,34	ha	5.400.000	1.836.001	Masyarakat			1.836.001			K3.2
		54	ANDALEH	LUAK/ ANDALEH	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	4	ha	5.400.000	21.600.000	Masyarakat			21.600.000			K3.2
		55	POKTAN KARUPUAK RIGI BATU KOMBA	GUNUANG OMEH/ PANDAM GADANG	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	0,48	ha	14.400.000	6.912.000	Masyarakat			6.912.000			K3.2
		56	SAMSURIZAL	GUNUANG OMEH KOTO TINGGI	Pemulihan IKM (Bantuan aset pondok atau dapur produksi IKM rusak yang rusak)	1	Unit	5.000.000	5.000.000	Masyarakat			5.000.000			K3.2
		57	RENGGI ANDOZA PUTRA	GUNUANG OMEH/ KOTO TINGGI	Pemulihan IKM (Bantuan aset heller yang tanahnya patah dan lahan jemur padi rusak)	1	Unit	50.000.000	50.000.000	Masyarakat			50.000.000			K3.2
		58	MUNGO	LUAK/ MUNGO	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	4	Ha	5.400.000	21.600.000	Masyarakat			21.600.000			K3.2
		59	NURJAL	GUNUANG OMEH KOTO TINGGI	Pemulihan IKM (Bantuan aset pondok atau dapur produksi IKM rusak yang rusak)	1	Unit	5.000.000	5.000.000	Masyarakat			5.000.000			K3.2

	60	ANIZAR	GUNJANG OMEH KOTO TINGGI	Pemulihan IKM (Bantuan aset rumah dan alat produksi IKM gula aren yang rusak)	1	Unit	25.000.000	25.000.000	Masyarakat				25.000.000	K3.2
	61	ELFIA OSFI	GUNJANG OMEH KOTO TINGGI	Pemulihan IKM (Bantuan aset pondok atau dapur produksi IKM gula aren yang rusak)	1	Unit	5.000.000	5.000.000	Masyarakat				5.000.000	K3.2
	62	JEMBATAN PASIA (5 METER)	GUNJANG OMEH KOTO TINGGI	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	5	M	40.000.000	200.000.000	Masyarakat				200.000.000	K3.2
	63	SAIFUL WARDI	GUNJANG OMEH KOTO TINGGI	Pemulihan IKM (Bantuan aset pondok atau dapur produksi IKM gula aren yang rusak)	1	Unit	5.000.000	5.000.000	Masyarakat				5.000.000	K3.2
	64	JEMBATAN MUDIAK DADOK (5 METER)	GUNJANG OMEH KOTO TINGGI	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	5	M	50.000.000	250.000.000	Masyarakat				250.000.000	K3.2
	65	BINA TANI	GUNJANG OMEH KOTO TINGGI	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	0,4	Ha	14.400.000	5.760.000	Masyarakat				5.760.000	K3.2
	66	ABASRI	GUNJANG OMEH KOTO TINGGI	Pemulihan IKM (Bantuan aset pondok atau dapur produksi IKM gula aren yang rusak)	1	Unit	5.000.000	5.000.000	Masyarakat				5.000.000	K3.2
	67	JEMBATAN TALAO (5 METER)	GUNJANG OMEH KOTO TINGGI	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	5	M	40.000.000	200.000.000	Masyarakat				200.000.000	K3.2
	68	SAIYO SAKATO	GUNJANG OMEH KOTO TINGGI	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	0,3	Ha	14.400.000	4.320.000	Masyarakat				4.320.000	K3.2
	69	DARWINIS	GUNJANG OMEH KOTO TINGGI	Pemulihan IKM (Bantuan aset pondok atau dapur produksi IKM gula aren yang rusak)	1	Unit	5.000.000	5.000.000	Masyarakat				5.000.000	K3.2
	70	SEBERANG AIR	LAREH SAGO HALABAN' BATU PAYUANG	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	1,5	Ha	5.400.000	8.100.000	Masyarakat				8.100.000	K3.2
	71	JEMBATAN JORONG AIA ANGEK (5 METER)	GUNJANG OMEH KOTO TINGGI	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	5	M	40.000.000	200.000.000	Masyarakat				200.000.000	K3.2
	72	MUKHLIS	GUNJANG OMEH KOTO TINGGI	Pemulihan IKM (Bantuan aset pondok atau dapur produksi IKM gula aren yang rusak)	1	Unit	5.000.000	5.000.000	Masyarakat				5.000.000	K3.2
	73	INEM	GUNJANG OMEH KOTO TINGGI	Pemulihan IKM (Bantuan aset produksi IKM huter yang rusak dan rusak)	1	Unit	50.000.000	50.000.000	Masyarakat				50.000.000	K3.2
	74	KELTAN AMANAH	GUNJANG OMEH KOTO TINGGI	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	3,5	Ha	14.400.000	50.400.000	Masyarakat				50.400.000	K3.2
	75	JEMBATAN KELOK AJA (5 METER)	GUNJANG OMEH KOTO TINGGI	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	5	M	40.000.000	200.000.000	Masyarakat				200.000.000	K3.2
	76	SAIPULWARDI	GUNJANG OMEH KOTO TINGGI	Pemulihan IKM (Bantuan aset pondok atau dapur produksi IKM gula aren yang rusak)	1	Unit	4.000.000	4.000.000	Masyarakat				4.000.000	K3.2
	77	KELOMPOK TANI GUA IMAM BONJOL	GUNJANG OMEH KOTO TINGGI	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	3,5	Ha	14.400.000	50.400.000	Masyarakat				50.400.000	K3.2
	78	ZELMA PONDRI	GUNJANG OMEH KOTO TINGGI	Pemulihan IKM (Bantuan aset pondok atau dapur produksi IKM gula aren yang rusak)	1	Unit	5.000.000	5.000.000	Masyarakat				5.000.000	K3.2
	79	JEMBATAN TANJUNG (5 METER)	GUNJANG OMEH KOTO TINGGI	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	5	M	40.000.000	200.000.000	Masyarakat				200.000.000	K3.2
	80	SYAMSUL RIZAL	GUNJANG OMEH KOTO TINGGI	Pemulihan IKM (Bantuan aset pondok atau dapur produksi IKM gula aren yang rusak)	1	Unit	4.000.000	4.000.000	Masyarakat				4.000.000	K3.2
	81	KWT KANURO	GUNJANG OMEH KOTO TINGGI	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	2	Ha	14.400.000	28.800.000	Masyarakat				28.800.000	K3.2
	82	JEMBATAN DALAM KAMPUNG (5 METER)	GUNJANG OMEH KOTO TINGGI	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	5	M	40.000.000	200.000.000	Masyarakat				200.000.000	K3.2
	83	PERINTIS	GUNJANG OMEH KOTO TINGGI	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	2	Ha	14.400.000	28.800.000	Masyarakat				28.800.000	K3.2
	84	DASWIR	GUNJANG OMEH KOTO TINGGI	Pemulihan IKM (Bantuan aset pondok atau dapur produksi IKM gula aren yang rusak)	1	Unit	5.000.000	5.000.000	Masyarakat				5.000.000	K3.2
	85	JEMBATAN PITOPANG (5 METER)	GUNJANG OMEH KOTO TINGGI	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	5	M	40.000.000	200.000.000	Masyarakat				200.000.000	K3.2
	86	HENDRI WIJAYA	GUNJANG OMEH KOTO TINGGI	Pemulihan IKM (Bantuan aset pondok atau dapur produksi IKM gula aren yang rusak)	1	Unit	5.000.000	5.000.000	Masyarakat				5.000.000	K3.2
	87	JEMBATAN TADAH (5 METER)	GUNJANG OMEH KOTO TINGGI	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	5	M	40.000.000	200.000.000	Masyarakat				200.000.000	K3.2

		88	ZESHERMI	BUKIK BARISAN/ SUNGAI NANANG	Pemulihan IKM (Bantuan aset rumah dan alat produksi IKM terdampak yang rusak)	1	Unit	40.000.000	40.000.000	Masyarakat				40.000.000	K3.2
		89	KELTAN NUSA INDAH	GUNUANG OMEH KOTO TINGGI	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	3,5	Ha	14.400.000	50.400.000	Masyarakat				50.400.000	K3.2
		90	ZAINUL AKHYAR	GUNUANG OMEH KOTO TINGGI	Pemulihan IKM (Bantuan aset pondok atau dapur produksi IKM gula aren yang rusak)	1	Unit	5.000.000	5.000.000	Masyarakat				5.000.000	K3.2
		91	KELTAN SATAMPANG BANIAH	GUNUANG OMEH KOTO TINGGI	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	2	Ha	14.400.000	28.800.000	Masyarakat				28.800.000	K3.2
		92	HAMILUL ZEFRI	GUNUANG OMEH KOTO TINGGI	Pemulihan IKM (Bantuan aset pondok atau dapur produksi IKM gula aren yang rusak)	1	Unit	5.000.000	5.000.000	Masyarakat				5.000.000	K3.2
		93	BALAI PANJANG	LAREH SAGO HALABAN/ BALAI PANJANG	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	3	Ha	30.000.000	90.000.000	Masyarakat				90.000.000	K3.2
		94	KWT CEMPAKA	PANGKALAN KOTO BARU/ MANGGILANG	Perbaikan Rumah Bibit dan Stimulan Ekosistem	1	Unit	8.700.000	8.700.000	Masyarakat				8.700.000	K3.2
		95	JEMBATAN TITIAN BARAYUN (5 METER)	GUNUANG OMEH KOTO TINGGI	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	5	M	40.000.000	200.000.000	Masyarakat				200.000.000	K3.2
		96	JASRI	GUNUANG OMEH KOTO TINGGI	Pemulihan IKM (Bantuan aset pondok atau dapur produksi IKM gula aren yang rusak)	1	Unit	5.000.000	5.000.000	Masyarakat				5.000.000	K3.2
		97	KWT SARUGO	GUNUANG OMEH KOTO TINGGI	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	5,17	Ha	14.400.000	74.448.000	Masyarakat				74.448.000	K3.2
		98	HENDRA SAPUTRA	GUNUANG OMEH KOTO TINGGI	Pemulihan IKM (Bantuan aset pondok atau dapur produksi IKM gula aren yang rusak)	1	Unit	5.000.000	5.000.000	Masyarakat				5.000.000	K3.2
		99	SUARDI	GUNUANG OMEH KOTO TINGGI	Pemulihan IKM (Bantuan aset pondok atau dapur produksi IKM gula aren yang rusak)	1	Unit	5.000.000	5.000.000	Masyarakat				5.000.000	K3.2
		100	HARAPAN MAJU	GUNUANG OMEH KOTO TINGGI	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	5,15	Ha	14.400.000	74.160.000	Masyarakat				74.160.000	K3.2
		101	ARDIANTO	BUKIK BARISAN/ SUNGAI NANANG	Pemulihan IKM (Bantuan aset rumah dan alat produksi IKM terdampak yang rusak)	1	Unit	9.000.000	9.000.000	Masyarakat				9.000.000	K3.2
		102	ARPENDI	GUNUANG OMEH KOTO TINGGI	Pemulihan IKM (Bantuan aset pondok atau dapur produksi IKM gula aren yang rusak)	1	Unit	5.000.000	5.000.000	Masyarakat				5.000.000	K3.2
		103	ALDINISWAN	GUNUANG OMEH KOTO TINGGI	Pemulihan IKM (Bantuan aset pondok atau dapur produksi IKM gula aren yang rusak)	1	Unit	4.000.000	4.000.000	Masyarakat				4.000.000	K3.2
		104	BALAI PANJANG	LAREH SAGO HALABAN/ BALAI PANJANG	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	3	Ha	30.000.000	90.000.000	Masyarakat				90.000.000	K3.2
		105	PUCUAK MUDO	GUNUANG OMEH KOTO TINGGI	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	5	Ha	14.400.000	72.000.000	Masyarakat				72.000.000	K3.2
		106	MUNGKA	MUNGKA/ MUNGKA	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	3	Ha	30.000.000	90.000.000	Masyarakat				90.000.000	K3.2
		107	ARIF RAHMAN HAKIM	GUNUANG OMEH KOTO TINGGI	Pemulihan IKM (Bantuan aset pondok atau dapur produksi IKM gula aren yang rusak)	1	Unit	4.000.000	4.000.000	Masyarakat				4.000.000	K3.2
		108	HADIYATUL FITRI	BUKIK BARISAN/ SUNGAI NANANG	Pemulihan IKM (Bantuan aset rumah dan alat produksi IKM ujan kue yang rusak)	1	Unit	12.500.000	12.500.000	Masyarakat				12.500.000	K3.2
		109	MURAHMAN	GUNUANG OMEH KOTO TINGGI	Pemulihan IKM (Bantuan aset pondok atau dapur produksi IKM gula aren yang rusak)	1	Unit	5.000.000	5.000.000	Masyarakat				5.000.000	K3.2
		110	IVAN VIKTOR NUGROHO	GUNUANG OMEH KOTO TINGGI	Pemulihan IKM (Bantuan aset pondok atau dapur produksi IKM gula aren yang rusak)	1	Unit	3.500.000	3.500.000	Masyarakat				3.500.000	K3.2
		111	HARAPAN BARU	GUNUANG OMEH KOTO TINGGI	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	20,09	Ha	14.400.000	289.296.000	Masyarakat				289.296.000	K3.2
		112	SEI RIMBANG	SULIKI/ SUNGAI RIMBANG	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	12	Ha	100.000.000	1.200.000.000	Masyarakat				1.200.000.000	K3.2
		113	KELTAN	GUNUANG OMEH KOTO TINGGI	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	3	Ha	30.000.000	90.000.000	Masyarakat				90.000.000	K3.2
		114	JEMBATAN RAMBEK (5 METER)	MUNGKA/ MUNGKA	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	5	M	40.000.000	200.000.000	Masyarakat				200.000.000	K3.2
		115	JEMBATAN SIPINANG (5 METER)	GUNUANG OMEH KOTO TINGGI	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	5	M	40.000.000	200.000.000	Masyarakat				200.000.000	K3.2
		116	SUPRATMAN	GUNUANG OMEH KOTO TINGGI	Pemulihan IKM (Bantuan aset pondok atau dapur produksi IKM gula aren yang rusak)	1	Unit	4.000.000	4.000.000	Masyarakat				4.000.000	K3.2

		117	KELTAN BUNDO SAIYO	GUNJANG OMEH KOTO TINGGI	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	12,44	Ha	14.400.000	179.136.000	Masyarakat				179.136.000		K3.2
		118	JEMBATAN BATANG SIRADUAK (5 METER)	GUNJANG OMEH KOTO TINGGI	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	5	M	40.000.000	200.000.000	Masyarakat				200.000.000		K3.2
		119	SAHRILMARIDON	GUNJANG OMEH KOTO TINGGI	Pemulihan IKM (Bantuan aset pondok atau dapur produksi IKM gula aren yang rusak)	1	Unit	4.000.000	4.000.000	Masyarakat				4.000.000		K3.2
		120	PINANG BALIRIK	GUNJANG OMEH KOTO TINGGI	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	5,15	Ha	14.400.000	74.160.000	Masyarakat				74.160.000		K3.2
		121	SUNGAI RIMBANG	SULIKI/ SUNGAI RIMBANG	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	18	Ha	30.000.000	540.000.000	Masyarakat				540.000.000		K3.2
		122	TAIPUL WARDI	GUNJANG OMEH KOTO TINGGI	Pemulihan IKM (Bantuan aset pondok atau dapur produksi IKM gula aren yang rusak)	1	Unit	5.000.000	5.000.000	Masyarakat				5.000.000		K3.2
		123	BANDA RAIK	BUKIK BARISAN/ BARUAH GUNJANG	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan				-	Masyarakat				-		K3.2
		124	JORONG PARONTIAN	BUKIK BARISAN/ BARUAH GUNJANG	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan				-	Masyarakat				-		K3.2
		125	TARAM	HARAU/ TARAM	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	4	Ha	5.400.000	21.600.000	Masyarakat				21.600.000		K3.2
		126	JONI YULIANDRI	GUNJANG OMEH KOTO TINGGI	Pemulihan IKM (Bantuan aset pondok atau dapur produksi IKM gula aren yang rusak)	1	Unit	5.000.000	5.000.000	Masyarakat				5.000.000		K3.2
		127	PADANG TANGAH	BUKIK BARISAN/ BARUAH GUNJANG	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan				-	Masyarakat				-		K3.2
		128	KOTO TINGGI	GUNJANG OMEH KOTO TINGGI	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	2	Ha	30.000.000	60.000.000	Masyarakat				60.000.000		K3.2
		129	ARDI SAPUTRA	GUNJANG OMEH KOTO TINGGI	Pemulihan IKM (Bantuan aset rumah dan alat produksi IKM gula aren yang rusak)	1	Unit	40.000.000	40.000.000	Masyarakat				40.000.000		K3.2
		130	PINTU KOTO	HARAU/ BUKIK LIMBUKU	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	0,5	Ha	5.400.000	2.700.000	Masyarakat				2.700.000		K3.2
		131	KELTAN SERBAGUNA	BUKIK BARISAN/ BARUAH GUNJANG	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	0,7	Ha	5.400.000	3.780.000	Masyarakat				3.780.000		K3.2
		132	HIDUP BERSAMA	GUNJANG OMEH KOTO TINGGI	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	0,2	Ha	14.400.000	2.880.000	Masyarakat				2.880.000		K3.2
		133	TIRTA BENING	BUKIK BARISAN/ BARUAH GUNJANG	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	0,5	Ha	5.400.000	2.700.000	Masyarakat				2.700.000		K3.2
		134	KOTO MALINTANG	HARAU/ BUKIK LIMBUKU	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	13	Ha	30.000.000	390.000.000	Masyarakat				390.000.000		K3.2
		135	BARUAH GUNJANG II	BUKIK BARISAN/ BARUAH GUNJANG	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	15	Ha	80.000.000	1.200.000.000	Masyarakat				1.200.000.000		K3.2
		136	ZAINAL ARIFIN	GUNJANG OMEH KOTO TINGGI	Pemulihan IKM (Bantuan aset pondok atau dapur produksi IKM gula aren yang rusak)	1	Unit	5.000.000	5.000.000	Masyarakat				5.000.000		K3.2
3,2	PETERNAKAN								1.821.941.500				1.821.941.500	-	-	-
		1	OBAT-OBATAN UNTUK BANTUAN SOSIAL BARANG YANG DIRENCANAKAN UNTUK INDIVIDU	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	1	Paket	98.347.000	98.347.000	Kabupaten/Kota			98.347.000			K4
		2	BELANJA N2 CAIR	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	1	Paket	23.345.000	23.345.000	Kabupaten/Kota			23.345.000			K4
		3	BIMTEK BANSOS	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	1	Paket	16.507.500	16.507.500	Kabupaten/Kota			16.507.500			K4
		4	BIMTEK UNTUK PENERIMA KAMBING	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	1	Paket	46.800.000	46.800.000	Kabupaten/Kota			46.800.000			K4
		5	BELANJA BANTUAN TERNAK KAMBING	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	1	Paket	819.000.000	819.000.000	Kabupaten/Kota			819.000.000			K4
		6	BELANJA KANDANG KAMBING	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	1	Paket	176.202.000	176.202.000	Kabupaten/Kota			176.202.000			K4
		7	BELANJA PAKET TERNAK AYAM	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	1	Paket	400.440.000	400.440.000	Kabupaten/Kota			400.440.000			K4

		8	REHAP UNIT PUSKESWAN LIMBANANG	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	1	Unit	217.500.000	217.500.000	Kabupaten/Kota	217.500.000					K4
		9	JASA KONSULTANSI PERENCANAAN KONTRUKSI PUSKESWAN LIMBANANG	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	1	Paket	13.000.000	13.000.000	Kabupaten/Kota	13.000.000					K4
		10	JASA KONSULTANSI PENGAWASAN PUSKESWAN LIMBANANG	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	1	Paket	10.800.000	10.800.000	Kabupaten/Kota	10.800.000					K4
3,3	PERIKANAN								21.658.299.824		1.191.966.500	-	8.253.333.333	12.212.999.991	-	
		1	POKDAKAN LUBUAK MATO KUCIANG	GUNJANG OMEH KOTO TINGGI	Pengadaan bantuan benih dan pakan ikan (Benih ikan nila)	3	Paket	452.333.333	1.356.999.999	Masyarakat				1.356.999.999		K1
		2	POKDAKAN LUBUAK MATO KUCIANG	GUNJANG OMEH KOTO TINGGI	Pengadaan bantuan benih dan pakan ikan (Pakan F-99)	3	Paket	452.333.333	1.356.999.999	Masyarakat				1.356.999.999		K1
		3	POKDAKAN SUMBER REZEKI	GUNJANG OMEH KOTO TINGGI	Pengadaan bantuan benih dan pakan ikan (Benih ikan nila)	3	Paket	452.333.333	1.356.999.999	Masyarakat				1.356.999.999		K1
		4	POKDAKAN LUBUAK MATO KUCIANG	GUNJANG OMEH KOTO TINGGI	Pengadaan bantuan benih dan pakan ikan (Pakan Ikan -2)	3	Paket	452.333.333	1.356.999.999	Masyarakat				1.356.999.999		K1
		5	POKDAKAN HARAPAN MAJU	GUNJANG OMEH KOTO TINGGI	Pengadaan bantuan benih dan pakan ikan (Benih ikan nila)	3	Paket	452.333.333	1.356.999.999	Masyarakat				1.356.999.999		K1
		6	POKDAKAN HARAPAN MAJU	GUNJANG OMEH KOTO TINGGI	Pengadaan bantuan benih dan pakan ikan (Pakan F-99)	3	Paket	452.333.333	1.356.999.999	Masyarakat				1.356.999.999		K1
		7	POKDAKAN HARAPAN MAJU	GUNJANG OMEH KOTO TINGGI	Pengadaan bantuan benih dan pakan ikan (Pakan Ikan -2)	3	Paket	452.333.333	1.356.999.999	Masyarakat				1.356.999.999		K1
		8	POKDAKAN SUMBER REZEKI	GUNJANG OMEH KOTO TINGGI	Pengadaan bantuan benih dan pakan ikan (Pakan F-99)	3	Paket	452.333.333	1.356.999.999	Masyarakat				1.356.999.999		K1
		9	POKDAKAN SUMBER REZEKI	GUNJANG OMEH KOTO TINGGI	Pengadaan bantuan benih dan pakan ikan (Pakan Ikan -2)	3	Paket	452.333.333	1.356.999.999	Masyarakat				1.356.999.999		K1
		10	REHAB DAN PENGADAAN PERALATAN / PERLENGKAPAN BBI	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Paket	455.846.500	455.846.500	Kabupaten/Kota	455.846.500					K4
		11	BIMBINGAN TEKNIS ENGELOLAAN LUBUK LARANGAN UNTUK POKMASWAS PENERIMA BANTUAN BENIH DAN PAKAN	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	180	Paket	232.500	41.850.000	Kabupaten/Kota	41.850.000					K4
		12	PENGADAAN BENIH DAN PAKAN IKAN UNTUK LUBUK LARANGAN DI DAERAH TERDAMPK BENCANA POKMASWAS HULU SUNGAR	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	1	Paket	40.600.000	40.600.000	Kabupaten/Kota	40.600.000					K4
		13	PENGADAAN BENIH DAN PAKAN IKAN UNTUK LUBUK LARANGAN DI DAERAH TERDAMPK BENCANA POKMASWAS LUBUAK SARUMPIN KOTO	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	1	Paket	34.800.000	34.800.000	Kabupaten/Kota	34.800.000					K4
		14	PENGADAAN BENIH DAN PAKAN IKAN UNTUK LUBUK LARANGAN DI DAERAH TERDAMPK BENCANA POKMASWAS LUBUK KILANGAN	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	1	Paket	34.800.000	34.800.000	Kabupaten/Kota	34.800.000					K4
		15	PENGADAAN BENIH DAN PAKAN IKAN UNTUK LUBUK LARANGAN DI DAERAH TERDAMPK BENCANA POKMASWAS SAIYO MUDIAK LIKI	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	1	Paket	39.150.000	39.150.000	Kabupaten/Kota	39.150.000					K4
		16	PENGADAAN BENIH DAN PAKAN IKAN UNTUK LUBUK LARANGAN DI DAERAH TERDAMPK BENCANA POKMASWAS UMBULUK MUDO	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	1	Paket	40.600.000	40.600.000	Kabupaten/Kota	40.600.000					K4
		17	BIMBINGAN TEKNIS PEMBESARAN IKAN GURAMI DAN IKAN NILA	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	1	Paket	105.787.500	105.787.500	Kabupaten/Kota	105.787.500					K4
		18	PENGADAAN BENIH DAN PAKAN IKAN NILA UNTUK POKDAKAN EMBUN PAGI DAN POKDAKAN KARYA MAJU BERSAMA NAGARI KOTO TINGGI KEC. GUNJANG OMEH	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	1	Paket	16.840.000	16.840.000	Kabupaten/Kota	16.840.000					K4
		19	PENGADAAN BENIH DAN PAKAN IKAN NILA UNTUK POKDAKAN KAYU CUPANG, POKDAKAN HARAPAN JAYA, POKDAKAN MARONGIANG SAIYO, POKDAKAN PURNAMA DAN POKDAKAN MINANG SAIYO II NAGARI MAEK KEC. BUKIT BARISAN	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	1	Paket	42.100.000	42.100.000	Kabupaten/Kota	42.100.000					K4
		20	PENGADAAN BENIH DAN PAKAN IKAN NILA UNTUK POKDAKAN HARAPAN INDAH NAGARI BARUAH GUNJANG KEC. BUKIT BARISAN	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	1	Paket	8.420.000	8.420.000	Kabupaten/Kota	8.420.000					K4
		21	PENGADAAN BENIH DAN PAKAN IKAN GURAMI UNTUK POKDAKAN KALUMPANG DAN POKDAKAN SAIYO SAKATO NAGARI MAEK KEC. BUKIT BARISAN	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	1	Paket	16.880.000	16.880.000	Kabupaten/Kota	16.880.000					K4
		22	PENGADAAN BENIH DAN PAKAN IKAN NILA UNTUK POKDAKAN SUKA DAMAI NAGARI SUNGAI RIMBANG KEC. SULIKI	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	1	Paket	8.420.000	8.420.000	Kabupaten/Kota	8.420.000					K4
		23	PENGADAAN BENIH DAN PAKAN IKAN GURAMI UNTUK POKDAKAN PALTOB NAGARI ANDANG KEC. SULIKI	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	1	Paket	8.440.000	8.440.000	Kabupaten/Kota	8.440.000					K4
		24	PENGADAAN BENIH DAN PAKAN IKAN GURAMI UNTUK POKDAKAN PONDOM BAINAI NAGARI SUNGAI RIMBANG KEC. SULIKI	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	1	Paket	8.440.000	8.440.000	Kabupaten/Kota	8.440.000					K4
		25	PENGADAAN BENIH DAN PAKAN IKAN NILA UNTUK POKDAKAN SINAR BATU PUTIH DAN POKDAKAN NGALAU INDAH I NAGARI PANDAM GADANG KEC.	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	1	Paket	16.840.000	16.840.000	Kabupaten/Kota	16.840.000					K4

		26	BIMTEK CARA BUDIDAYA IKAN DI KOLAM TERPAL (4 LOKASI PENERIMA HIBAH KOLAM TERPAL)	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	1	Paket	37.200.000	37.200.000	Kabupaten/Kota	37.200.000						K4
		27	PENGADAAN KOLAM TERPAL, BENIH DAN PAKAN (POKDakan HARAPAN MAJU NAG KOTO TINGGI KEC. GUNUNG OMEH)	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	1	Paket	49.564.000	49.564.000	Kabupaten/Kota	49.564.000						K4
		28	PENGADAAN KOLAM TERPAL, BENIH, DAN PAKAN (POKDakan BERKAT BENIH NAG. KOTO TINGGI KEC. GUNUNG OMEH)	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	1	Paket	49.564.000	49.564.000	Kabupaten/Kota	49.564.000						K4
		29	"PENGADAAN KOLAM TERPAL, BENIH DAN PAKAN (POKDakan TALANG SARUEH, NAGARI SUNGAI NANIANG, KECAMATAN BUKIK BARISAN)"	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	1	Paket	49.564.000	49.564.000	Kabupaten/Kota	49.564.000						K4
		30	" PENGADAAN KOLAM TERPAL, BENIH DAN PAKAN (POKDakan HIJAU DAUN NAGARI BARUAH GUNJANG KECAMATAN BUKIK BARISAN)"	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	1	Paket	49.564.000	49.564.000	Kabupaten/Kota	49.564.000						K4
		31	BIMBINGAN TEKNIS PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN UNTUK POKLAHSAR TUNAS MUDA DI NAGARI PANDAM GADANG	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	1	Paket	10.462.500	10.462.500	Kabupaten/Kota	10.462.500						K4
		32	"PENGADAAN PERALATAN PENGOLAHAN POKLAHSAR TUNAS MUDA NAGARI PANDAM GADANG KECAMATAN GUNJANG OMEH"	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	1	Paket	26.234.000	26.234.000	Kabupaten/Kota	26.234.000						K4
		33	Rehabilitasi Prasarana Pascabencana Bidang Perikanan	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Rehabilitasi Prasarana Pascabencana Bidang Perikanan	3	Paket	2.751.111.111	8.253.333.333	pusat			8.253.333.333				K2
3,4	PERDAGANGAN								298.068.700		298.068.700	-	-	-	-	-	
		1	PEMBANGUNAN/REVITALISASI PASAR MUARA PAITI	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	1	Unit	60.000.000	60.000.000	Kabupaten/Kota	60.000.000						K4
		2	PEMBANGUNAN/REVITALISASI PASAR DAERAH DANGUNG-DANGUNG	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	1	Unit	161.968.700	161.968.700	Kabupaten/Kota	161.968.700						K4
		3	KONSULTASI PERENCANAAN REVITALISASI PASAR	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	1	Paket	15.000.000	15.000.000	Kabupaten/Kota	15.000.000						K4
		4	JASA PENGAWASAN REVITALISASI PASAR	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	1	Paket	27.000.000	27.000.000	Kabupaten/Kota	27.000.000						K4
		5	PERBAIKAN MOBIL TERA	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	1	Unit	34.100.000	34.100.000	Kabupaten/Kota	34.100.000						K4
3,5	PERINDUSTRIAN								3.184.289.473		-	-	3.184.289.473	-	-	-	
		1	PENDAMPINGAN DAN FASILITASI MESIN /PERALATAN DAN BAHAN BAKU BAGI IKM TERDAMPYAK	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	-	34	Paket	50.500.000	1.717.000.000	Pusat			1.717.000.000				K2
		2	PENDAMPINGAN DAN FASILITASI MESIN /PERALATAN DAN BAHAN BAKU BAGI IKM TERDAMPYAK	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	-	3	Paket	50.500.000	151.500.000	Pusat			151.500.000				K2
		3	FASILITASI RUMAH PRODUKSI MELALUI KEMITRAAN DENGAN K/L DAN/ATAU INDUSTRI BESAR CSR	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Facilitasi Rumah Produksi Melalui Kemitraan dengan K/L dan/atau Industri Besar CSR	1	Paket	263.157.895	263.157.895	Pusat			263.157.895				K2
		4	FASILITASI RUMAH PRODUKSI MELALUI KEMITRAAN DENGAN K/L DAN/ATAU INDUSTRI BESAR CSR	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Facilitasi Rumah Produksi Melalui Kemitraan dengan K/L dan/atau Industri Besar CSR	1	Paket	131.578.947	131.578.947	Pusat			131.578.947				K2
		5	FASILITASI RUMAH PRODUKSI MELALUI KEMITRAAN DENGAN K/L DAN/ATAU INDUSTRI BESAR CSR	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Facilitasi Rumah Produksi Melalui Kemitraan dengan K/L dan/atau Industri Besar CSR	1	Paket	131.578.947	131.578.947	Pusat			131.578.947				K2
		6	REVITALISASI SENTRA MELALUI DAK (USULAN BARU)	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Revitalisasi Sentra Melalui DAK (Usulan Baru)	1	Paket	789.473.684	789.473.684	Pusat			789.473.684				K2
3,6	PARWISATA								304.457.500		304.457.500	-	-	-	-	-	
		1	PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAM /RIGASI / TEMBOK PENAHAN PENGAMAN BANGUNAN TAMAN ANAK AKA BARAYUN	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	1	Paket	18.000.000	18.000.000	Kabupaten/Kota	18.000.000						K4
		2	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAM /RIGASI / TEMBOK PENAHAN PENGAMAN BANGUNAN TAMAN ANAK AKA BARAYUN	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	1	Paket	12.000.000	12.000.000	Kabupaten/Kota	12.000.000						K4
		3	REHABILITASI / PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA TAMAN BERMAIN ANAK AKA BARAYUN	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	1	Paket	75.000.000	75.000.000	Kabupaten/Kota	75.000.000						K4

		4	BOP PENGADAAN/PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA DALAM DAYA TARIK WISATA UNGGULAN KABUPATEN/KOTA	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Biaya Operasional	1	Paket	39.457.500	39.457.500	Kabupaten/Kota	39.457.500					K4
		5	DAM IRI GASI TAMAN BERMAIN ANAK LEMBAH HARAU	HARAU/ HARAU	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Pembangunan DAM Irigasi)	1	Paket	150.000.000	150.000.000	Kabupaten/Kota	150.000.000					K3.2
		6	OBJEK WISATA IKAN BANYAK	GUNJANG OMEH/ PANDAM GADANG	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2	Spot	5.000.000	10.000.000	Kelurahan/Nagari/ Desa	10.000.000					K3.2
3,7	KOPERASI DAN UKM							2.018.853.817			-	-	1.988.853.817	30.000.000	-	
		1	DELI MASNI	GUNJANG OMEH/ PANDAM GADANG	Pemulihan Usaha Mikro (Bantuan aset lapak jajanan dan kedai kopi, barang dagangan dan bantuan bahan pokok)	1	Unit	3.000.000	3.000.000	Masyarakat				3.000.000		K1
		2	ERNA	GUNJANG OMEH/ PANDAM GADANG	Pemulihan Usaha Mikro (Bantuan aset lapak jajanan dan kedai kopi, barang dagangan dan bantuan bahan pokok)	1	Unit	3.000.000	3.000.000	Masyarakat				3.000.000		K1
		3	MUTIA GUSTIZON	GUNJANG OMEH/ PANDAM GADANG	Pemulihan Usaha Mikro (Bantuan aset lapak jajanan dan kedai kopi, dan barang dagangan)	1	Unit	3.000.000	3.000.000	Masyarakat				3.000.000		K1
		4	ERWINA YOZA	GUNJANG OMEH/ PANDAM GADANG	Pemulihan Usaha Mikro (Bantuan aset pedagang sate dan kedai harian, dan barang dagangan)	1	Unit	3.000.000	3.000.000	Masyarakat				3.000.000		K1
		5	SATRIA RICCI ANDILA	BUKIK BARISAN/ BARUAH GUNJANG	Pemulihan Usaha Mikro (Bantuan aset pedagang sate, dan barang dagangan)	1	Unit	3.000.000	3.000.000	Masyarakat				3.000.000		K1
		6	HALBY AZWAR	GUNJANG OMEH/ PANDAM GADANG	Pemulihan Usaha Mikro (Bantuan aset toko elektronik)	1	Unit	3.000.000	3.000.000	Masyarakat				3.000.000		K1
		7	ERMAWILIS	GUNJANG OMEH/ PANDAM GADANG	Pemulihan Usaha Mikro (Bantuan aset kedai harian dan kedai kopi, barang dagangan dan bantuan bahan pokok)	1	Unit	3.000.000	3.000.000	Masyarakat				3.000.000		K1
		8	ONDRA NOFENDRA	GUNJANG OMEH/ PANDAM GADANG	Pemulihan Usaha Mikro (Bantuan aset kedai kopi dan gorengan yang pondasinya terakris harian)	1	Unit	3.000.000	3.000.000	Masyarakat				3.000.000		K1
		9	JASWANDI	BUKIK BARISAN/ BARUAH GUNJANG	Pemulihan Usaha Mikro (Bantuan aset kedai harian, barang dagangan dan bantuan bahan pokok)	1	Unit	3.000.000	3.000.000	Masyarakat				3.000.000		K1
		10	RUKNIA	GUNJANG OMEH/ PANDAM GADANG	Pemulihan Usaha Mikro (Bantuan aset lapak jajanan dan kedai kopi, barang dagangan dan bantuan bahan pokok)	1	Unit	3.000.000	3.000.000	Masyarakat				3.000.000		K1
		11	KEMUDAHAN PERSYARATAN PENGAJUAN KUR	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Kemudahan Persyaratan Pengajuan KUR	116	Unit	428.571	49.714.236	Pusat			49.714.236			K2
		12	SKEMA PEMBIAYAAN KELOMPOK DENGAN PNM	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Skema Pembiayaan Kelompok dengan PNM	163	Unit	120.800	19.690.345	Pusat			19.690.345			K2
		13	LANDING PAGE "UMKM SUMATERA BANGKIT BERSAMA"	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Landing Page "UMKM Sumatera Bangkit Bersama"	53	Unit	903.633	47.892.558	Pusat			47.892.558			K2
		14	UMKM DIGITAL FINANCE EXPO	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	UMKM Digital Finance Expo	72	Unit	1.347.222	96.999.984	Pusat			96.999.984			K2
		15	AKTIVASI UMKM BANGKIT BERSAMA	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Aktivasi UMKM Bangkit Bersama	6	Unit	25.000.000	150.000.000	Pusat			150.000.000			K2
		16	PENDAMPINGAN AKSES PEMBIAYAAN WIRUSAHA	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Pendampingan Akses Pembiayaan Wirusaha	163	Unit	2.975.000	484.925.000	Pusat			484.925.000			K2
		17	PENINGKATAN KAPASITAS BAGI WIRUSAHA TERDAMPK BENCANA	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Peningkatan kapasitas bagi Wirusaha terdampak bencana	139	Unit	2.960.000	411.440.000	Pusat			411.440.000			K2
		18	PERLUASAN PASAR BAGI WIRUSAHA TERDAMPK	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Perluasan Pasar Bagi Wirusaha terdampak	163	Unit	2.975.000	484.925.000	Pusat			484.925.000			K2
		19	PENINGKATAN KAPASITAS BAGI PENDAMPING WIRUSAHA TERDAMPK BENCANA	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Peningkatan kapasitas bagi Pendamping Wirusaha terdampak bencana	82	Unit	2.966.667	243.266.694	Pusat			243.266.694			K2
4	SOSIAL							127.011.030.423			101.459.590.505	6.437.083.333	19.114.356.585	-	-	
4,1	KESEHATAN							46.170.574.725			40.688.190.506	-	5.482.384.219	-	-	
		1	BANDA RAIK	BUKIK BARISAN/ BARUH GUNUNG	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya (RANI/Pengembangan bangunan)	1	Paket	2.000.000.000	2.000.000.000	Kabupaten/Kota	2.000.000.000					K1
		2	BANDA RAIK	BUKIK BARISAN/ BARUH GUNUNG	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Jalan cor menuju Poskesri Batah)	1	Paket	2.000.000.000	2.000.000.000	Kabupaten/Kota	2.000.000.000					K1
		3	BANDA RAIK	BUKIK BARISAN/ BARUH GUNUNG	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Peningkatan Gedung Poskesri)	1	Paket	2.000.000.000	2.000.000.000	Kabupaten/Kota	2.000.000.000					K1

		4	PEMATANG AUA	BUKIK BARISAN/ SUNGAI NANING	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Retakan di teras samping Kiri Poskesti dan perbaikan gedung)	1	Paket	2.000.000.000	2.000.000.000	Kabupaten/Kota	2.000.000.000					K1
		5	BATU BALABUAH	BUKIK BARISAN/ SUNGAI NANING	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Retak Dinding Ruang Pelayanan)	1	Paket	2.000.000.000	2.000.000.000	Kabupaten/Kota	2.000.000.000					K1
		6	BATU BALABUAH	BUKIK BARISAN/ SUNGAI NANING	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Tanah Turun dan Retakan di pinggir Gedung)	1	Paket	2.000.000.000	2.000.000.000	Kabupaten/Kota	2.000.000.000					K1
		7	BARUH GUNUNG	BUKIK BARISAN	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas (Plafon Puskesmas dan Gedung)	1	Paket	2.000.000.000	2.000.000.000	Kabupaten/Kota	2.000.000.000					K1
		8	BARUH GUNUNG	BUKIK BARISAN	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas (DAM Bangunan Puskesmas)	1	Paket	3.000.000.000	3.000.000.000	Kabupaten/Kota	3.000.000.000					K1
		9	BARUH GUNUNG	BUKIK BARISAN	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas (Pencoran Keliling Puskesmas)	1	Paket	13.000.000.000	13.000.000.000	Kabupaten/Kota	13.000.000.000					K1
		10	PERLINDUNGAN SOSIAL/ PELAYANAN PUBLIK KEPADA MASYARAKAT	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	-	63	Orang	500.000	31.500.000	Pusat		31.500.000				K2
		11	PENGADAAN ALKES DAN SARANA PENDUKUNG LAIN DI PUSKESMAS	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Pengadaan Alkes dan Sarana Pendukung lain di Puskesmas	1	Paket	3.539.344.262	3.539.344.262	Pusat		3.539.344.262				K2
		12	PENGEMBANGAN POJOK BACA UNTUK ANAK DALAM SITUASI DARURAT	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Pengembangan pojok baca untuk anak dalam situasi darurat	2	Paket	17.500.000	35.000.000	Pusat		35.000.000				K2
		13	FASILITASI PENYUSUNAN SUARA ANAK DALAM SITUASI BENCANA	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Fasilitasi penyusunan Suara Anak dalam Situasi Bencana	3	Paket	25.000.000	75.000.000	Pusat		75.000.000				K2
		14	PENYEDIAAN LAYANAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Penyediaan Layanan Perempuian Korban Kekerasan	3	Paket	19.753.086	59.259.258	Pusat		59.259.258				K2
		15	PERENCANAAN KONSTRUKSI (DED) PEMBANGUNAN RS IKK SARILAMAK	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	1	Paket	1.643.964.000	1.643.964.000	Kabupaten/Kota	1.643.964.000					K4
		16	PENGADAAN ALAT KESEHATAN	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1	Paket	589.068.000	589.068.000	Kabupaten/Kota	589.068.000					K4
		17	PEMENUHAN UHC	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	Paket	6.618.758.506	6.618.758.506	Kabupaten/Kota	6.618.758.506					K4
		18	JASA KONSULTAN PENGAWASAN KONSTRUKSI PUSKESMAS KOTO TINGGI	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Pengembangan Puskesmas	1	Paket	18.000.000	18.000.000	Kabupaten/Kota	18.000.000					K4
		19	JASA KONSULTAN PERENCANAAN PUSKESMAS KOTO TINGGI	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Pengembangan Puskesmas	1	Paket	20.000.000	20.000.000	Kabupaten/Kota	20.000.000					K4
		20	PEMBANGUNAN PAGAR DAN RENOVASI GEDUNG PUSKESMAS KOTO TINGGI	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Pengembangan Puskesmas	1	Paket	200.000.000	200.000.000	Kabupaten/Kota	200.000.000					K4
		21	JASA KONSULTAN PENGAWASAN PUSKESMAS BANJA LAWEH	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Pengembangan Puskesmas	1	Paket	72.000.000	72.000.000	Kabupaten/Kota	72.000.000					K4
		22	JASA KONSULTAN PERENCANAAN PUSKESMAS BANJA LAWEH	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Pengembangan Puskesmas	1	Paket	86.400.000	86.400.000	Kabupaten/Kota	86.400.000					K4
		23	PEKERJAAN KONSTRUKSI PUSKESMAS BANJA LAWEH	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Pengembangan Puskesmas	1	Paket	1.440.000.000	1.440.000.000	Kabupaten/Kota	1.440.000.000					K4
		24	Advokasi dan Sosialisasi pada Kab/Kota untuk PHA pada Situasi Bencana (hybrid)	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Advokasi dan Sosialisasi pada Kab/Kota untuk PHA pada Situasi Bencana (hybrid)	2	Paket	6.666.666	13.333.332	Pusat		13.333.332				k2
		25	Fasilitasi pelaksanaan kegiatan/aktivitas pemanfaatan waktu luang positif, kreatif dan rekreatif di POS SAPA	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Fasilitasi pelaksanaan kegiatan/aktivitas pemanfaatan waktu luang positif, kreatif dan rekreatif di POS SAPA	2	Paket	49.999.999	49.999.999	Pusat		49.999.999				k2
		26	Pengalokasian biaya pengiriman dan instalasi alat kesehatan dan meubelair bagi 183 Puskesmas Pembantu terdampak bencana serta biaya lainnya	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Pengalokasian biaya pengiriman dan instalasi alat kesehatan dan meubelair bagi 183 Puskesmas Pembantu terdampak bencana serta biaya lainnya	1	Paket	1.678.947.368	1.678.947.368	Pusat		1.678.947.368				K2
4,2	PENDIDIKAN								79.435.710.244		60.671.399.999	6.437.083.333	12.327.225.912	-	-	
		1	SMAN 2 KEC. PANGKALAN KOTO BARU	PANGKALAN KOTO BARU/TANJUNGPALAH	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1	Paket	6.437.083.333	6.437.083.333	Provinsi		6.437.083.333				K1
		2	UPTD SD NEGERI 04 KOTO TINGGI	GUNJANG OMEHKOTO TINGGI	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1	Paket	122.727.995	122.727.995	Kabupaten/Kota	122.727.995					K1
		3	UPTD SD NEGERI 04 KOTO TINGGI	GUNJANG OMEHKOTO TINGGI	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah dan Pengadaan Mebel Sekolah	1	Paket	303.751.787	303.751.787	Kabupaten/Kota	303.751.787					K1
		4	UPTD SD NEGERI 04 KOTO TINGGI	GUNJANG OMEHKOTO TINGGI	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1	Paket	230.114.990	230.114.990	Kabupaten/Kota	230.114.990					K1
		5	UPTD SD NEGERI 06 KOTO TINGGI	GUNJANG OMEHKOTO TINGGI	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1	Paket	6.437.083.333	6.437.083.333	Kabupaten/Kota	6.437.083.333					K1
		6	UPTD SD NEGERI 02 BARUAH GUNJANG	BUKIK BARISAN/BARUAH GUNJANG	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1	Paket	3.589.451.673	3.589.451.673	Kabupaten/Kota	3.589.451.673					K1
		7	UPTD SD NEGERI 01 BANJA LOWEH	BUKIK BARISAN/BANJA LOWEH	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1	Paket	856.469.245	856.469.245	Kabupaten/Kota	856.469.245					K1
		8	UPTD SD NEGERI 01 BANJA LOWEH	BUKIK BARISAN/BANJA LOWEH	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1	Paket	5.580.614.088	5.580.614.088	Kabupaten/Kota	5.580.614.088					K1
		9	UPTD SMP NEGERI 4 KEC. BUKIK BARISAN	BUKIK BARISAN/BANJA LOWEH	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	1	Paket	2.252.979.167	2.252.979.167	Kabupaten/Kota	2.252.979.167					K1
		10	UPTD SMP NEGERI 4 KEC. BUKIK BARISAN	BUKIK BARISAN/BANJA LOWEH	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	1	Paket	2.252.979.167	2.252.979.167	Kabupaten/Kota	2.252.979.167					K1

		11	UPTD SMP NEGERI 4 KEC. BUKIK BARISAN	BUKIK BARISANBANJA LOWEH	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Gurukepala	1	Paket	1.931.125.000	1.931.125.000	KabupatenKota	1.931.125.000					K1
		12	UPTD SD NEGERI 02 BARUAH GUNJANG	BUKIK BARISANBARUAH GUNJANG	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1	Paket	2.847.631.660	2.847.631.660	KabupatenKota	2.847.631.660					K1
		13	UPTD SD NEGERI 04 TAEH BUKIK	PAYAKUMBUHTAEH BUKIK	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah dan Peningkatan Mebel Sekolah	1	Paket	3.645.021.449	3.645.021.449	KabupatenKota	3.645.021.449					K1
		14	UPTD SD NEGERI 06 PANDAM GADANG	GUNJANG OMEHPANDAM GADANG	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1	Paket	259.313.784	259.313.784	KabupatenKota	259.313.784					K1
		15	UPTD SD NEGERI 04 TAEH BUKIK	PAYAKUMBUHTAEH BUKIK	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Gurukepala Sekolah/TTU dan Peningkatan Mebel Sekolah	1	Paket	607.503.575	607.503.575	KabupatenKota	607.503.575					K1
		16	UPTD SD NEGERI 06 PANDAM GADANG	GUNJANG OMEHPANDAM GADANG	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1	Paket	4.118.513.033	4.118.513.033	KabupatenKota	4.118.513.033					K1
		17	UPTD SD NEGERI 04 TAEH BUKIK	PAYAKUMBUHTAEH BUKIK	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1	Paket	122.727.995	122.727.995	KabupatenKota	122.727.995					K1
		18	UPTD SD NEGERI 04 TAEH BUKIK	PAYAKUMBUHTAEH BUKIK	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1	Paket	230.114.990	230.114.990	KabupatenKota	230.114.990					K1
		19	UPTD SD NEGERI 04 TAEH BUKIK	PAYAKUMBUHTAEH BUKIK	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1	Paket	767.049.968	767.049.968	KabupatenKota	767.049.968					K1
		20	UPTD SD NEGERI 06 PANDAM GADANG	GUNJANG OMEHPANDAM GADANG	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1	Paket	686.418.839	686.418.839	KabupatenKota	686.418.839					K1
		21	UPTD SD NEGERI 04 TAEH BUKIK	PAYAKUMBUHTAEH BUKIK	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah dan Peningkatan Mebel Sekolah	1	Paket	607.503.575	607.503.575	KabupatenKota	607.503.575					K1
		22	UPTD SD NEGERI 06 PANDAM GADANG	GUNJANG OMEHPANDAM GADANG	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Gurukepala	1	Paket	1.372.837.678	1.372.837.678	KabupatenKota	1.372.837.678					K1
		23	UPTD SD NEGERI 04 KOTO TINGGI	GUNJANG OMEHKOTO TINGGI	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah dan Peningkatan Mebel Sekolah	1	Paket	607.503.575	607.503.575	KabupatenKota	607.503.575					K1
		24	UPTD SD NEGERI 04 TAEH BUKIK	PAYAKUMBUHTAEH BUKIK	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1	Paket	153.409.994	153.409.994	KabupatenKota	153.409.994					K1
		25	UPTD SD NEGERI 04 TAEH BUKIK	PAYAKUMBUHTAEH BUKIK	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah dan Peningkatan Mebel Sekolah	1	Paket	303.751.787	303.751.787	KabupatenKota	303.751.787					K1
		26	UPTD SD NEGERI 04 KOTO TINGGI	GUNJANG OMEHKOTO TINGGI	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Gurukepala Sekolah/TTU dan Peningkatan Mebel Sekolah	1	Paket	607.503.575	607.503.575	KabupatenKota	607.503.575					K1
		27	UPTD SD NEGERI 04 KOTO TINGGI	GUNJANG OMEHKOTO TINGGI	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1	Paket	767.049.968	767.049.968	KabupatenKota	767.049.968					K1
		28	UPTD SD NEGERI 05 BARUAH GUNJANG	BUKIK BARISANBARUAH GUNJANG	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1	Paket	6.437.083.333	6.437.083.333	KabupatenKota	6.437.083.333					K1
		29	UPTD SD NEGERI 04 KOTO TINGGI	GUNJANG OMEHKOTO TINGGI	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah dan Peningkatan Mebel Sekolah	1	Paket	3.645.021.449	3.645.021.449	KabupatenKota	3.645.021.449					K1
		30	UPTD SD NEGERI 04 KOTO TINGGI	GUNJANG OMEHKOTO TINGGI	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1	Paket	153.409.994	153.409.994	KabupatenKota	153.409.994					K1
		31	DUKUNGAN LAYANAN PENDIDIKAN SELAMA MASA PEMULIHAN	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	-	21	Orang	1.060.000	22.260.000	Pusat		22.260.000				K2
		32	DUKUNGAN LAYANAN PENDIDIKAN SELAMA MASA PEMULIHAN	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	-	1	Ruang	53.000.000	53.000.000	Pusat		53.000.000				K2
		33	DUKUNGAN LAYANAN PENDIDIKAN SELAMA MASA PEMULIHAN	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	-	1	Paket	14.120.100	14.120.100	Pusat		14.120.100				K2
		34	DUKUNGAN LAYANAN PENDIDIKAN SELAMA MASA PEMULIHAN	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	-	1	Paket	8.232.985.242	8.232.985.242	Pusat		8.232.985.242				K2
		35	DUKUNGAN LAYANAN PENDIDIKAN SELAMA MASA PEMULIHAN	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	-	1	Paket	516.000.000	516.000.000	Pusat		516.000.000				K2
		36	DUKUNGAN LAYANAN PENDIDIKAN SELAMA MASA PEMULIHAN	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	-	21	orang	450.000	9.450.000	Pusat		9.450.000				K2
		37	REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI SARANA DAN PRASARAN SATUAN PENDIDIKAN	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	-	1	Paket	110.240.000	110.240.000	Pusat		110.240.000				K2
		38	PENINGKATAN KOMPETENSI DAN PROFESIONALITAS GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN MADRASAH	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	-	621	Orang	2.700.000	1.676.700.000	Pusat		1.676.700.000				K2
		39	" PROGRAM MAHASISWA BERDAMPAK: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMULIHAN DAMPAK BENCANA DI SUMATRA "	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	" Program Mahasiswa Berdampak Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemulihan Dampak Bencana di Sumatra "	8	Proposal	124.240.196	993.921.570	Pusat		993.921.570				K2
		40	PROGRAM WAJIB BELAJAR 13 TAHUN	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Keagamaan Islam	3	Paket	200.000.000	600.000.000	Pusat		600.000.000				K2
		41	BANTUAN PENDIDIKAN	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	-	12	Paket	1.800.000	21.600.000	Pusat		21.600.000				K2
		42	PROGRAM WAJIB BELAJAR 13 TAHUN	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah	39	Paket	1.800.000	70.200.000	Pusat		70.200.000				K2
		43	PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA, KONDISI KHUSUS, DAN SITUASI PARIPAT	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga, Kondisi Khusus, dan Situasi Darurat	1	Paket	6.750.000	6.750.000	Pusat		6.750.000				K2
		44	REHABILITASI RUANG GURU SDN 03 BATU HAMPAR	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	-	50,5747	M2	4.350.001	220.000.000	KabupatenKota	220.000.000					K4
		45	REHABILITASI RUANG PERPUSTAKAAN SDN 04 MUNGKA	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	-	34,4828	M2	4.349.995	150.000.000	KabupatenKota	150.000.000					K4
		46	PERENCANAAN REHAB RUANG KELAS SDN 04 SIALANG	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1	Paket	27.833.333	27.833.333	KabupatenKota	27.833.333					K4
		47	REHABILITASI WC/TOILET SDN 04 KAPUR IX	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	-	68,9655	M2	4.350.001	300.000.000	KabupatenKota	300.000.000					K4
		48	PENGAWASAN REHAB RUANG KELAS SDN 04 SIALANG	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1	Paket	19.900.000	19.900.000	KabupatenKota	19.900.000					K4

		49	REHAB RUANG KELAS SDN 04 SIALANG	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1	Paket	398.000.000	398.000.000	Kabupaten/Kota	398.000.000					K4
		50	PERENCANAAN REHABILITASI DAM SMPN 2 KEC. BUKIK BARISAN	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1	Paket	3.500.000	3.500.000	Kabupaten/Kota	3.500.000					K4
		51	PENGAWASAN REHABILITASI DAM SMPN 2 KEC. BUKIK BARISAN	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1	Paket	2.500.000	2.500.000	Kabupaten/Kota	2.500.000					K4
		52	PERENCANAAN REHABILITASI WC/TOILET SDN 04 KAPUR IX	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	-	4,82759	M2	4.349.997	21.000.000	Kabupaten/Kota	21.000.000					K4
		53	REHABILITASI DAM SMPN 2 KEC. BUKIK BARISAN	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1	Paket	50.000.000	50.000.000	Kabupaten/Kota	50.000.000					K4
		54	BELANJA JASA PERENCANAAN REHAB TK AL IKHLAS AIA ANGEK	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1	Paket	8.000.000	8.000.000	Kabupaten/Kota	8.000.000					K4
		55	BELANJA JASA PENGAWASAN REHAB TK AL IKHLAS AIA ANGEK	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1	Paket	6.000.000	6.000.000	Kabupaten/Kota	6.000.000					K4
		56	REHABILITASI WC/TOILET SDN 11 KOTO TINGGI	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	-	34,4828	M2	4.349.995	150.000.000	Kabupaten/Kota	150.000.000					K4
		57	REHABILITASI RUANG KELAS TK AL IKHLAS AIA ANGEK	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1	Paket	110.000.000	110.000.000	Kabupaten/Kota	110.000.000					K4
		58	REHABILITASI WC/TOILET SDN 02 SIALANG	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	-	34,4828	M2	4.349.995	150.000.000	Kabupaten/Kota	150.000.000					K4
		59	REHABILITASI WC/TOILET SDN 04 MUNGKA	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	-	34,4828	M2	4.349.995	150.000.000	Kabupaten/Kota	150.000.000					K4
		60	REHABILITASI RUANG KELAS SDN 03 BATU HAMPAR	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	-	183,908	M2	4.350.001	800.000.000	Kabupaten/Kota	800.000.000					K4
		61	REHABILITASI RUANG KELAS SDN 02 SARIK LAWEH	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	-	160,92	M2	4.349.988	700.000.000	Kabupaten/Kota	700.000.000					K4
		62	REHABILITASI RUANG KELAS SDN 11 KOTO TINGGI	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	-	114,943	M2	4.349.982	500.000.000	Kabupaten/Kota	500.000.000					K4
		63	REHABILITASI RUANG KELAS SDN 02 SIALANG	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	-	114,943	M2	4.349.982	500.000.000	Kabupaten/Kota	500.000.000					K4
		64	REHABILITASI RUANG KELAS SDN 04 MUNGKA	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	-	98,8506	M2	4.349.999	430.000.000	Kabupaten/Kota	430.000.000					K4
		65	PERENCANAAN REHABILITASI RUANG KELAS SDN 03 BATU HAMPAR	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	-	12,8736	M2	4.349.988	56.000.000	Kabupaten/Kota	56.000.000					K4
		66	REHABILITASI RUANG KELAS SMPN 4 KAPUR IX	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	-	137,931	M2	4.350.001	600.000.000	Kabupaten/Kota	600.000.000					K4
		67	PERENCANAAN REHABILITASI RUANG KELAS SMPN 4 KAPUR IX	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	-	9,65517	M2	4.350.001	42.000.000	Kabupaten/Kota	42.000.000					K4
		68	PENGAWASAN REHABILITASI RUANG KELAS SMPN 4 KAPUR IX	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	-	6,89655	M2	4.350.001	30.000.000	Kabupaten/Kota	30.000.000					K4
		69	SD 04 KOTO TINGGI	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Relokasi	1	Unit	3.500.000.000	3.500.000.000	Kabupaten/Kota	3.500.000.000					K4
		70	UPTD SDN 04 SIMPANG KAPUAK	MUNGKA/ SIMPANG KAPUAK	Rehabilitasi WC UPTD SDN 04 Simpang Kapuak	1	Unit	100.000.000	100.000.000	Kabupaten/Kota	100.000.000					K4
		71	UPTD SDN 04 SIMPANG KAPUAK	MUNGKA/ SIMPANG KAPUAK	Rehabilitasi Perpustakaan UPTD SDN 04 Simpang Kapuak	1	Unit	150.000.000	150.000.000	Kabupaten/Kota	150.000.000					K4
4,3			LEMBAGA SOSIAL						454.745.454		-	-	454.745.454	-	-	
		1	KELOMPOK RENTAN YANG MENDAPATKAN ASISTENSI REHABILITASI SOSIAL	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Kelompok Rentan yang mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial	157,44	Orang	2.888.373	454.745.454	Pusat			454.745.454			K2
4,4			KEBUDAYAAN						800.000.000		-	-	800.000.000	-	-	
		1	KANTOR PDRI KOTO TINGGI	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	"Pemeliharaan : - Kantor PDRI Koto Tinggi Revitalisasi Situs - Bangunan dan Penataan Ruang Informasi Rumah Perundingan PDRI Padang Jangang"	3	Paket	266.666.667	800.000.000	Pusat			800.000.000			K2
4,5			KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN						150.000.000		100.000.000	-	50.000.000	-	-	
		1	PEMETAAN KEPEMILIKAN DOKUMEN IDENTITAS ANAK YANG TERDAMPAR BENCANA	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Pemetaan kepemilikan dokumen identitas anak yang terdampak bencana	1	Paket	50.000.000	50.000.000	Pusat			50.000.000			K2
		2	PERSONAL COMPUTER	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	1	Unit	19.635.000	19.635.000	Kabupaten/Kota	19.635.000					K4
		3	PRINTER	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	1	Unit	3.903.000	3.903.000	Kabupaten/Kota	3.903.000					K4
		4	SCANNER	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	1	Unit	76.462.000	76.462.000	Kabupaten/Kota	76.462.000					K4
5			LINTAS SEKTOR						110.072.902.966		27.337.866.463	-	82.735.036.503	-	-	
5,1			PEMERINTAHAN						64.628.877.376		1.764.214.591	-	62.864.662.785	-	-	
		1	Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung Umum	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung Umum	3	Paket		56.828.421.052	Pusat			56.828.421.052			K2
		2	NORMALISASI FUNGSI PELAYANAN PUBLIK	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	-	3	Dokumen	33.333.333	99.999.999	Pusat			99.999.999			K2

		3	LATSAR CPNS	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	-	841	Orang	5.260.000	4.423.660.000	Pusat			4.423.660.000			K2
		4	PEMBERIAN PENGHARGAAN KHUSUS BAGI ASN BERDEDIKASI DI DAERAH BENCANA MELALUI PENGAKUAN PEMBELAJARAN	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Pemberian penghargaan khusus bagi ASN berdedikasi di daerah bencana melalui pemakuan pembelajaran	1	Paket	5.208.333	5.208.333	Pusat			5.208.333			K2
		5	AKADEMI PENANGANAN DAMPAK BENCANA	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Akademil Penanganan Dampak Bencana	2	Paket	4.116.667	8.233.334	Pusat			8.233.334			K2
		6	AKADEMI PEMULIHAN KEBUTUHAN DASAR	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Akademil Pemulihan Kebutuhan Dasar	2	Paket	4.166.667	8.333.334	Pusat			8.333.334			K2
		7	PEMADANAN DATA KEPENDUDUKAN	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	-	3	dokumen	25.641.025	76.923.075	Pusat			76.923.075			K2
		8	PEMULIHAN SATUAN PENDIDIKAN DAN DAERAH	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Pemulihan Satuan Pendidikan dan Daerah	2	Paket	4.166.667	8.333.334	Pusat			8.333.334			K2
		9	PEMULIHAN DAN KONSERVASI LAHAN	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Pemulihan dan Konservasi Lahan	2	Paket	4.166.667	8.333.334	Pusat			8.333.334			K2
		10	LAYANAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN PROGRAM DAN BELANJA KEGIATAN LINGKUP DI TJEN BINA PEMDES	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Layanan Penyusunan Kebijakan Program dan Belanja Kegiatan Lingkup Di Tjen Bina Pemdes	3	Paket	133.333.333	400.000.000	Pusat			400.000.000			K2
		11	DESA YANG DIFASILITASI DALAM PENERAPAN PELAYANAN PEMERINTAHAN DESA BERBASIS DIGITAL	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Desa yang difasilitasi dalam Penerapan Pelayanan Pemerintahan Desa Berbasis Digital	1	Paket	211.485.400	211.485.400	Pusat			211.485.400			K2
		12	Identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh korban bencana/pemangku kepentingan terkait yang berkaitan dengan dokumen	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh korban bencana/pemangku kepentingan terkait yang berkaitan dengan dokumen	3	Paket	4.931.718	14.795.154	Pusat			14.795.154			K2
		13	Koordinasi dengan pengampu layanan mengenai kondisi eksisting layanan digital dan strategi percepatan pemenuhan / penyediaan dokumen yang hilang/rusak akibat bencana	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Koordinasi dengan pengampu layanan mengenai kondisi eksisting layanan digital dan strategi percepatan pemenuhan / penyediaan dokumen yang hilang/rusak akibat bencana	3	Paket	4.931.718	14.795.154	Pusat			14.795.154			K2
		14	Penyusunan strategi percepatan layanan digital dalam rangka mendukung penyediaan dokumen digital yang diperlukan oleh korban bencana	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Penyusunan strategi percepatan layanan digital dalam rangka mendukung penyediaan dokumen digital yang diperlukan oleh korban bencana	3	Paket	4.931.718	14.795.154	Pusat			14.795.154			K2
		15	Daerah yang dievaluasi Rancangan Perda Tata Ruangnya	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Daerah yang dievaluasi Rancangan Perda Tata Ruangnya	3	Paket	1.282.051	3.846.153	Pusat			3.846.153			K2
		16	Daerah yang difasilitasi dalam penerapan SPM	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Daerah yang difasilitasi dalam penerapan SPM	3	Paket	1.282.051	3.846.153	Pusat			3.846.153			K2
		17	DATA LUASAN RHL DI DAERAH BENCANA	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Data luasan RHL di daerah bencana	3	Paket	-	2.884.614	Pusat			2.884.614			K2
		18	DATA KETERSEDIAAN KELISTRIKAN, BBM DAN GAS DI DAERAH PASCA BENCANA	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	DATA KETERSEDIAAN KELISTRIKAN, BBM DAN GAS DI DAERAH PASCA BENCANA	3	Paket	-	3.846.153	Pusat			3.846.153			K2
		19	DATA HUNIAN SEMENTARA DAN HUNIAN TETAP	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	DATA HUNIAN SEMENTARA DAN HUNIAN TETAP	3	Paket	-	3.846.153	Pusat			3.846.153			K2
		20	DATA INFRASTRUKTUR DASAR DAERAH BENCANA	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	DATA INFRASTRUKTUR DASAR DAERAH BENCANA	3	Paket	-	3.846.153	Pusat			3.846.153			K2
		21	Tata kelola digitalisasi pemerintah daerah	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Tata kelola digitalisasi pemerintah daerah	3	Paket	961.538	2.884.614	Pusat			2.884.614			K2
		22	DATA FASILITAS LAYANAN KESEHATAN (RUMAH SAKIT, PUSKESMAS) YANG BEROPERASI	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	DATA FASILITAS LAYANAN KESEHATAN (RUMAH SAKIT, PUSKESMAS) YANG BEROPERASI	3	Paket	-	3.846.153	Pusat			3.846.153			K2
		23	PEMBINAAN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Terselenggaranya koordinasi dengan kementerian perdagangan terkait revitalisasi pasar di daerah bencana dan turunnya proxy IPH harga bapokding di daerah bencana sesuai release BPS	3	Paket	-	1.923.075	Pusat			1.923.075			K2
		24	DATA MASYARAKAT YANG TERVALIDASI DI DTSEN	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	DATA MASYARAKAT YANG TERVALIDASI DI DTSEN	3	Paket	-	1.923.075	Pusat			1.923.075			K2
		25	DATA SEKOLAH YANG BEROPERASI DENGAN BAIK	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	DATA SEKOLAH YANG BEROPERASI DENGAN BAIK	3	Paket	-	1.923.075	Pusat			1.923.075			K2
		26	DATA KORBAN BENCANA PESERTA AKTIF BPJS KETENAGAKERJAAN	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	DATA SEKOLAH YANG BEROPERASI DENGAN BAIK	3	Paket	-	1.923.075	Pusat			1.923.075			K2
		27	Rekomendasi hasil fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Rekomendasi hasil fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah	3	Paket	4.166.666	12.499.998	Pusat			12.499.998			K2
		28	FASILITASI PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) DALAM Mendukung PEMULIHAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCABENCANA ALAM.	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	FASILITASI PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) DALAM Mendukung PEMULIHAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCABENCANA ALAM.	3	Paket	-	115.384.614	Pusat			115.384.614			K2
		29	PERCEPATAN LAYANAN PENYUSUNAN DAN PENERBITAN PRODUK HUKUM DAERAH DALAM Mendukung PEMULIHAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCABENCANA ALAM.	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	PERCEPATAN LAYANAN PENYUSUNAN DAN PENERBITAN PRODUK HUKUM DAERAH DALAM Mendukung PEMULIHAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCABENCANA ALAM.	3	Paket	-	115.384.614	Pusat			115.384.614			K2
		30	Pemulihan tugas, fungsi dan kinerja kelembagaan dan kepegawaian perangkat daerah pasca bencana alam	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Pemulihan tugas, fungsi dan kinerja kelembagaan dan kepegawaian perangkat daerah pasca bencana alam	3	Paket	76.923.076	230.769.228	Pusat			230.769.228			K2

		31	Facilitasi penyusunan dan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPD) dalam mendukung pemulihan penyelenggaraan pemerintahan daerah pascabencana alam	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Facilitasi penyusunan dan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPD) dalam mendukung pemulihan penyelenggaraan pemerintahan daerah pascabencana alam	3	Paket	38.461.538	115.384.614	Pusat		115.384.614			K2
		32	Dukungan Verifikasi dan validasi data penerima Bantuan Perumahan, Bantuan Isi Hunian dan Bantuan Jaminan Hidup pada daerah terdampak bencana alam	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Dukungan Verifikasi dan validasi data penerima Bantuan Perumahan, Bantuan Isi Hunian dan Bantuan Jaminan Hidup pada daerah terdampak bencana alam	3	Paket	38.461.538	115.384.614	Pusat		115.384.614			K2
		33	KANTOR BUPATI, RUDIN KDH, WKDH, SEKRETARIS DAERAH DAN RUDIN	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Pemeliharaan Gedung	1	Kegiatan	499.954.000	499.954.000	Kabupaten/Kota		499.954.000			K4
		34	PEKERJAAN FISIK REHABILITASI GEDUNG KANTOR DPRD KAB. LIMA PULUH KOTA (TKD)	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	-	23,4081	M2	6.690.000	156.600.189	Kabupaten/Kota		156.600.189			K4
		35	PENGAWASAN REHABILITASI GEDUNG KANTOR DPRD KAB. LIMA PULUH KOTA	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	-	1,61435	M2	6.690.000	10.800.002	Kabupaten/Kota		10.800.002			K4
		36	PERENCANAAN REHABILITASI GEDUNG KANTOR DPRD KAB. LIMA PULUH KOTA	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	-	1,88341	M2	6.689.993	12.600.000	Kabupaten/Kota		12.600.000			K4
		37	BIAYA PENUNJANG PEMBANGUNAN, PEMANFAATAN, PELESTARIAN DAN PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	-	3	M2	6.689.992	20.000.000	Kabupaten/Kota		20.000.000			K4
		38	FASILITASI PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS NAGARI	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Facilitasi Penetapan dan Penekasan Batas Desa	1	Paket	61.326.400	61.326.400	Kabupaten/Kota		61.326.400			K4
		39	PEMBINAAN KADER POSYANDU 6 SPM UNTUK NAGARI TERDAMPAK BENCANA	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1	Paket	37.047.000	37.047.000	Kabupaten/Kota		37.047.000			K4
		40	WORKSHOP PEMULIHAN EKONOMI NAGARI TERDAMPAK BENCANA DENGAN PEMBERDAYAAN BUMNAG DAN PELATIHAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BAGI BUMNAG YANG TERDAMPAK BENCANA	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1	Paket	54.160.000	54.160.000	Kabupaten/Kota		54.160.000			K4
		41	PERENCANAAN TURAP DINDING PENAHAN TANAH (DPT) DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1	Paket	16.500.000	16.500.000	Kabupaten/Kota		16.500.000			K4
		42	PENGAWASAN TURAP DINDING PENAHAN TANAH (DPT) DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1	Paket	15.000.000	15.000.000	Kabupaten/Kota		15.000.000			K4
		43	Pengawasan Rehab Kantor Dinas PUPR	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	-	1		10.000.000	10.000.000	Kabupaten/Kota		10.000.000			K4
		44	Perencanaan Rehab Gedung Dinas PUPR	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	-	1		15.000.000	15.000.000	Kabupaten/Kota		15.000.000			K4
		45	REHAB GEDUNG KANTOR DINAS PUPR GEDUNG TIDAK BERTINGKAT SPESIFIKASI: SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	-	1.027	M2	148.624	152.565.000	Kabupaten/Kota		152.565.000			K4
		46	DINDING PENAHAN TANAH (DPT) DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	HARAU/ SARILAMAK	Pembangunan dinding penahan tanah tebing di area bangunan perpustakaan daerah	200	M2	2.763.310	552.662.000	Kabupaten/Kota		552.662.000			K3.2
		47	KANTOR DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	HARAU/ KOTO TUO	Pembangunan pagar kantor dinas yang roboh	24	M2	6.250.000	150.000.000	Kabupaten/Kota		150.000.000			K3.2
5,2	Keamanan dan Keteriban (TNI/POLRI)								6.401.220.000		6.364.820.000	-	36.400.000	-	-
		1	KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	-	1	Paket	36.400.000	36.400.000	Pusat		36.400.000			K2
		2	SELANG 1,5 INCH	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindungan Diri	9	buah	4.500.000	40.500.000	Kabupaten/Kota		40.500.000			K4
		3	PENGADAAN KENDARAAN DALMAS SATPOL PP	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Keteriban Umum	1	Unit	825.000.000	825.000.000	Kabupaten/Kota		825.000.000			K4
		4	MOBIL PEMADAM KEBAKARAN WATER HIGH PRESURE 5000 LTR	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindungan Diri	1	Unit	2.750.000.000	2.750.000.000	Kabupaten/Kota		2.750.000.000			K4
		5	MOBIL PEMADAM KEBAKARAN WATER HIGH PRESURE 3000 LTR	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindungan Diri	1	Unit	1.950.000.000	1.950.000.000	Kabupaten/Kota		1.950.000.000			K4
		6	NOZEL SPESIFIKASI : -	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindungan Diri	13	buah	500.000	6.500.000	Kabupaten/Kota		6.500.000			K4
		7	BAJU ANTI PANAS	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindungan Diri	133	stel	1.700.000	226.100.000	Kabupaten/Kota		226.100.000			K4

		8	BAJU RESCUE	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindungan Diri	21	set	2.800.000	58.800.000	Kabupaten/Kota	58.800.000					K4
		9	GERINDA CINCIN	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindungan Diri	8	buah	500.000	4.000.000	Kabupaten/Kota	4.000.000					K4
		10	HELM PEMADAM	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindungan Diri	32	buah	2.300.000	73.600.000	Kabupaten/Kota	73.600.000					K4
		11	HELM RESCUE	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindungan Diri	21	buah	1.800.000	37.800.000	Kabupaten/Kota	37.800.000					K4
		12	SENER	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindungan Diri	11	buah	300.000	3.300.000	Kabupaten/Kota	3.300.000					K4
		13	SEPATU BOOT ANTI PANAS	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindungan Diri	32	pasang	1.700.000	54.400.000	Kabupaten/Kota	54.400.000					K4
		14	BATTERY HYDRAULIC COMBITOOLS	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindungan Diri	1	buah	140.000.000	140.000.000	Kabupaten/Kota	140.000.000					K4
		15	CHINSAW	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindungan Diri	8	Unit	6.000.000	48.000.000	Kabupaten/Kota	48.000.000					K4
		16	OPERASIONAL DALAM LINGKUNGAN KANTOR SATPOL PP	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketertarikan dan Ketertiban Umum	1	Paket	9.750.000	9.750.000	Kabupaten/Kota	9.750.000					K4
		17	BOP PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KETERTIRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Biaya Operasional	1	Paket	30.070.000	30.070.000	Kabupaten/Kota	30.070.000					K4
		18	PERALATAN VERTICAL RESCUE	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindungan Diri	1	set	50.000.000	50.000.000	Kabupaten/Kota	50.000.000					K4
		19	BOP PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN ALAT PELINDUNG DIRI	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Biaya Operasional	1	Paket	32.000.000	32.000.000	Kabupaten/Kota	32.000.000					K4
		20	POWER CUTTER/ RESCUE SAW	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindungan Diri	1	buah	25.000.000	25.000.000	Kabupaten/Kota	25.000.000					K4
5,3	Keuangan dan Perbankan								14.296.017.872		14.296.017.872	-	-	-	-	
		1	HUTANG BPJS KESEHATAN	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1	Tahun	13.158.977.435	13.158.977.435	Kabupaten/Kota	13.158.977.435					K4
		2	BELANJA TIDAK TERDUGA	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Pengelolaan Dana Danurak dan Mendesak	1	Paket	1.137.040.437	1.137.040.437	Kabupaten/Kota	1.137.040.437					K4
5,4	Lingkungan Hidup								6.408.313.099		2.679.500.000	-	3.728.813.099	-	-	
		1	PROGRAM KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	"(Rencana Aksi) Penyusunan KLHS"	1	Paket	500.000.000	500.000.000	Pusat		500.000.000				K2
		2	PROGRAM KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Program Kualitas Lingkungan Hidup	1	Paket	1.000.000.000	1.000.000.000	Pusat		1.000.000.000				K2
		3	PROGRAM KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Program Kualitas Lingkungan Hidup	1	Paket	1.000.000.000	1.000.000.000	Pusat		1.000.000.000				K2
		4	SM RIMBANG BALING	LAREH SAGO HALABAN/ SITANANG	Pemulihan ekosistem SM Rimbang Baling	1	Paket	9.959.554	9.959.554	Pusat		9.959.554				K3.1
		5	SM RIMBANG BALING	HARAU/ TARAM	Pemulihan ekosistem SM Rimbang Baling	1	Paket	11.826.470	11.826.470	Pusat		11.826.470				K3.1
		6	SM RIMBANG BALING	LAREH SAGO HALABAN/ TARAM	Pemulihan ekosistem SM Rimbang Baling	1	Paket	1.867.433	1.867.433	Pusat		1.867.433				K3.1
		7	SM RIMBANG BALING	HARAU/ SARILAMAK	Pemulihan ekosistem SM Rimbang Baling	1	Paket	1.244.845	1.244.845	Pusat		1.244.845				K3.1
		8	TWA SAGO MALINTANG	LAREH SAGO HALABAN/ BUKIK SIKUMPA	Pemulihan ekosistem TWA Sago Malintang	1	Paket	1.244.797	1.244.797	Pusat		1.244.797				K3.1
		9	PERBAIKAN TPST LUBUAK BATINGKOK	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Penganganan Sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTsa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	1	Unit	274.000.000	274.000.000	Kabupaten/Kota	274.000.000					K4
		10	PEMBUATAN FS TPST	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	80.000.000	80.000.000	Kabupaten/Kota	80.000.000					K4
		11	PEMBUATAN DOKUMEN RISPS	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	578.300.000	578.300.000	Kabupaten/Kota	578.300.000					K4

		12	PEMBUATAN DOKUMEN LINGKUNGAN TPDOT	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten Kota	1	Dokumen	80.000.000	80.000.000	Kabupaten/Kota	80.000.000					K4
		13	PEMBUATAN DED TPST	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten Kota	1	Dokumen	100.000.000	100.000.000	Kabupaten/Kota	100.000.000					K4
		14	PERINGATAN HARI LINGKUNGAN HIDUP SEDUNIA 2026	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten Kota	1	Paket	106.700.000	106.700.000	Kabupaten/Kota	106.700.000					K4
		15	PENGADAAN KONTAINER SAMPAH	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten Kota	2	Unit	50.000.000	100.000.000	Kabupaten/Kota	100.000.000					K4
		16	PENGADAAN BECAK MOTOR SAMPAH	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten Kota	3	Unit	42.000.000	126.000.000	Kabupaten/Kota	126.000.000					K4
		17	PENGADAAN TRUK ARM ROLL SAMPAH	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten Kota	1	Unit	955.000.000	955.000.000	Kabupaten/Kota	955.000.000					K4
		18	PEMELIHARAAN RTH	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1	Paket	279.500.000	279.500.000	Kabupaten/Kota	279.500.000					K4
		19	Rehabilitasi hutan dan lahan	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Rehabilitasi hutan dan lahan	3	Paket	400.890.000	1.202.670.000	Pusat		1.202.670.000				K2
5,5	Pengurangan Risiko Bencana								18.338.474.619		2.233.314.000	-	16.105.160.619	-	-	
		1	KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	"Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial"	3	Laporan	41.666.666	124.999.998	Pusat		124.999.998				K2
		2	KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	"Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial"	3	Paket	36.805.556	110.416.667	Pusat		110.416.667				K2
		3	REVITALISASI PUSPAGA	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	.	3	Unit	33.333.333	99.999.999	Pusat		99.999.999				K2
		4	PROGRAM KESETARAAN GENDER, PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga, Kondisi Khusus, dan Salusi Darurat	24	Orang	3.000.000	72.000.000	Pusat		72.000.000				K2
		5	PENGELOLAAN SISTEM JARINGAN KOMUNIKASI BMKG	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Pengelolaan Sistem Jaringan Komunikasi BMKG	2	Paket	625.000.000	1.250.000.000	Pusat		1.250.000.000				K2
		6	TERSEDINYA IGT BAHAYA BANJIR DALAM Mendukung Data Tunggal Geospasial Pasca Bencana Banjir Sumatera	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Tersedianya IGT Bahaya Banjir dalam mendukung Data Tunggal Geospasial Pasca bencana Banjir Sumatera	2	Paket	34.615.385	69.230.770	Pusat		69.230.770				K2
		7	BANTUAN TEKNIS PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN/KOTA TERDAMPAK DI PROVINSI ACEH, PROVINSI SUMATERA UTARA, DAN PROVINSI SUMATERA BARAT DENGAN TETAP MEMPERHATIKAN MITIGASI DAN ADAPTASI TERHADAP BENCANA	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Bantuan teknis penyusunan dan penetapan rencana tata ruang kabupaten/kota terdampak di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat dengan tetap memperhatikan mitigasi dan adaptasi terhadap bencana	2	Paket	2.601.562.500	5.203.125.000	Pusat		5.203.125.000				K2
		8	BANTUAN TEKNIS PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI ACEH, RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA, RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SUMATERA BARAT YANG MEMPERHATIKAN MITIGASI DAN ADAPTASI TERHADAP BENCANA	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Bantuan teknis penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Aceh, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat yang memperhatikan mitigasi dan adaptasi terhadap bencana	2	Paket	1.250.000.000	2.500.000.000	Pusat		2.500.000.000				K2
		9	REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI BIDANG PRASARANA FISIK DI WILAYAH PASCABENCANA	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Prasarana Fisik di Wilayah Pascabencana	2	Paket	33.964.773	67.929.545	Pusat		67.929.545				K2
		10	FASILITASI PEMULIHAN DAN PENINGKATAN BIDANG SOSIAL DI DAERAH PASCABENCANA	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Fasilitasi Pemulihan dan Peningkatan Bidang Sosial di Daerah Pascabencana	6	Pokmas	213.098.333	1.278.589.998	Pusat		1.278.589.998				K2
		11	REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI BIDANG PRASARANA FISIK DI WILAYAH PASCABENCANA	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Prasarana Fisik di Wilayah Pascabencana	3	Paket	27.321.708	81.965.125	Pusat		81.965.125				K2
		12	KOORDINASI PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN TEKNIS REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Koordinasi Penyusunan Perencanaan dan Kebijakan Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	1	Paket	56.124.000	56.124.000	Pusat		56.124.000				K2
		13	KOORDINASI PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN TEKNIS REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Koordinasi Penyusunan Perencanaan dan Kebijakan Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	3	Paket	56.155.250	168.465.750	Pusat		168.465.750				K2
		14	EWS	BATANG MAHAT	Mitigasi Bencana Banjir	1	Paket	1.500.000.000	1.500.000.000	Pusat		1.500.000.000				K3.1
		15	EWS	BATANG SINAMAR	Mitigasi Bencana Banjir	1	Paket	1.500.000.000	1.500.000.000	Pusat		1.500.000.000				K3.1
		16	KAWASAN HUTAN DAN LAHAN	HARAU/ TARAM	Rehabilitasi hutan dan lahan	1	Paket	1.773.970.575	1.773.970.575	Pusat		1.773.970.575				K3.1
		17	KAWASAN HUTAN DAN LAHAN	HARAU/ SARILAMAK	Rehabilitasi hutan dan lahan	1	Paket	18.672.681	18.672.681	Pusat		18.672.681				K3.1
		18	KAWASAN HUTAN DAN LAHAN	LAREH SAGO HALABAN/ TARAM	Rehabilitasi hutan dan lahan	1	Paket	28.011.495	28.011.495	Pusat		28.011.495				K3.1

		19	KAWASAN HUTAN DAN LAHAN	LAREH SAGO HALABAN/BUKIK SIKUMPA	Rehabilitasi hutan dan lahan	1	Paket	186.719.685	186.719.685	Pusat			186.719.685			K3.1
		20	KAWASAN HUTAN DAN LAHAN	LAREH SAGO HALABAN/SITANANG	Rehabilitasi hutan dan lahan	1	Paket	14.939.331	14.939.331	Pusat			14.939.331			K3.1
		21	PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA KONTIJENSI	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	1	Dokumen	150.000.000	150.000.000	Kabupaten/Kota		150.000.000				K4
		22	PENYUSUNAN DOKUMEN RPKB	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	1	Dokumen	280.200.000	280.200.000	Kabupaten/Kota		280.200.000				K4
		23	BOP PENYUSUNAN RENCANA KONTIJENSI KABUPATEN/KOTA	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Biaya Operasional	1	Paket	159.990.000	159.990.000	Kabupaten/Kota		159.990.000				K4
		24	PELATIHAN PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	1	Paket	59.690.000	59.690.000	Kabupaten/Kota		59.690.000				K4
		25	BOP PELATIHAN PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA KABUPATEN/KOTA	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Biaya Operasional	1	Paket	40.313.300	40.313.300	Kabupaten/Kota		40.313.300				K4
		26	TRAUMA HEALING	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	1	Paket	149.221.200	149.221.200	Kabupaten/Kota		149.221.200				K4
		27	TENAGA AHLI TFL	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	18	orang/ bulan	4.000.000	72.000.000	Kabupaten/Kota		72.000.000				K4
		28	BOP KOORDINASI PENANGANAN PASCABENCANA KABUPATEN/KOTA	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Biaya Operasional	1	Paket	345.282.100	345.282.100	Kabupaten/Kota		345.282.100				K4
		29	BIMTEK JITUPASNA	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	1	Paket	30.165.000	30.165.000	Kabupaten/Kota		30.165.000				K4
		30	BOP BIMBINGAN TEKNIS PASCA BENCANA KABUPATEN/KOTA	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Biaya Operasional	1	Paket	39.215.600	39.215.600	Kabupaten/Kota		39.215.600				K4
		31	PC DAN LAPTOP BID. KL/PUSDALOPS	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1	Paket	94.578.000	94.578.000	Kabupaten/Kota		94.578.000				K4
		32	PRINTER BID. KL/PUSDALOPS	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	3	Unit	4.939.000	14.817.000	Kabupaten/Kota		14.817.000				K4
		33	BOP PENGENDALIAN OPERASI DAN PENYEDIAAN SARANA PRASARANA KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA KABUPATEN/KOTA	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Biaya Operasional	1	Paket	74.795.000	74.795.000	Kabupaten/Kota		74.795.000				K4
		34	REHABILITASI/PEMELIHARAAN GEDUNG PUSDALOPS	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	1	Paket	114.085.200	114.085.200	Kabupaten/Kota		114.085.200				K4
		35	PENGADAAN PERALATAN KEBENCANAAN	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	1	Paket	329.891.800	329.891.800	Kabupaten/Kota		329.891.800				K4
		36	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	1	Paket	97.275.000	97.275.000	Kabupaten/Kota		97.275.000				K4
		37	MODAL ALAT PENDUKUNG Pencarian KEBENCANAAN	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	1	Paket	155.015.800	155.015.800	Kabupaten/Kota		155.015.800				K4
		38	BOP PENYEDIAAN PERALATAN PERLINDUNGAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA KABUPATEN/KOTA	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Biaya Operasional	1	Paket	26.779.000	26.779.000	Kabupaten/Kota		26.779.000				K4
TOTAL									1.201.794.846.496		865.356.027.409	43.670.821.893	197.605.884.167	83.386.333.237	1.249.464.000	

Age Group	Percentage
18-24	10%
25-34	25%
35-44	20%
45-54	15%
55-64	10%
65-74	10%
75-84	5%
85+	5%

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

**REKAPITULASI PENILAIAN KERUSAKAN DAN KERUGIAN
PASCABENCANA BANJIR, TANAH LONGSOR DAN CUACA EKSTREM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2025**

NO	SEKTOR/ SUBSEKTOR		Nilai Kerusakan	Nilai Kerugian	Total Kerusakan dan Kerugian
			(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1	PERUMAHAN		24.664.066.415	14.326.238.900	38.990.305.315
	1	Rumah	24.201.967.415	14.326.238.900	38.528.206.315
	2	Prasarana Lingkungan	462.099.000	-	462.099.000
2	INFRASTRUKTUR		551.344.371.399	352.397.315.630	903.741.687.029
	1	Transportasi	543.472.695.999	349.137.060.630	892.609.756.629
	2	Sumber Daya Air	5.813.882.000	1.920.000.000	7.733.882.000
	3	Energi	240.000.000	460.000.000	700.000.000
	4	Pos dan Telekomunikasi	-	-	-
	5	Air dan Sanitasi	937.538.400	-	937.538.400
	6	(Rambu-rambu, PJU, Marka	880.255.000	880.255.000	1.760.510.000
3	EKONOMI		5.733.997.394	1.018.484.099	6.752.481.493
	1	Pertanian	5.042.134.295	395.646.000	5.437.780.295
	2	Pangan	5.700.000	3.000.000	8.700.000
	3	Perikanan	-	24.375.000	24.375.000
	4	Peternakan	-	-	-
	5	Perkebunan	-	-	-
	6	Pertambangan	-	-	-
	7	Perindustrian	426.000.000	360.000.000	786.000.000
	8	Perdagangan	-	-	-
	9	Pariwisata	142.020.000	142.020.000	284.040.000
	10	Koperasi dan UKM	92.000.000	67.300.000	159.300.000
	11	Hutan	26.143.099	26.143.099	52.286.198
4	SOSIAL		16.922.288.000	298.724.400	17.221.012.400
	1	Kesehatan	2.000.000.000	-	2.000.000.000
	2	Pendidikan	14.922.288.000	298.724.400	15.221.012.400
	3	Agama	-	-	-
	4	Budaya	-	-	-
	5	Lembaga Sosial	-	-	-
5	LINTAS SEKTOR		702.662.000	-	702.662.000
	1	Pemerintahan	702.662.000	-	702.662.000
	2	Keuangan dan Perbankan	-	-	-
	3	Ketertiban dan Keamanan	-	-	-
	4	Lingkungan Hidup	-	-	-
TOTAL			599.367.385.208	368.040.763.029	967.408.148.237

**REKAPITULASI PERKIRAAN KEBUTUHAN
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA
BANJIR, TANAH LONGSOR DAN CUACA EKSTREM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2025**

NO	SEKTOR/ SUBSEKTOR		Nilai Kebutuhan	Prosentase Kebutuhan
			(Rp.)	(%)
1	PERUMAHAN		62.530.768.248	5,20%
	1	Rumah	62.068.669.248	5,16%
	2	Prasarana Lingkungan	462.099.000	0,04%
2	INFRASTRUKTUR		844.992.879.457	70,31%
	1	Transportasi	633.570.354.717	52,72%
	2	Sumber Daya Air	41.246.237.057	3,43%
	3	Energi	1.249.464.000	0,10%
	4	Air dan Sanitasi	168.326.823.683	14,01%
	5	Pos dan Telekomunikasi	600.000.000	0,05%
3	EKONOMI		57.187.265.402	4,76%
	1	Pertanian dan Perkebunan	27.901.354.588	2,32%
	2	Peternakan	1.821.941.500	0,15%
	3	Perikanan	21.658.299.824	1,80%
	4	Perdagangan	298.068.700	0,02%
	5	Perindustrian	3.184.289.473	0,26%
	6	Pariwisata	304.457.500	0,03%
	7	Koperasi dan UMKM	2.018.853.817	0,17%
4	SOSIAL		127.011.030.423	10,57%
	1	Kesehatan	46.170.574.725	3,84%
	2	Pendidikan	79.435.710.244	6,61%
	3	Lembaga Sosial	454.745.454	0,04%
	4	Kebudayaan	800.000.000	0,07%
	5	Kearsipan dan Perpustakaan	150.000.000	0,01%
5	LINTAS SEKTOR		110.072.902.966	9,16%
	1	Pemerintahan	64.628.877.376	5,38%
	2	Keamanan dan Ketertiban	6.401.220.000	0,53%
	3	Keuangan dan Perbankan	14.296.017.872	1,19%
	4	Lingkungan Hidup	6.408.313.099	0,53%
	5	Pengurangan Risiko Bencana	18.338.474.619	1,53%
TOTAL			1.201.794.846.496	100,00%